



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK**

2025



**Nganjuk
Satu
Data**

DOKUMEN METADATA INDIKATOR

**DATA STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Metadata Indikator Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dokumen ini merupakan hasil dari pelaksanaan *Desk Penyusunan Metadata* yang dilaksanakan dengan Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Dokumen Metadata Indikator ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kegiatan Statistik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dijadikan pedoman dalam pengajuan Rekomendasi Statistik (Romantik). Dokumen ini dapat diakses pada Portal Satu Data Kabupaten Nganjuk dengan laman dashboard.nganjukkab.go.id.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai walidata pendukung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk sebagai pembina data serta seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dalam membantu penyusunan Dokumen Metadata Indikator Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini.

Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami dalam menyusun dan menyajikan dokumen ini yang kiranya masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan saran dari semua pihak, guna penyempurnaan dokumen ini dimasa mendatang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.

Nganjuk, Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nganjuk



SUBANI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690510 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Perangkat Daerah	
Sekretariat Daerah	1
Sekretariat Dewan	10
Inspektorat Daerah	13
Dinas Pendidikan	15
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	26
Dinas Kesehatan	36
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	83
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	101
Dinas Tenaga Kerja	108
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	114
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126
Dinas Perhubungan	140
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	143
Dinas Lingkungan Hidup	151
Dinas Pertanian	159
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	183
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	194
Satuan Polisi Pamong Praja	202
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	204
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	207
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	211
Badan Pendapatan Daerah	214

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	218
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	222
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224
Rumah Sakit Daerah Nganjuk.....	233
Rumah Sakit Daerah Kertosono	235
Kecamatan	237

Metadata Indikator

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Konsep	Pelayanan Publik
Definisi/Deskripsi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Klasifikasi	4,51-5,00: pelayanan prima (A); 4,01-4,5: sangat baik (A-); 3,51-4,00: baik (B); 3,01-3,50: baik dengan catatan (B-); 2,51-3,00: cukup (C); 2,01-2,50: cukup dengan catatan (C-); 1,51-2,00: buruk (D); 1,01-1,50: sangat buruk (E); 0-1,00: gagal (F)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator: } \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{ bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek: } \sum \text{ nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks: } \sum (\text{nilai aspek} \times \text{ bobot aspek})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas pelayanan publik menurut masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi
ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
Konsep	Efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah
Definisi/Deskripsi	indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi tugas dan fungsinya
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi
ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Konsep	reformasi birokrasi
Definisi/Deskripsi	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Klasifikasi	AA=90-100 A=80-90 BB=70-80 B=60-70 C=30-50 CC=50-60 D=0-30"
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik. Nilai RB General diperoleh dari nilai capaian strategi pelaksanaan RB General ditambah nilai tingkat implementasi kebijakan ditambah nilai capaian strategis. RB Tematik diperoleh dari nilai strategi membangun RB Tematik ditambah nilai capaian dampak RB Tematik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin baik pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	SAKIP
Konsep	Akuntabilitas Kinerja
Definisi/Deskripsi	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Klasifikasi	AA (Sangat Memuaskan) untuk nilai 90-100, A (Memuaskan) untuk 80-90, BB (Sangat Baik) untuk 70-80, B (Baik) untuk 60-70, CC (Cukup/Memadai) untuk 50-60, C (Kurang) untuk 30-50, hingga D (Sangat Kurang) untuk 0-30
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	penilaian komposit berdasarkan bobot beberapa komponen utama seperti Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%)
Interpretasi	- Kategori AA dengan nilai 90-100 (sangat memuaskan): telah terwujud good governance. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. - Kategori A dengan nilai 80-90 (memuaskan): unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator. - Kategori BB dengan nilai 70-80 (sangat baik): terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. - Kategori B dengan nilai 60-70 (baik): masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. - Kategori CC dengan nilai 50-60 (memadai): masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. - Kategori C dengan nilai 30-50 (kurang): sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. - Kategori D dengan nilai 0-30 (sangat kurang): sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya implementasi SAKIP.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Konsep	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Definisi/Deskripsi	Indikator ini mencerminkan komitmen, kepatuhan, dan efektivitas pemerintah daerah serta BUMD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan serta tata kelola pemerintahan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan oleh Instansi Pemerintah Daerah dan BUMD / seluruh rekomendasi yang diberikan) X100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian, semakin baik tingkat kepatuhan dan komitmen Instansi Pemerintah Daerah dan BUMD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, yang menunjukkan meningkatnya akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah daerah Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama
Konsep	Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama antar Daerah
Definisi/Deskripsi	Jumlah daerah yang melakukan kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Klasifikasi	Jenis kerjasama/kesepakatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Daerah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak kerja sama yang disepakati dan dijalankan, semakin besar pula peluang Pemda untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B
Konsep	Akuntabilitas Kinerja
Definisi/Deskripsi	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi: a. Rencana b. Perjanjian c. Pengukuran d. Pelaporan e. Reviu dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Skor
Satuan	-
Rumus Perhitungan	penilaian komposit berdasarkan bobot beberapa komponen utama seperti Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%)
Interpretasi	semakin banyak perangkat daerah yang mencapai nilai SAKIP \geq B, semakin matang pula penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik
Konsep	Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Katalog Elektronik Lokal
Definisi/Deskripsi	banyaknya pelaku usaha yang termasuk kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah terdaftar sebagai penyedia pada sistem pengadaan secara elektronik dan memiliki produk yang sudah lolos verifikasi serta ditampilkan secara aktif dalam Katalog Elektronik lokal
Klasifikasi	Jenis penyedia
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak UMK yang produknya masuk dalam Katalog Elektronik, semakin besar kontribusi UMK terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik
Konsep	Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik Lokal
Definisi/Deskripsi	banyaknya produk yang berasal dari produksi dalam negeri dan telah memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai peraturan perundang-undangan, yang telah diverifikasi serta ditampilkan secara aktif dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah
Klasifikasi	Jenis PDN
Ukuran	Jumlah
Satuan	Produk
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak Produk Dalam Negeri yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik Lokal, semakin kuat dukungan pengadaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik
Konsep	Produk Tayang pada Katalog Elektronik Lokal
Definisi/Deskripsi	banyaknya jenis barang dan/atau jasa yang telah terdaftar, diverifikasi, dan ditampilkan secara aktif dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah
Klasifikasi	Jenis Produk
Ukuran	Jumlah
Satuan	Produk
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik Lokal, semakin efektif pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola yang efisien dan pembangunan ekonomi daerah
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola
Konsep	Sistem Informasi katalog elektronik dan e-purchasing
Definisi/Deskripsi	banyaknya sistem informasi pengadaan atau sistem pendukung lainnya yang dikelola oleh instansi tertentu (pusat maupun daerah) dan telah terhubung secara teknis serta fungsional dengan Sistem Informasi Katalog Elektronik dan/atau sistem e-Purchasing lainnya, sehingga memungkinkan pertukaran data, sinkronisasi proses, dan dukungan transaksi pengadaan barang/jasa secara elektronik
Klasifikasi	Instansi pengelola
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sistem
Interpretasi	semakin banyak sistem yang terintegrasi dengan Katalog Elektronik dan e-Purchasing lainnya, semakin optimal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Berdasarkan Tingkat Kematangan
Konsep	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Definisi/Deskripsi	banyaknya UKPBJ yang telah dinilai dan diklasifikasikan ke dalam level atau kategori tingkat kematangan tertentu sesuai dengan model dan indikator penilaian kematangan UKPBJ yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh sebuah UKPBJ telah mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Klasifikasi	Tingkat Kematangan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan UKPBJ, semakin besar perannya tidak hanya sebagai pelaksana pengadaan, tetapi sebagai penggerak tata kelola pengadaan yang strategis, profesional, dan bernilai tambah bagi organisasi.
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD
Konsep	Nilai rupiah paket Pengadaan Barang/Jasa
Definisi/Deskripsi	besaran nilai rupiah dari seluruh paket atau transaksi pengadaan barang/jasa yang direkam, dilaporkan, dan dimonitor melalui sistem informasi pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar nilai pengadaan barang/jasa yang tercatat dalam sistem monitoring LKPP, semakin kuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan pengadaan pemerintah.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD
Konsep	Nilai Anggaran Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Definisi/Deskripsi	besaran nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah dalam RUP untuk dialokasikan bagi penggunaan Produk Dalam Negeri, sesuai dengan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar nilai pencadangan PDN dalam RUP, semakin besar pula kontribusi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonom
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD
Konsep	Nilai Anggaran Pencadangan UMK dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Definisi/Deskripsi	besaran nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah dalam RUP untuk dialokasikan khusus bagi partisipasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sesuai dengan kebijakan afirmasi UMK dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar nilai pencadangan UMK dalam RUP, semakin besar pula kontribusi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan UMK
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD
Konsep	Nilai rupiah Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Definisi/Deskripsi	total nilai rupiah dari seluruh transaksi pengadaan barang dan/atau jasa yang telah dilaksanakan dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia, melalui mekanisme pengadaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar nilai transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kinerja pembangunan dan semakin penting kualitas tata kelola pengadaan yang baik
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Skor Hasil Penilaian Ombudsman RI terkait Pelayanan Publik
Konsep	hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Definisi/Deskripsi	nilai kuantitatif yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penilaian kepatuhan terhadap layanan baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel: a. Standar b. Maklumat c. Sistem Informasi Pelayanan d. Sarana, Prasarana, dan e. Pelayanan f. Pengelolaan g. Penilaian h. Visi, Misi dan Moto dan i. Atribut.
Klasifikasi	dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Zona merah (kepatuhan rendah); Zona kuning (kepatuhan sedang); Zona hijau (kepatuhan tinggi).
Ukuran	Skor
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Skor Hasil Penilaian Ombudsman RI dihitung dengan menjumlahkan nilai pemenuhan komponen dan indikator pelayanan publik yang dinilai, sesuai bobot yang telah ditetapkan Ombudsman RI.
Interpretasi	-Zona Hijau menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar pelayanan publik Zona Kuning menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik telah memenuhi sebagian standar pelayanan, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki Zona Merah menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik Semakin baik zona hasil evaluasi Ombudsman RI (dari Merah → Kuning → Hijau), semakin tinggi kualitas pelayanan publik dan semakin baik tata kelola pemerintahan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
Konsep	Fasilitasi Penataan Kelembagaan
Definisi/Deskripsi	banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan, penguatan, atau penyesuaian kelembagaan pemerintah kabupaten/kota
Klasifikasi	Jenis dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota, semakin kuat fondasi kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Konsep	Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Definisi/Deskripsi	banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum
Klasifikasi	Jenis dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum, semakin efektif penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung stabilitas, pelayanan publik, dan pembangunan daerah
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Konsep	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Definisi/Deskripsi	banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari proses pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, yang mencakup perencanaan, penyusunan, pengoordinasian, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan/atau evaluasi kebijakan pemerintahan
Klasifikasi	Jenis dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak dan optimal kegiatan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, semakin baik kualitas kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
Konsep	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
Definisi/Deskripsi	banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan pemerintahan, yang mencerminkan proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, serta evaluasi pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah
Klasifikasi	Jenis dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak dan optimal kegiatan pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan, semakin kuat fondasi otonomi daerah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik,
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum x_i) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, x_i =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke-i dengan $x_i = w_i \times z_i$, w_i = penimbang unsur ke-i=rata-rata skor kepentingan unsur ke-i/jumlah rata-rata skor kepentingan, z_i = rata-rata skor kepuasan unsur ke-i, y =skala maksimum penilaian (Perhitungan melalui aplikasi E-Sukma Jatim)
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penerima tunjangan kehormatan huffadz berdasarkan jenis kelamin
Konsep	penerima tunjangan kehormatan huffadz
Definisi/Deskripsi	banyaknya individu yang berstatus sebagai huffadz (penghafal Al-Qur'an) dan telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang sebagai penerima tunjangan kehormatan
Klasifikasi	Jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak penerima tunjangan kehormatan huffadz, semakin kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan nilai keagamaan dan pembinaan sumber daya manusia yang religius
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penerima tunjangan kehormatan imam masjid menurut kabupaten/kota
Konsep	penerima tunjangan kehormatan imam masjid
Definisi/Deskripsi	banyaknya individu yang menjalankan tugas sebagai imam masjid dan telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang sebagai penerima tunjangan kehormatan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak penerima tunjangan kehormatan imam masjid, semakin kuat dukungan pemerintah dalam penguatan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Konsep	Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi/Deskripsi	banyaknya laporan yang disusun dan dihasilkan oleh instansi pemerintah sebagai hasil kegiatan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan kebijakan, kinerja perangkat daerah, maupun capaian pembangunan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin baik evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, semakin kuat pula fondasi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Konsep	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Definisi/Deskripsi	banyaknya laporan yang disusun dan dihasilkan oleh perangkat daerah atau instansi berwenang sebagai hasil kegiatan pengendalian administratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin baik hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, semakin kuat pula tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai LPPD
Konsep	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi/Deskripsi	nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah
Klasifikasi	-
Ukuran	Skor
Satuan	-
Rumus Perhitungan	hasil penjumlahan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dibobotkan
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai LPPD, semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tercermin dari kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, serta akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti
Konsep	Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti} / \text{jumlah kebijakan yang ditetapkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, semakin efektif pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi
Konsep	Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan. Kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan, dan kesejahteraan masyarakat
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti} / \text{jumlah kebijakan yang ditetapkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti, semakin efektif pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu bagian pelayanan Sekretariat DPRD
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum xi) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke- i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke- i =rata-rata skor kepentingan unsur ke- i /jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke- i , y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Triwulan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan bagian umum
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan bagian umum
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum xi) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke- i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke- i =rata-rata skor kepentingan unsur ke- i /jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke- i , y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Triwulan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan bagian program dan keuangan
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan bagian program dan keuangan
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum xi) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke- i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke- i =rata-rata skor kepentingan unsur ke- i /jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke- i , y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Triwulan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan bagian persidangan dan perundang-undangan
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan bagian persidangan dan perundang-undangan
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum xi) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke- i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke- i =rata-rata skor kepentingan unsur ke- i /jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke- i , y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Triwulan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pelayanan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan
Klasifikasi	IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = \frac{(\sum xi) \times 100}{y}$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke- i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke- i =rata-rata skor kepentingan unsur ke- i /jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke- i , y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, semakin baik kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
Periode	Triwulan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah anggota parlemen laki-laki dan perempuan
Konsep	Anggota parlemen
Definisi/Deskripsi	banyaknya individu yang menduduki jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sesuai dengan hasil penetapan resmi lembaga penyelenggara pemilu atau ketentuan peraturan perundang-undangan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Komposisi jumlah anggota parlemen laki-laki dan perempuan merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keterwakilan gender dalam lembaga legislatif
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen
Konsep	keterlibatan perempuan di parlemen
Definisi/Deskripsi	proporsi anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan total anggota parlemen, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah anggota parlemen perempuan} / \text{total jumlah anggota parlemen}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase keterlibatan perempuan di parlemen, semakin baik keterwakilan gender dan semakin inklusif proses pengambilan keputusan legislatif
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Level kapabilitas APIP
Konsep	Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)
Definisi/Deskripsi	Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, dan efektivitas para auditor dan pengawas internal di lingkungan pemerintah. APIP bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien, efektif, dan transparan.
Klasifikasi	Kapabilitas APIP
Ukuran	Level
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Penilaian atas penerapan tata kelola APIP dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang mencakup penilaian terhadap 6 (enam) elemen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan APIP 2. Pengelolaan SDM 3. Praktik Profesional 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola
Interpretasi	Semakin tinggi level Kapabilitas APIP maka pengawasan intern yang efektif juga terwujud
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart
Konsep	SPIP sesuai standart
Definisi	SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang sesuai standart
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	(jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standar/jumlah seluruh perangkat daerah)x100%
Interpretasi	semakin tinggi perangkat daerah telah menerapkan SPIP sesuai standar, maka tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Maturitas SPIP
Konsep	Maturitas SPIP
Definisi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin tinggi nilai maturitas SPIP bahwa pengendalian intern telah berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, serta akuntabilitas pemerintah.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah
Konsep	Rata-Rata Lama Sekolah
Definisi/Deskripsi	Jumlah tahun rata-rata yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal
Klasifikasi	-
Ukuran	Rata-Rata
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	Rata-Rata Lama Sekolah = Jumlah total tahun sekolah penduduk usia 25+ / jumlah penduduk usia 25+
Interpretasi	semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Konsep	Harapan Lama Sekolah
Definisi/Deskripsi	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator pembangunan pendidikan yang menunjukkan perkiraan lamanya (dalam tahun) seorang anak diharapkan bisa bersekolah di masa depan, diukur sejak usia 7 tahun ke atas
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	$HLS_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_{i,t}}{P_{i,t}}$
Interpretasi	semakin tinggi angka harapan lama sekolah mencerminkan kualitas sistem pendidikan dan akses pendidikan yang semakin baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Partisipasi Sekolah PAUD
Konsep	Partisipasi Sekolah
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di PAUD dengan jumlah total anak usia 5-6 tahun di suatu daerah
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun yang sudah Tamat atau sedang Belajar di Satuan PAUD/Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan)x100%
Interpretasi	semakin tinggi APS PAUD, semakin baik akses anak usia 5-6 tahun terhadap pendidikan, yang berkontribusi pada perkembangan kognitif dan emosional dan sosial mereka di masa depan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Partisipasi Sekolah SD/Sederajat
Konsep	Partisipasi Sekolah
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/Sederajat dengan jumlah total anak usia 7-12 tahun di suatu daerah
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang sudah Tamat atau sedang Belajar di SD Sederajat /Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan)x100%
Interpretasi	semakin tinggi APS SD/ sederajat, menunjukkan akses pendidikan dasar yang lebih baik, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan meningkat, keberhasilan kebijakan pendidikan, dsb
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Partisipasi Sekolah SMP/Sederajat
Konsep	Partisipasi Sekolah
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/Sederajat dengan jumlah total anak usia 13-15 tahun di suatu daerah
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun yang sudah Tamat atau sedang Belajar di SMP Sederajat} / \text{Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin tinggi APS SMP/ sederajat, menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, akses pendidikan yang lebih merata, penurunan angka putus sekolah, dsb
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Literasi SD
Konsep	Literasi
Definisi/Deskripsi	Kemampuan Siswa SD mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, serta menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Nilai
Satuan	poin
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Indeks Literasi} = (\text{Persentase Murid Tingkat Dasar} \times \text{Bobot Dasar}) + (\text{Persentase Murid Tingkat Cakap} \times \text{Bobot Cakap}) + (\text{Persentase Murid Tingkat Mahir} \times \text{Bobot Mahir})$
Interpretasi	- Nilai lebih tinggi menunjukkan kemampuan literasi yang lebih baik. - Nilai rendah menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan literasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Literasi SMP
Konsep	Literasi
Definisi/Deskripsi	Kemampuan Siswa SMP mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, serta menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Nilai
Satuan	poin
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Indeks Literasi} = (\text{Persentase Murid Tingkat Dasar} \times \text{Bobot Dasar}) + (\text{Persentase Murid Tingkat Cakap} \times \text{Bobot Cakap}) + (\text{Persentase Murid Tingkat Mahir} \times \text{Bobot Mahir})$
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan kemampuan literasi yang baik - Nilai rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam literasi yang perlu diperbaiki
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Numerasi SD
Konsep	Nilai Numerasi
Definisi/Deskripsi	Nilai numerasi adalah kemampuan menerapkan konsep bilangan, prosedur, dan alat matematika untuk memahami, menganalisis, serta menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menginterpretasi data dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan, bukan sekadar kemampuan berhitung dasar
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Nilai
Satuan	poin
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Numerasi (Konsep)} = (\text{Jumlah Jawaban Benar} / \text{Jumlah Soal}) \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai lebih tinggi menunjukkan kemampuan numerasi yang lebih baik. - Nilai rendah menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan keterampilan numerasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Numerasi SMP
Konsep	Nilai Numerasi
Definisi/Deskripsi	Nilai numerasi adalah kemampuan menerapkan konsep bilangan, prosedur, dan alat matematika untuk memahami, menganalisis, serta menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menginterpretasi data dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan, bukan sekadar kemampuan berhitung dasar
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Nilai
Satuan	poin
Rumus Perhitungan	Nilai Numerasi (Konsep) = (Jumlah Jawaban Benar / Jumlah Soal) x 100%
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan kemampuan numerasi yang baik. - Nilai rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam kemampuan numerasi dan perlu peningkatan lebih lanjut.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Kelulusan SD/Sederajat
Konsep	Angka Kelulusan
Definisi/Deskripsi	Angka kelulusan adalah persentase siswa yang berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan (seperti SD, SMP, SMA, atau kuliah) dengan memenuhi standar kompetensi dan persyaratan akademik, dihitung dari jumlah lulusan dibagi jumlah total siswa pada jenjang tersebut, menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dan capaian siswa.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah peserta didik yang lulus jenjang SD sederajat / jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD sederajat) X 100%
Interpretasi	Semakin tinggi angka lulus sekolah pada jenjang SD, maka semakin banyak anak memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Kelulusan SMP/Sederajat
Konsep	Angka Kelulusan
Definisi/Deskripsi	Angka kelulusan adalah persentase siswa yang berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan (seperti SD, SMP, SMA, atau kuliah) dengan memenuhi standar kompetensi dan persyaratan akademik, dihitung dari jumlah lulusan dibagi jumlah total siswa pada jenjang tersebut, menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dan capaian siswa.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah peserta didik yang lulus jenjang SMP sederajat / jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP sederajat) X 100%
Interpretasi	Semakin tinggi angka lulus sekolah pada jenjang SMP, menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Peluang Melanjutkan ke SMA/SMK, dsb
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Putus Sekolah SD/Sederajat
Konsep	Putus Sekolah
Definisi/Deskripsi	Predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan SD.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah peserta didik yang putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat / jumlah peserta didik SD/ sederajat) X 100%
Interpretasi	Semakin rendah angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat, maka semakin banyak anak yang mendapatkan pelayanan pendidikan SD/ sederajat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat
Konsep	Putus Sekolah
Definisi/Deskripsi	Predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan SMP.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah peserta didik yang putus sekolah pada jenjang SMP/ sederajat / jumlah peserta didik SMP/ sederajat) X 100%
Interpretasi	Semakin rendah angka putus sekolah pada jenjang SMP/ sederajat, maka semakin banyak anak yang mendapatkan pelayanan pendidikan SMP/ sederajat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pendidikan
Konsep	Indeks Pendidikan
Definisi/Deskripsi	Indeks Pendidikan adalah komponen kunci dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu wilayah menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), mencerminkan berapa lama penduduk diharapkan dan rata-rata telah bersekolah, serta menjadi penentu penting kualitas hidup dan pembangunan daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Poin
Rumus Perhitungan	rumus normalisasi = (NilaiIndikator - NilaiMinimum) / (NilaiMaksimum - NilaiMinimum)
Interpretasi	membantu memahami kondisi pendidikan secara komprehensif, bukan hanya nilai rata-rata, tetapi juga mengidentifikasi masalah spesifik (guru, sarana, partisipasi) untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa Kejar Paket
Konsep	Kejar Paket
Definisi/Deskripsi	peserta didik pada program pendidikan nonformal (kesetaraan) yang setara dengan jenjang formal (SD, SMP, SMA/SMK), seperti Paket A, Paket B, atau Paket C, yang bertujuan memberikan ijazah bagi mereka yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah formal
Klasifikasi	Kecamatan, jenjang pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa Kejar Paket
Interpretasi	semakin tingginya kebutuhan akses pendidikan setara formal semakin tinggi pemanfaatan akses pendidikan untuk mendapatkan ijazah guna melanjutkan studi atau mencari kerja
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa Berprestasi
Konsep	Siswa Berprestasi
Definisi/Deskripsi	pelajar yang berhasil meraih pencapaian luar biasa baik di bidang akademik (nilai tinggi, pemahaman mendalam) maupun non-akademik (olahraga, seni, organisasi)
Klasifikasi	Kecamatan, jenjang pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa Berprestasi
Interpretasi	semakin banyak siswa berprestasi maka kualitas pendidikan suatu daerah akan meningkat, peluang siswa mendapatkan beasiswa, serta potensi generasi muda Indonesia menjadi lebih kuat, kreatif, dan mampu bersaing
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Konsep	Sekolah
Definisi/Deskripsi	adalah penghitungan kuantitas satuan pendidikan (seperti SD, SMP, SMA, SMK, atau Perguruan Tinggi) yang dikategorikan sesuai jenjang atau level pendidikan formal tertentu di suatu wilayah, untuk menganalisis sebaran, akses, dan kebutuhan fasilitas pendidikan pada setiap jenjang
Klasifikasi	Tingkat pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sekolah
Rumus Perhitungan	Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Interpretasi	semakin banyak sekolah berdasarkan tingkat pendidikan maka semakin merata pendidikan di suatu wilayah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kepala Sekolah
Konsep	Kepala Sekolah
Definisi/Deskripsi	Jumlah Kepala Sekolah adalah istilah statistik atau data yang merujuk pada total kuantitas individu yang menjabat sebagai pemimpin atau manajer di sebuah lembaga pendidikan (sekolah)
Klasifikasi	tingkat pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kepala Sekolah
Rumus Perhitungan	Jumlah Kepala Sekolah
Interpretasi	peningkatan jumlah kepala sekolah didorong oleh kebutuhan untuk memastikan kepemimpinan yang efektif di setiap satuan pendidikan, sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru ASN dan Non ASN
Konsep	Guru ASN dan Non ASN
Definisi/Deskripsi	Guru ASN meliputi Guru PNS dan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP), sedangkan status diluar tersebut disebut dengan Guru Non ASN
Klasifikasi	tingkat pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru ASN dan Non ASN
Interpretasi	meskipun masih ada kekurangan guru di sekolah negeri dan distribusi guru ASN tidak merata, menjadikan guru Non-ASN tetap vital
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru ASN dan Non ASN yang Bersertifikasi
Konsep	Guru ASN dan Non ASN yang Bersertifikasi
Definisi/Deskripsi	Guru bersertifikasi adalah pendidik profesional yang telah lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat pendidik resmi dari pemerintah, sebagai bukti bahwa mereka memenuhi standar profesionalisme, sehingga diakui sebagai tenaga pendidik profesional yang berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk meningkatkan mutu pengajaran dan kesejahteraan
Klasifikasi	tingkat pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru ASN dan Non ASN yang Bersertifikasi
Interpretasi	semakin banyak guru yang memiliki sertifikasi maka sehingga kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru meningkat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru ASN menurut Golongan
Konsep	Guru ASN
Definisi/Deskripsi	Guru ASN menurut Golongan
Klasifikasi	golongan ASN
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru ASN menurut Golongan
Interpretasi	jenjang karier dan tingkat pendidikan yang menjadi syarat masuk sebagai guru ASN
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Beasiswa Menurut Jenjang Pendidikan
Konsep	Beasiswa
Definisi/Deskripsi	Beasiswa menurut pendidikan adalah bantuan biaya untuk menunjang jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA/SMK, Diploma, Sarjana, Magister, Doktorat) yang diberikan berdasarkan prestasi, kebutuhan finansial, atau kondisi khusus, dengan tujuan memastikan akses pendidikan, meningkatkan kualitas, dan memberikan motivasi bagi pelajar atau mahasiswa untuk menyelesaikan studinya
Klasifikasi	jenjang pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Beasiswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Beasiswa Menurut Jenjang Pendidikan
Interpretasi	Beasiswa bukan hanya uang, tapi juga peluang, pengembangan, dan pengakuan untuk membentuk individu berkualitas demi kemajuan pendidikan dan bangsa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Konsep	Guru
Definisi/Deskripsi	Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada usia dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan Kesetaraan sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun semua memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi, serta berjuang untuk kesetaraan hak dan kesejahteraan, terutama bagi guru PAUD nonformal yang terus diupayakan pengakuannya dalam revisi UU Sisdiknas.
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Interpretasi	semakin banyak sekolah di suatu wilayah maka semakin merata pendidikan di suatu wilayah
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Konsep	Guru
Definisi/Deskripsi	Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada usia dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan Kesetaraan sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun semua memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi, serta berjuang untuk kesetaraan hak dan kesejahteraan, terutama bagi guru PAUD nonformal yang terus diupayakan pengakuannya dalam revisi UU Sisdiknas.
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, pendidikan terakhir
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Interpretasi	Semakin tinggi pendidikan terakhir guru (misalnya S1, S2, S3), semakin baik karena meningkatkan kompetensi, pemahaman teori, dan keterampilan mengajar, yang berdampak pada kualitas siswa dan pengembangan karir guru menuju jabatan fungsional lebih tinggi seperti Guru Utama
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Konsep	Guru
Definisi/Deskripsi	Guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan adalah pendidik profesional di jenjang berbeda, dengan PAUD fokus pada usia dini, SD/SMP pada pendidikan dasar (formal), dan Pendidikan Kesetaraan sebagai alternatif nonformal bagi yang putus sekolah, namun semua memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi, serta berjuang untuk kesetaraan hak dan kesejahteraan, terutama bagi guru PAUD nonformal yang terus diupayakan pengakuannya dalam revisi UU Sisdiknas.
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Interpretasi	Perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penempatan guru atau pertimbangan program-program pendidikan
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Interpretasi	Perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan mutasi penempatan guru atau pertimbangan program-program pendidikan
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Interpretasi	menunjukkan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap jenjang, membantu melihat pemerataan akses pendidikan, potensi disparitas gender (seperti di PAUD sering seimbang/lebih perempuan, SD/SMP cenderung seimbang, sementara Pendidikan Kesetaraan bisa lebih beragam tergantung kebutuhan
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, status sekolah (negeri/swasta)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Interpretasi	Memahami potret pendidikan secara komprehensif untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal maupun nasional, memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pendidikan dasar.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, status kesiswaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan
Interpretasi	lonjakan siswa pindah dari SD ke Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B), ini bisa jadi indikasi adanya masalah di jenjang formal yang menyebabkan siswa mencari alternatif nonformal.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, agama
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
Interpretasi	distribusi demografi siswa per agama, melihat keseimbangan representasi tiap agama, mengidentifikasi potensi kesenjangan atau dominasi, serta memahami kebutuhan spesifik untuk layanan pendidikan agama dan toleransi di setiap jenjang pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
Konsep	Lembaga
Definisi/Deskripsi	Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, agama
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lembaga
Rumus Perhitungan	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan
Interpretasi	persebaran, pemerataan, dan potensi kesenjangan layanan pendidikan di wilayah kecamatan tersebut, melihat dari jumlah lembaga untuk perencanaan strategis seperti pemerataan akses, pemenuhan kebutuhan, dan identifikasi wilayah dengan kekurangan fasilitas pendidikan dasar, yang biasanya tersedia dalam portal data pendidikan daerah
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (N/S)
Konsep	Lembaga sekolah
Definisi/Deskripsi	Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, status (negeri / swasta)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lembaga
Rumus Perhitungan	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Interpretasi	status negeri/swasta pada lembaga PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan menunjukkan distribusi dan aksesibilitas layanan pendidikan, di mana sekolah negeri biasanya lebih terjangkau dan tersebar luas (dikelola pemerintah), sementara sekolah swasta menawarkan variasi (religius, internasional) dan melengkapi kebutuhan yang tidak terpenuhi sekolah negeri, mencerminkan kebijakan pemerataan dan pilihan masyarakat dalam penyediaan pendidikan dasar dan kesetaraan.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Keluarga (Mampu/Tidak Mampu)
Konsep	Siswa
Definisi/Deskripsi	Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Keluarga (Mampu/Tidak Mampu)
Klasifikasi	kecamatan, jenjang sekolah, status keluarga
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Rumus Perhitungan	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Keluarga (Mampu/Tidak Mampu)
Interpretasi	status keluarga (mampu/tidak mampu) pada siswa PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi sangat memengaruhi akses, partisipasi, kualitas, dan pencapaian pendidikan, di mana siswa dari keluarga kurang mampu seringkali menghadapi kendala lebih besar (seperti fasilitas, gizi, dan dukungan belajar) sehingga berdampak pada motivasi dan prestasi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase dan Jumlah guru pada tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4
Konsep	Guru
Definisi/Deskripsi	guru pada tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4
Klasifikasi	tingkat pendidikan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah guru tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4/jumlah seluruh guru RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat)x100%
Interpretasi	semakin tinggi kualifikasi pendidik menunjukkan peningkatan kualitas SDM pendidikan, dengan angka mendekati 100% secara keseluruhan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dan SMK/ sederajat berdasarkan status kepegawaian
Konsep	Guru
Definisi/Deskripsi	guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dan SMK/ sederajat sesuai dengan status kepegawaiannya
Klasifikasi	status kepegawaian, jenjang pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Rumus Perhitungan	Jumlah guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dan SMK/ sederajat berdasarkan status kepegawaian
Interpretasi	Banyaknya tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dan SMK/ sederajat sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan Status kepegawaian
Konsep	Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)
Definisi/Deskripsi	guru yang bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut status kepegawaiannya (Pegawai Negeri Sipil atau Non- Pegawai Negeri Sipil)
Klasifikasi	status kepegawaian
Ukuran	Jumlah
Satuan	guru
Rumus Perhitungan	Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan Status kepegawaian
Interpretasi	Banyaknya tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi
Konsep	pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi
Definisi/Deskripsi	Jumlah individu yang telah menyelesaikan program pelatihan di lembaga kursus dan telah memperoleh sertifikat kompetensi
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi
Interpretasi	Peningkatan jumlah menunjukkan program vokasi efektif menghasilkan lulusan siap pakai (ready to work), sesuai standar kompetensi (SKKNI)
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan
Konsep	Standar Nasional Pendidikan
Definisi/Deskripsi	Akreditasi ini mencerminkan pemenuhan standar mutu pendidikan dalam aspek isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas dan kelayakan layanan pendidikan di berbagai jenjang sekolah.
Klasifikasi	jenjang pendidikan, kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sekolah
Rumus Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan
Interpretasi	Semakin banyak satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengindikasikan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara nasional
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
Konsep	guru dan tenaga kependidikan
Definisi/Deskripsi	Perbandingan antara pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma 4 atau Strata 1 dengan seluruh pendidik jenjang pada suatu periode dan wilayah tertentu
Klasifikasi	jenjang pendidikan, kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase (\%)} = (\text{Jumlah GTK Berkualifikasi S1/D4} / \text{Total GTK}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin tinggi kualifikasi pendidik menunjukkan peningkatan kualitas SDM pendidikan, dengan angka mendekati 100% secara keseluruhan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pemenuhan SPM pendidikan
Konsep	SPM Pendidikan (Standar Pelayanan Minimal Pendidikan)
Definisi/Deskripsi	standar mutu dan jenis pelayanan dasar pendidikan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap peserta didik mendapatkan pendidikan berkualitas, mencakup jenjang PAUD hingga SMA/SMK/Kesetaraan
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{SPM pendidikan} = \text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot Mutu (20\%)} + \text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{Bobot penerima layanan (80\%)}$
Interpretasi	semakin tinggi pemenuhan SPM Pendidikan maka kualitas pelayanan pendidikan semakin baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
Konsep	bantuan pembiayaan pendidikan
Definisi/Deskripsi	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran adalah metrik penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana bantuan, dengan tujuan memastikan bantuan mencapai siswa/mahasiswa yang benar-benar membutuhkan
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Penerima Tepat Sasaran} / \text{Total Target Penerima Potensial} \times 100\%$
Interpretasi	semakin tinggi persentase penerima bantuan pendidikan yang tepat sasaran maka kinerja pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan semakin berkualitas
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan
Konsep	perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi
Definisi/Deskripsi	sekolah di Indonesia sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK), mengindikasikan langkah signifikan, meskipun prevalensi kasus (data PISA 2018 menunjukkan 42% pelajar alami kekerasan) menunjukkan implementasi materi perlu lebih efektif
Klasifikasi	jenjang pendidikan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan materi} / \text{jumlah seluruh satuan pendidikan sasaran}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin tinggi pengimplementasian materi pada satuan pendidikan maka semakin berkurang perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rata-rata lama tinggal wisatawan
Konsep	Lama tinggal wisatawan
Definisi	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Length of Stay/LoS) adalah indikator penting dalam pariwisata yang mengukur hari rata-rata yang dihabiskan turis di suatu destinasi, dan bervariasi tergantung negara asal
Klasifikasi	-
Ukuran	Rata-Rata
Satuan	hari
Rumus Perhitungan	Rata-rata Lama Menginap (RLM) = (Total Malam Menginap) / (Total Tamu).
Interpretasi	semakin lama tinggal, semakin besar kemungkinan pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, kuliner, dan oleh-oleh, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menunjukkan daya tarik lokasi tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase prestasi pemuda tingkat nasional dan internasional
Konsep	Prestasi pemuda
Definisi	Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan
Klasifikasi	cabang prestasi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Total Skor = (Skor Poin Prestasi Lomba x Bobot %) + (Skor Rapor/Tes x Bobot %) + Faktor Lain
Interpretasi	semakin banyak prestasi yang diperoleh maka bukti nyata kualitas, potensi, dan daya saing generasi muda Indonesia yang mampu bersaing global di berbagai bidang
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata
Konsep	PAD sektor pariwisata
Definisi	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$((\text{PAD Pariwisata Tahun Ini} - \text{PAD Pariwisata Tahun Lalu}) / \text{PAD Pariwisata Tahun Lalu}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin maju dan sejahtera secara ekonomi, tetapi memerlukan strategi pengelolaan PAD sektor pariwisata yang efektif agar kontribusi maksimal dapat dirasakan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
Konsep	pelaku ekonomi kreatif
Definisi	Peningkatan pelaku ekonomi kreatif adalah upaya sistematis untuk memperbanyak, memperkuat, dan meningkatkan kompetensi individu atau kelompok yang terlibat dalam menciptakan nilai tambah dari ide, kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa, melalui pembinaan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta dukungan infrastruktur dan regulasi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$((\text{Nilai Tahun Ini} - \text{Nilai Tahun Lalu}) / \text{Nilai Tahun Lalu}) \times 100\%$
Interpretasi	adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor berbasis kreativitas dengan meningkatnya kontribusi terhadap PDB nasional, penciptaan lapangan kerja yang masif, pemberdayaan masyarakat lokal, kebangkitan UMKM melalui digitalisasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase cabang olahraga yang berprestasi
Konsep	Prestasi Olahraga
Definisi	Indikator untuk mengetahui banyaknya Cabang Olahraga yang berprestasi
Klasifikasi	Cabang Olahraga Berprestasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Cabang Olahraga
Rumus Perhitungan	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi
Interpretasi	Semakin Banyak Cabang Olahraga yang berprestasi, semakin baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Konsep	Pelestarian seni budaya dan tradisi lokal
Definisi	Indikator untuk mengetahui banyaknya seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Klasifikasi	Warisan Seni Budaya
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan} / \text{jumlah seni budaya dan tradisi lokal yang ada}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pemuda berprestasi dalam event kepemudaan
Konsep	pemuda berprestasi
Definisi	Pemuda berprestasi adalah individu usia muda (umumnya 16-30 tahun) yang tidak hanya unggul secara akademik/kurikuler, tetapi juga mampu mengembangkan diri di kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, berinovasi, kreatif, berintegritas, memiliki kepribadian baik, serta mengimplementasikan pencapaiannya untuk membawa perubahan positif dan manfaat bagi masyarakat luas, menjadikannya teladan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Pemuda Berprestasi} / \text{Total Jumlah Pemuda}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak pemuda berprestasi menginterpretasikan kebangkitan nasionalisme modern, potensi besar sebagai agen perubahan, optimisme masa depan bangsa, serta dinamika positif dalam pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi, menunjukkan bahwa generasi muda kini aktif berkontribusi nyata untuk Indonesia melalui prestasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Konsep	Peningkatan kunjungan wisatawan
Definisi	Indikator untuk mengetahui banyaknya peningkatan kunjungan wisatawan
Klasifikasi	kunjungan wisatawan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1 / \text{jumlah wisatawan tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak pendapatan retribusi daerah yang diterima dari peningkatan kunjungan wisatawan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Konsep	Pelestarian cagar budaya
Definisi	Indikator untuk mengetahui banyaknya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Klasifikasi	Cagar Budaya
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada) X 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pemuda berprestasi
Konsep	pemuda berprestasi
Definisi	Pemuda berprestasi adalah individu usia muda (umumnya 16-30 tahun) yang aktif mengaktualisasikan potensi diri, menghasilkan karya inovatif, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menunjukkan keunggulan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, olahraga, atau kewirausahaan, didukung sikap kreatif, inovatif, beradab, dan berorientasi pada perbaikan masa depan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	pemuda
Rumus Perhitungan	Jumlah pemuda berprestasi
Interpretasi	Semakin banyak pemuda berprestasi menginterpretasikan kebangkitan nasionalisme modern, potensi besar sebagai agen perubahan, optimisme masa depan bangsa, serta dinamika positif dalam pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi, menunjukkan bahwa generasi muda kini aktif berkontribusi nyata untuk Indonesia melalui prestasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Atlit Berprestasi menurut Jenis Kelamin
Konsep	Atlit Berprestasi
Definisi	Atlet berprestasi adalah individu yang secara konsisten mencapai tingkat keberhasilan tinggi dalam olahraga melalui kombinasi bakat, latihan keras, dan faktor psikologis seperti ambisi dan kegigihan, sering kali diukur dari pencapaian di tingkat nasional hingga internasional dan menjadi bagian dari tim nasional
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Atlit
Rumus Perhitungan	Jumlah Atlit Berprestasi menurut Jenis Kelamin
Interpretasi	perbedaan gender muncul karena isu kesetaraan seperti pay gap, standar ganda media (laki-laki dianggap lebih kuat), budaya patriarki, dan tantangan spesifik atlet perempuan terkait kebebasan berpakaian dan representasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi
Konsep	destinasi pariwisata
Definisi	Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
Klasifikasi	nama destinasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	destinasi pariwisata
Rumus Perhitungan	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi
Interpretasi	pengembangan komprehensif destinasi untuk meningkatkan kepuasan dan minat wisatawan, menjadikannya lebih mudah diakses semua orang, lebih nyaman dengan fasilitas memadai, dan lebih menarik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif
Konsep	peningkatan kapasitas
Definisi	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pelaku ekonomi kreatif adalah dukungan pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan program pelatihan (peningkatan kapasitas) dan proses uji coba (sertifikasi) agar SDM kreatif punya keahlian terstandar, daya saing tinggi, dan bukti legal (sertifikat) atas kompetensi mereka, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	kegiatan
Rumus Perhitungan	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif
Interpretasi	meningkatkan kualitas SDM kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan uji kompetensi resmi agar mereka punya keahlian terukur (sertifikasi), meningkatkan daya saing, membuka peluang kerja/usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan bukti kompetensi yang sah sesuai standar
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
Konsep	pelaku usaha
Definisi	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif adalah aktor vital yang menciptakan pengalaman wisata berdaya tarik tinggi melalui ide, kreativitas, dan inovasi berbasis budaya, seni, dan teknologi, saling melengkapi untuk membangun ekonomi lokal, memperkuat identitas daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, mulai dari perajin lokal, seniman, hingga pengembang digital.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	pelaku usaha
Rumus Perhitungan	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
Interpretasi	Pelaku pariwisata menyediakan 'wadah' (destinasi), sementara pelaku ekonomi kreatif 'mengisi' wadah tersebut dengan 'isi' yang menarik (kreativitas, produk, pengalaman), menciptakan ekosistem parekraf yang kuat dan kompetitif.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata
Konsep	standar layanan dan pengelolaan
Definisi	Standar layanan dan pengelolaan pariwisata adalah pedoman dan kriteria terukur untuk memastikan kualitas, konsistensi, keamanan, dan kepuasan wisatawan, mencakup aspek pelayanan langsung (hotel, atraksi) hingga pengelolaan destinasi (kebersihan, keberlanjutan), bertujuan meningkatkan daya saing, kepercayaan, dan pengalaman positif bagi semua pihak.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	layanan
Rumus Perhitungan	Jumlah standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata
Interpretasi	menciptakan ekosistem pariwisata yang terstruktur dan berkualitas tinggi, dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk menjamin pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan dan pertumbuhan berkelanjutan bagi industri pariwisata.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis Cabang olahraga Olimpik
Konsep	fasilitasi sarana olahraga prestasi
Definisi	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis Cabang Olahraga Olimpiade adalah kuantitas infrastruktur (tempat latihan) dan peralatan yang disediakan atau dibiayai oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung atlet cabang olahraga Olimpiade agar bisa meningkatkan prestasi, mencakup pembangunan, renovasi, atau penyediaan perlengkapan spesifik untuk kompetisi tingkat Olimpiade.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Fasilitas
Rumus Perhitungan	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis Cabang olahraga Olimpik
Interpretasi	memastikan atlet memiliki tempat berlatih yang memadai dan sesuai standar untuk meraih hasil maksimal di tingkat Olimpiade
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik Yang memenuhi standar minimal keolahragaan
Konsep	organisasi keolahragaan berbasis Olimpik
Definisi	Organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan adalah badan pengurus cabang (cabang olahraga) Olimpiade/Paralimpiade yang punya legalitas, pengurus aktif, program pembinaan atlet jelas, serta sarana-prasarana memadai, sesuai standar nasional (SMKN) yang ditetapkan pemerintah (Kemendpora), tujuannya agar pembinaan olahraga prestasi efektif dan berkualitas menuju pentas dunia.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Organisasi
Rumus Perhitungan	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik Yang memenuhi standar minimal keolahragaan
Interpretasi	semakin banyak organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan berarti terjadi peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam manajemen organisasi olahraga Olimpiade
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan
Konsep	kader Kewirausahaan
Definisi	mendorong kemandirian ekonomi pemuda, menumbuhkan semangat berwirausaha, serta menciptakan generasi muda yang inovatif, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	pemuda
Rumus Perhitungan	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan
Interpretasi	Peningkatan jumlah kader kewirausahaan adalah sinyal positif bahwa Indonesia berinvestasi pada sumber daya manusianya, mengubah potensi demografi menjadi kekuatan ekonomi melalui kewirausahaan, yang sangat vital untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian visi bangsa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya
Konsep	Tim Ahli Cagar Budaya
Definisi	Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu (seperti arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur) bersertifikat kompetensi yang bertugas mengkaji, memberikan rekomendasi, dan menilai objek yang diduga cagar budaya (ODCB) untuk ditetapkan, diperingkat, atau dihapus, serta membantu pelestarian Cagar Budaya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Tim
Rumus Perhitungan	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya
Interpretasi	Penambahan TACB berarti lebih banyak ahli (sejarawan, arsitek, arkeolog, dll.) tersedia untuk mengkaji dan menilai CB secara komprehensif, meningkatkan kualitas rekomendasi kepada pemerintah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Akomodasi/Penginapan Bintang Yang Bersertifikasi Berdasarkan Klasifikasi/Jenis
Konsep	Akomodasi/Penginapan Yang Bersertifikasi
Definisi	Akomodasi bersertifikasi adalah penyedia penginapan (seperti hotel, wisma, atau vila) yang telah melewati proses penilaian dan memenuhi standar kualitas, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga berwenang (Pemerintah/Kemendparekraf atau standar internasional seperti ISO) untuk menjamin mutu dan keamanan bagi wisatawan, dengan bukti sertifikat resmi.
Klasifikasi	Jenis akomodasi/penginapan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Akomodasi/Penginapan
Rumus Perhitungan	Jumlah Akomodasi/Penginapan Bintang Yang Bersertifikasi Berdasarkan Klasifikasi/Jenis
Interpretasi	peningkatan standar kualitas, keamanan, dan profesionalisme di industri perhotelan, yang berarti wisatawan mendapatkan jaminan lebih baik (kenyamanan, kebersihan, pelayanan) dan mendorong daya tarik destinasi wisata, sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dengan adanya regulasi dan sertifikasi yang lebih ketat untuk memenuhi standar nasional bahkan internasional
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Budaya Yang Dipelihara dan Dilestarikan
Konsep	Budaya
Definisi	Budaya yang dipelihara dan dilestarikan adalah upaya sadar untuk mempertahankan, menjaga, dan meneruskan warisan budaya (tradisi lisan, adat istiadat, kesenian, pengetahuan, teknologi lokal, dll.) dari generasi ke generasi agar tidak hilang, punah, atau tergerus oleh modernisasi dan globalisasi, demi menjaga identitas, memperkaya jati diri bangsa, serta memperkuat nilai-nilai luhur masyarakat setempat.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Budaya
Rumus Perhitungan	Jumlah Budaya Yang Dipelihara dan Dilestarikan
Interpretasi	upaya memahami, menjaga, dan mengembangkan warisan tak benda maupun benda (seperti tradisi, seni, bahasa, adat) agar tetap hidup, relevan, dan diturunkan ke generasi berikutnya, memperkuat identitas bangsa, nilai moral, serta kekayaan sosial
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Cagar Budaya yang Dipelihara/Dilestarikan
Konsep	Cagar Budaya
Definisi	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya yang Dipelihara/Dilestarikan
Interpretasi	mengintegrasikan aspek fisik (konservasi), pengelolaan (manajemen), dan pemahaman (edukasi) agar makna dan nilainya dapat terus dirasakan dan diwariskan, bukan hanya sekadar 'dibiarkan'
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Daya Tarik Wisata Berdasarkan Jenisnya
Konsep	Daya Tarik Wisata
Definisi	Daya Tarik Wisata (DTW) berdasarkan jenisnya adalah segala sesuatu yang unik, indah, dan bernilai yang meliputi alam, budaya, atau hasil buatan manusia, menjadi alasan kunjungan wisatawan; yang kemudian dikategorikan menjadi Daya Tarik Wisata Alam (gunung, pantai, flora/fauna), Budaya (tari, museum, upacara adat), dan Buatan (taman rekreasi, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga).
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	obyek
Rumus Perhitungan	Jumlah Daya Tarik Wisata Berdasarkan Jenisnya
Interpretasi	semakin tinggi jumlah daya tarik wisata berdasarkan jenisnya" berarti semakin banyak variasi objek atau atraksi wisata (alam, budaya, buatan manusia) yang tersedia di suatu wilayah, semakin besar potensinya menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan daerah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa Wisata
Konsep	Desa Wisata
Definisi	Desa wisata adalah kawasan perdesaan yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan buatan manusia menjadi destinasi wisata berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam pengelolaan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, dengan dukungan atraksi, akomodasi, dan fasilitas yang bersumber dari kearifan lokal dan tradisi setempat.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Desa
Rumus Perhitungan	Jumlah Desa Wisata
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah desa wisata menginterpretasikan pertumbuhan potensi pariwisata perdesaan, upaya diversifikasi ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga menuntut manajemen yang lebih baik agar tidak hanya menjadi tren sesaat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kegiatan promosi potensi daerah Jawa Timur
Konsep	kegiatan promosi
Definisi	Kegiatan promosi potensi daerah Jawa Timur adalah serangkaian upaya strategis untuk mengenalkan, mengomunikasikan, dan memasarkan keunggulan unik (pariwisata, budaya, ekonomi, sumber daya) Jawa Timur ke berbagai target audiens, menggunakan berbagai saluran (media, acara, digital) agar menarik minat investor, wisatawan, dan masyarakat, serta meningkatkan citra positif daerah tersebut sebagai tujuan investasi, kunjungan, dan tempat tinggal
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan promosi potensi daerah Jawa Timur
Interpretasi	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan: Baik domestik maupun mancanegara. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Melalui peningkatan belanja wisatawan dan UMKM. Menciptakan Lapangan Kerja: Di sektor pariwisata dan jasa terkait. Memperkuat Identitas Daerah: Membangun brand Jawa Timur yang kuat dan dikenal secara nasional/internasional. Meningkatkan PAD: Sumber Pendapatan Asli Daerah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi
Konsep	Kunjungan Wisatawan
Definisi	Definisi Kunjungan Wisatawan di Akomodasi adalah aktivitas menginap sementara atau menggunakan fasilitas penginapan (hotel, vila, dll.) oleh seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan ke tempat lain (bukan tempat tinggalnya) untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lain, di mana akomodasi berperan menyediakan tempat istirahat, makan, minum, dan fasilitas pendukung lainnya sebagai bagian integral dari pengalaman wisata mereka.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Wisatawan
Rumus Perhitungan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Akomodasi
Interpretasi	kualitas akomodasi sangat mempengaruhi keputusan berkunjung ulang dan promosi destinasi, menunjukkan bahwa akomodasi lebih dari sekadar tempat tidur, tetapi bagian integral dari pengalaman wisata secara keseluruhan
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata
Konsep	Wisatawan
Definisi	Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata adalah pola perpindahan spasial atau rute perjalanan yang dilakukan wisatawan dari lokasi asal ke destinasi, lalu antar destinasi lainnya (seperti dari satu objek wisata ke objek wisata lain), dengan durasi waktu dan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan wisata mereka, membentuk pola kunjungan yang bervariasi (single point, chaining loop, stopover, dll.)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Wisatawan
Rumus Perhitungan	Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata
Interpretasi	Semakin tinggi pergerakan wisatawan di suatu daya tarik wisata mengindikasikan daya tarik yang kuat, minat berkunjung tinggi, dan dampak positif pada destinasi, seringkali dipengaruhi oleh keunikan, aksesibilitas, kualitas layanan, citra (image), serta faktor pendukung seperti fasilitas dan promosi, menunjukkan keberhasilan pengelolaan destinasi untuk menarik lebih banyak pengunjung dan berpotensi meningkatkan kunjungan ulang.
Periodesasi	Tribulanan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah usaha ekonomi kreatif berdasarkan 17 sub sektor
Konsep	usaha ekonomi kreatif
Definisi	Usaha Ekonomi Kreatif (Ekraf) adalah kegiatan ekonomi berbasis ide, kreativitas, dan kekayaan intelektual yang menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, serta warisan budaya dan teknologi, yang dikelompokkan dalam 17 subsektor seperti Kriya, Kuliner, Desain, Fesyen, Musik, Film, Aplikasi, hingga Arsitektur, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. 17 subsektor ini mencakup Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Fesyen, Kriya, Kuliner, Film, Animasi & Video, Fotografi, Aplikasi, Game Development, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Periklanan, Desain Komunikasi Visual (DKV), Televisi & Radio, serta Seni Rupa.
Klasifikasi	sub sektor
Ukuran	Jumlah
Satuan	usaha
Rumus Perhitungan	Jumlah usaha ekonomi kreatif berdasarkan 17 sub sektor
Interpretasi	Semakin tingginya jumlah usaha di 17 subsektor ekonomi kreatif (Ekraf) menunjukkan pertumbuhan, diversifikasi, dan potensi ekonomi yang kuat berbasis kekayaan intelektual dan budaya, menandakan peningkatan kesadaran inovasi, penciptaan lapangan kerja, transformasi ekonomi digital, dan peran penting Ekraf sebagai pendorong pertumbuhan nasional, meskipun tantangan kualitas SDM dan distribusi sumber daya tetap ada.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Usaha Perjalanan Wisata Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha
Konsep	Usaha Perjalanan Wisata
Definisi	Usaha Perjalanan Wisata (UPW) adalah bisnis komersial yang mengurus, menyediakan, dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata, mencakup biro perjalanan, agen perjalanan, jasa pemandu (pramuwisata), penyelenggara MICE, konsultan, dan informasi pariwisata, yang diatur berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk mengelompokkan jenis-jenis usaha pariwisata secara sistematis, mulai dari atraksi, akomodasi, hingga transportasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
Klasifikasi	jenis usaha
Ukuran	Jumlah
Satuan	Usaha
Rumus Perhitungan	Jumlah Usaha Perjalanan Wisata Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha
Interpretasi	pertumbuhan dan peningkatan jumlah serta diversifikasi bisnis di sektor pariwisata, yang mencerminkan sektor ini semakin matang, menarik investasi, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang beragam (agen travel, tour operator, dll.)
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan
Konsep	Warisan Budaya
Definisi	Warisan Budaya Yang Dilestarikan adalah peninggalan fisik (benda, bangunan, situs) dan non-fisik (tradisi, bahasa, pengetahuan) dari masa lalu yang diwariskan antar generasi, memiliki nilai sejarah, estetika, dan identitas, serta perlu dijaga, dilindungi, dan diwariskan kembali untuk generasi mendatang agar tidak punah dan tetap menjadi bagian dari jati diri bangsa.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Warisan
Rumus Perhitungan	Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah warisan budaya yang dilestarikan" mengindikasikan peningkatan kesadaran dan upaya konservasi budaya, yang berarti identitas bangsa semakin kuat, warisan leluhur tidak hilang dimakan zaman, potensi ekonomi (pariwisata) meningkat, serta mendapat pengakuan dan apresiasi internasional
Periodisasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Konsep	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Definisi/Deskripsi	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah ibu hamil yang menerima pelayanan sesuai standar} / \text{total ibu hamil yang memerlukan pelayanan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak ibu hamil yang menerima pelayanan sesuai standar, semakin baik kesehatan ibu dan anak, sekaligus mencerminkan kualitas dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan maternal di wilayah tersebut.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Konsep	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Definisi/Deskripsi	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi: 1) Persalinan normal. 2) Persalinan komplikasi
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah ibu bersalin yang menerima pelayanan sesuai standar} / \text{total ibu bersalin yang memerlukan pelayanan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak ibu bersalin yang menerima pelayanan sesuai standar, semakin baik keselamatan ibu dan bayi, kualitas layanan kesehatan maternal, dan efektivitas program kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Konsep	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah bayi baru lahir yang menerima pelayanan sesuai standar} / \text{total bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak bayi baru lahir yang menerima pelayanan sesuai standar, semakin baik keselamatan, kesehatan, dan perkembangan bayi, serta menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang efektif dan berkualitas.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Konsep	Pelayanan Kesehatan balita
Definisi/Deskripsi	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah balita yang menerima pelayanan sesuai standar} / \text{total balita yang memerlukan pelayanan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak balita yang menerima pelayanan sesuai standar, semakin baik kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini, serta semakin kuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang menerima pelayanan sesuai standar} / \text{total anak usia pendidikan dasar}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak anak usia pendidikan dasar yang menerima pelayanan sesuai standar maka semakin meningkat kualitas pendidikan dasar
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar} / \text{total orang usia 15-59 tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak orang usia 15–59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar maka semakin meningkat deteksi dini faktor risiko dan penyakit
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali} / \text{total warga negara usia 60 tahun ke atas}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, maka semakin baik upaya deteksi dini masalah kesehatan pada lanjut usia, sehingga kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal, penanganan dapat dilakukan secara tepat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penderita hipertensi} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} / \text{total estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, maka semakin baik kualitas hidup penderita, serta angka kesakitan dan kematian akibat hipertensi dapat ditekan.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan pada penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan pada penderita DM
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penderita diabetes mellitus} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} / \text{total estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, maka semakin baik pengendalian penyakit dan semakin rendah risiko komplikasi.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} / \text{total ODGJ berat berdasarkan proyeksi}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, maka semakin baik pengendalian kondisi kejiwaan dan semakin menurunnya risiko kekambuhan serta dampak sosial
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} / \text{total orang terduga TBC}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, maka semakin cepat penemuan dan penanganan kasus serta semakin menurunnya risiko penularan.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Konsep	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} / \text{total orang dengan risiko terinfeksi HIV}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, maka semakin cepat penemuan kasus dan pencegahan penularan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah SDM Kesehatan Menurut Jenis Kelamin
Konsep	SDM Kesehatan
Definisi/Deskripsi	Jumlah SDM Kesehatan adalah total tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah SDM Kesehatan
Interpretasi	Semakin banyak SDM kesehatan yang berkompeten, maka semakin meningkat kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penderita Penyakit Sakit Jiwa Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Konsep	Penderita Penyakit Sakit Jiwa
Definisi/Deskripsi	total individu yang teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa, baik gangguan jiwa berat maupun ringan, berdasarkan hasil diagnosis tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	Umur, Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penderita Penyakit Sakit Jiwa
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penderita penyakit sakit jiwa yang teridentifikasi, maka semakin besar kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang memadai, terjangkau, dan berkesinambungan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kasus HIV dan AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Konsep	Kasus HIV dan AIDS
Definisi/Deskripsi	jumlah individu yang terdiagnosis HIV maupun AIDS berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penegakan diagnosis oleh tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	Umur, Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus HIV dan AIDS
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kasus HIV dan AIDS yang teridentifikasi, maka semakin besar kebutuhan terhadap upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pendampingan yang berkelanjutan guna menekan penularan serta meningkatkan kualitas hidup penderita.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Konsep	Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular
Definisi/Deskripsi	total penduduk yang meninggal dunia karena penyakit menular tertentu berdasarkan penetapan sebab kematian oleh tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	Umur, Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penduduk yang meninggal akibat penyakit menular, maka semakin menunjukkan masih tingginya beban penyakit menular dan perlunya penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pengendalian penularan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penderita Penyakit Menular Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Konsep	Penderita Penyakit Menular
Definisi/Deskripsi	total individu yang terdiagnosis menderita penyakit menular tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan diagnosis oleh tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	Umur, Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penderita Penyakit Menular
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penderita penyakit menular, maka semakin besar risiko penularan di masyarakat dan semakin diperlukan penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pengendalian penyakit menular
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur
Konsep	Kematian Ibu
Definisi/Deskripsi	total perempuan yang meninggal dunia selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam jangka waktu 42 hari setelah persalinan, akibat sebab yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kehamilan dan persalinan, pada wilayah dan periode waktu tertentu
Klasifikasi	Umur
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kematian Ibu
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kematian ibu, maka semakin menunjukkan masih rendahnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kematian Balita Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Kematian Balita
Definisi/Deskripsi	total anak usia 0–59 bulan yang meninggal dunia pada wilayah dan periode waktu tertentu, tanpa melihat penyebab kematian.
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kematian Balita
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kematian balita, maka semakin menunjukkan masih rendahnya derajat kesehatan anak dan kualitas pelayanan kesehatan balit
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Definisi/Deskripsi	total bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang usia kehamilan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Bayi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah bayi BBLR, maka semakin menunjukkan masih tingginya risiko masalah kesehatan ibu dan bayi, sehingga diperlukan penguatan pelayanan kesehatan ibu hami
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Bayi yang dilahirkan Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Bayi yang dilahirkan
Definisi/Deskripsi	total bayi yang lahir hidup pada wilayah dan periode waktu tertentu
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Bayi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah bayi yang dilahirkan, maka semakin menunjukkan tingkat kelahiran di suatu wilayah
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi HB Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Balita yang Mendapatkan Imunisasi HB
Definisi/Deskripsi	jumlah anak usia 0–59 bulan yang telah menerima imunisasi Hepatitis B sesuai ketentuan dan standar pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi HB
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah balita yang mendapatkan imunisasi Hepatitis B, maka semakin baik perlindungan balita terhadap penyakit Hepatitis B
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi DPT Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Balita yang Mendapatkan Imunisasi DPT
Definisi/Deskripsi	jumlah anak usia 0–59 bulan yang telah menerima imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus) sesuai jadwal dan standar pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi DPT
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah balita yang mendapatkan imunisasi DPT, maka semakin baik perlindungan balita terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Balita yang diimunisasi Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Balita yang diimunisasi
Definisi/Deskripsi	jumlah anak usia 0–59 bulan yang telah menerima imunisasi dasar dan/atau lanjutan sesuai jadwal dan standar pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Balita yang diimunisasi
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah balita yang diimunisasi, maka semakin baik tingkat perlindungan balita terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah balita stunting menurut Kecamatan
Konsep	Balita stunting
Definisi/Deskripsi	anak usia 0–59 bulan yang mengalami gangguan pertumbuhan, ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar (Z-score < -2 SD) berdasarkan standar pertumbuhan anak WHO
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah balita stunting
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah balita stunting, maka semakin menunjukkan masih tingginya masalah gizi kronis dan perlunya penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif sejak masa kehamilan hingga usia balita.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan
Konsep	Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Definisi/Deskripsi	total bayi yang lahir hidup dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang usia kehamilan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	bayi
Rumus Perhitungan	Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Interpretasi	semakin tinggi jumlah bayi dengan BBLR, maka semakin menunjukkan masih tingginya risiko gangguan kesehatan bayi dan masalah gizi ibu
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan
Konsep	desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS)
Definisi/Deskripsi	total desa/kelurahan yang telah mencapai kondisi bebas praktik buang air besar sembarangan, berdasarkan hasil verifikasi sesuai kriteria dan standar yang ditetapkan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa/kelurahan
Rumus Perhitungan	Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah desa/kelurahan yang telah Stop BABS, maka semakin baik kondisi sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih masyarakat
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Posyandu per Kecamatan
Konsep	Posyandu
Definisi/Deskripsi	wadah pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dan dikelola oleh kader, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan keluarga berencana, secara terpadu dan berkelanjutan.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak dan semakin aktif posyandu, maka semakin mudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan
Konsep	Kejadian Luar Biasa (KLB)
Definisi/Deskripsi	kejadian meningkatnya kasus kesakitan dan/atau kematian akibat suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang jumlahnya melebihi keadaan normal pada waktu dan wilayah tertentu, sehingga memerlukan penanggulangan segera sesuai ketentuan yang berlaku.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	kejadian
Rumus Perhitungan	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam
Interpretasi	Semakin sering terjadi KLB di desa/kelurahan, maka semakin menunjukkan lemahnya pengendalian penyakit dan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
Konsep	Kematian Ibu
Definisi/Deskripsi	total perempuan yang meninggal dunia selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam jangka waktu 42 hari setelah persalinan, akibat sebab yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kehamilan dan persalinan, pada wilayah dan periode waktu tertentu
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kematian Ibu
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kematian ibu, maka semakin menunjukkan masih rendahnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan
Konsep	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa
Definisi/Deskripsi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar
Interpretasi	Semakin banyak ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, maka semakin baik pengendalian kondisi kejiwaan dan semakin menurunnya risiko kekambuhan serta dampak sosial
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan
Konsep	Penderita Penyakit Menular
Definisi/Deskripsi	total individu yang terdiagnosis menderita penyakit menular tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan diagnosis oleh tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus Penyakit Menular
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penderita penyakit menular, maka semakin besar risiko penularan di masyarakat dan semakin diperlukan penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pengendalian penyakit menular
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
Konsep	Penderita Penyakit Tidak Menular
Definisi/Deskripsi	total individu yang terdiagnosis menderita penyakit tidak menular berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan diagnosis oleh tenaga kesehatan berwenang
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kasus penyakit tidak menular, maka semakin menunjukkan besarnya beban penyakit tidak menular di masyarakat dan perlunya penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, serta pelayanan kesehatan berkelanjutan.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan
Konsep	Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak
Definisi/Deskripsi	Difteri : Sakit pada tenggorokan dan pernafasan atas yang disebabkan oleh bakteri <i>Corynebacterium diphtheria</i> , Pertusis (batuk rejan) : kondisi batuk yang tidak terkendali membuat seseorang sulit makan, minum, sampai bernapas yang disebabkan Infeksi Bakteri, Tetanus : Penyakit yang disebabkan oleh bakteri <i>clostridium tetani</i> . bakteri tersebut menyebar lewat spora dari bakteri pada luka yang terbuka dan memproduksi racun berbahaya bernama tetanospasmin, Hepatitis B : virus hepatitis B yang berisiko berkembang menjadi kanker hati dan sangat menular, Campak atau measles adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, dan ruam di seluruh tubuh.
Klasifikasi	kecamatan, jenis penyakit
Ukuran	Jumlah
Satuan	kasus
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi
Interpretasi	Semakin rendah jumlah kasus difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka semakin baik cakupan dan efektivitas imunisasi
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap menurut Kecamatan
Konsep	puskesmas
Definisi/Deskripsi	Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. Puskesmas rawat inap Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Klasifikasi	kecamatan, jenis pelayanan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap
Interpretasi	Semakin banyak puskesmas rawat inap, maka semakin baik mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan
Konsep	rumah sakit
Definisi/Deskripsi	total rumah sakit yang dikelompokkan menurut tingkat akreditasi (Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna). Dasar:memenuhi standar pelayanan minimal, Madya: memenuhi standar pelayanan pada tingkat menengah, Utama: memenuhi sebagian besar standar mutu dan keselamatan pasien, Paripurna: memenuhi seluruh standar mutu dan keselamatan pasien secara optimal.
Klasifikasi	kecamatan, akreditasi RS
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit
Interpretasi	Semakin baik akreditasi rumah sakit, maka semakin terjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit Menurut Kecamatan
Konsep	rumah sakit
Definisi/Deskripsi	rumah sakit yang dikelompokkan menurut klasifikasi kelas (Kelas A, B, C, dan D). Kelas A: Memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik secara luas, kelas B: Memberikan pelayanan kesehatan spesialisik luas dan subspecialistik terbatas, kelas C: Memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dasar, kelas D: Memberikan pelayanan kesehatan dasar.
Klasifikasi	kecamatan, kelas rumah sakit
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit
Interpretasi	Semakin banyak dan semakin lengkap distribusi rumah sakit berdasarkan kelas, maka semakin baik ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan sesuai tingkat kebutuhan pelayanan.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi Menurut Kecamatan
Konsep	screening Penyakit Tidak Menular (PTM)
Definisi/Deskripsi	kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dini faktor risiko dan/atau penyakit tidak menular pada penduduk berusia di atas 15 tahun yang memiliki faktor risiko, sesuai standar pelayanan kesehatan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan skrining PTM pada penduduk berisiko usia >15 tahun, maka semakin cepat deteksi dini dan pengendalian faktor risiko PTM
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan
Konsep	Status Gizi Balita
Definisi/Deskripsi	balita usia 0–59 bulan yang dikelompokkan menurut status gizinya berdasarkan hasil pengukuran antropometri menggunakan indeks gizi (BB/U, TB/U, atau BB/TB) sesuai standar yang ditetapkan
Klasifikasi	kecamatan, status gizi
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Status Gizi Balita
Interpretasi	Semakin baik distribusi status gizi balita berdasarkan indeks, maka semakin menunjukkan perbaikan kondisi gizi dan tumbuh kembang balita
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas Menurut Kecamatan
Konsep	tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas
Definisi/Deskripsi	total tempat tidur rawat inap yang tersedia di rumah sakit yang dikelompokkan menurut kelas rumah sakit (Kelas A, B, C, dan D)
Klasifikasi	kecamatan, kelas rumah sakit
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas
Interpretasi	Semakin banyak dan proporsional jumlah tempat tidur pada setiap kelas rumah sakit, maka semakin baik kapasitas pelayanan rawat inap dan sistem rujukan kesehatan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan
Konsep	rumah sakit
Definisi/Deskripsi	total rumah sakit yang dikelompokkan menurut jenis penyelenggaraannya, seperti rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, baik milik pemerintah maupun swasta
Klasifikasi	kecamatan, jenis rumah sakit
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit
Interpretasi	Semakin banyak dan beragam jenis rumah sakit, maka semakin baik ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan
Konsep	persalinan di fasilitas kesehatan
Definisi/Deskripsi	total persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya) oleh tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	persalinan
Rumus Perhitungan	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah persalinan di fasilitas kesehatan, maka semakin baik akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah tenaga kesehatan Menurut Kecamatan
Konsep	tenaga kesehatan
Definisi/Deskripsi	total individu yang memiliki pendidikan dan/atau kompetensi di bidang kesehatan serta bekerja memberikan pelayanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di fasilitas pelayanan kesehatan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kesehatan
Interpretasi	Semakin banyak jumlah tenaga kesehatan, maka semakin baik ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya
Konsep	penduduk rentan
Definisi/Deskripsi	proporsi penduduk yang termasuk kelompok rentan (misalnya anak, lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat miskin) yang telah memperoleh dokumen kependudukan
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	jumlah penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya/total jumlah penduduk rentan yang berhak)x100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya, maka semakin baik akses layanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan, sehingga hak-hak dasar mereka untuk memperoleh pelayanan publik dan perlindungan hukum semakin terpenuhi.
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes
Konsep	Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes
Definisi/Deskripsi	perangkat, instrumen, atau peralatan medis yang digunakan untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan pasien, termasuk peralatan laboratorium untuk analisis klinis dan pemeriksaan kesehatan, pada fasilitas pelayanan kesehatan
Klasifikasi	jenis alat kesehatan
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	jumlah Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes
Interpretasi	Semakin lengkap dan memadai jumlah serta kondisi alat-alat kesehatan/labkes, maka semakin baik kapasitas fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan, diagnosis, dan pengendalian penyakit
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
Konsep	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil pemeriksaan, analisis, dan temuan terkait kejadian ikutan yang muncul setelah imunisasi atau pemberian obat massal, termasuk penyebab, tingkat keparahan, dan rekomendasi tindak lanjut
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
Interpretasi	Semakin baik hasil investigasi lanjutan KIPI dan pemberian obat massal, maka semakin cepat dan tepat penanganan kejadian ikutan, sehingga keselamatan masyarakat terjamin dan kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan meningkat.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Konsep	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat data, laporan, dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana atau berisiko terdampak bencana, termasuk jenis layanan, jumlah penerima layanan, dan temuan pengelolaan kesehatan
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Interpretasi	Semakin baik hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, maka semakin cepat, tepat, dan efektif pelayanan kesehatan darurat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Definisi/Deskripsi	dokumen resmi yang memuat data, laporan, dan evaluasi terkait penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gizi bagi masyarakat, termasuk kegiatan intervensi gizi, pemantauan status gizi, dan capaian target gizi
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Interpretasi	Semakin baik hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, maka semakin efektif upaya pemantauan, pencegahan, dan penanganan masalah gizi, sehingga kondisi gizi masyarakat membaik dan risiko gangguan kesehatan terkait gizi menurun
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat data, laporan, dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji, termasuk pelayanan pra keberangkatan, saat pelaksanaan ibadah haji, dan pelayanan pasca haji
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
Interpretasi	Semakin baik hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji, maka semakin efektif pelayanan kesehatan bagi jemaah haji
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, bayi, dan balita, yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, maka semakin meningkat cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, bayi, dan balita sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kesinambungan pelayanan dapat terjamin
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, guna melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dan masyarakat pelaku olahraga
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, maka semakin meningkat perlindungan dan derajat kesehatan tenaga kerja serta masyarakat pelaku olahraga melalui pelayanan kesehatan yang terencana, terintegrasi, dan sesuai standar.
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, maka semakin meningkat akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai standar
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Konsep	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif sesuai standar.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, maka semakin meningkat akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Konsep	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi sistem rujukan dan rujuk balik sesuai standar pelayanan kesehatan.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas pelayanan kesehatan, maka semakin terjamin kesinambungan pelayanan, ketepatan penanganan pasien, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya kesehatan sesuai
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Konsep	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Definisi/Deskripsi	dokumen yang memuat hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data surveilans kesehatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Interpretasi	Semakin baik pengelolaan surveilans kesehatan, maka semakin akurat, tepat waktu, dan berkelanjutan ketersediaan data kesehatan sebagai dasar kewaspadaan dini, pengendalian masalah kesehatan, serta pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
Konsep	Fasilitas Kesehatan
Definisi/Deskripsi	banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyampaikan laporan insiden keselamatan pasien, baik kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan, maupun kejadian sentinel, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan
Klasifikasi	jenis fasilitas kesehatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
Interpretasi	Semakin banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien, maka semakin baik budaya keselamatan pasien yang diterapkan, semakin meningkat keterbukaan dan kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap sistem pelaporan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota
Konsep	Fasilitas Kesehatan
Definisi/Deskripsi	banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memperoleh status akreditasi dari lembaga akreditasi yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bukti pemenuhan standar mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan
Klasifikasi	jenis fasilitas kesehatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi
Interpretasi	Semakin banyak fasilitas kesehatan yang terakreditasi, maka semakin terjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Konsep	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Definisi/Deskripsi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Klasifikasi	jenis fasilitas layanan kesehatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Interpretasi	Semakin memadai dan berkualitas fasilitas pelayanan kesehatan, maka semakin meningkat akses, mutu, dan keselamatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Ibu bersalin
Konsep	Persalinan
Definisi/Deskripsi	banyaknya perempuan yang menjalani proses persalinan dalam periode waktu tertentu, baik persalinan normal maupun dengan tindakan, yang tercatat dan dilaporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Ibu bersalin
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ibu bersalin yang tercatat dan tertangani di fasilitas pelayanan kesehatan, maka semakin baik akses dan pemanfaatan pelayanan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Ibu Hamil
Konsep	Kehamilan
Definisi/Deskripsi	Jumlah Ibu Hamil adalah banyaknya perempuan yang sedang mengalami kehamilan dalam periode waktu tertentu, yang tercatat dan dilaporkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Ibu Hamil
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ibu hamil yang terdata dan terpantau oleh pelayanan kesehatan, maka semakin baik jangkauan pendataan dan pemantauan kehamilan, sehingga mendukung pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil secara tepat waktu dan berkesinambungan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa Siaga aktif Purnama Mandiri (PURI)
Konsep	Desa Siaga aktif Purnama Mandiri
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa yang telah mencapai tingkat Purnama Mandiri, yaitu desa yang memiliki kesiapsiagaan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, didukung oleh kelembagaan, pembiayaan, serta kemitraan yang berfungsi secara aktif
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Desa
Rumus Perhitungan	Jumlah Desa Siaga aktif Purnama Mandiri (PURI)
Interpretasi	Semakin banyak Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI), maka semakin kuat kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi masalah kesehatan
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan
Konsep	Tenaga Kesehatan
Definisi/Deskripsi	banyaknya tenaga medis yang terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi yang bertugas dan memberikan pelayanan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
Klasifikasi	Sarana pelayanan kesehatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi
Interpretasi	Semakin memadai jumlah dan pemerataan dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi pada setiap sarana pelayanan kesehatan, maka semakin meningkat akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Konsep	Kesehatan Ibu Hamil
Definisi/Deskripsi	Jumlah Ibu Hamil adalah banyaknya perempuan yang sedang mengalami kehamilan dan tercatat dalam sistem pelayanan kesehatan pada periode tertentu. Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1 adalah banyaknya ibu hamil yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan pertama oleh tenaga kesehatan. Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K4 adalah banyaknya ibu hamil yang memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali sesuai standar pelayanan antenatal. Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) adalah banyaknya ibu hamil yang teridentifikasi mengalami kekurangan energi kronis berdasarkan indikator status gizi sesuai ketentuan. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) adalah banyaknya ibu hamil yang menerima suplementasi tablet zat besi sesuai standar pelayanan kesehatan ibu hamil.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ibu hamil yang terdata, melakukan kunjungan K1 dan K4, serta memperoleh tablet zat besi (Fe), dan semakin menurunnya jumlah ibu hamil dengan KEK, maka semakin baik akses, cakupan, dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat mengakses pelayanan kesehatan
Konsep	Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
Definisi/Deskripsi	banyaknya penduduk yang tergolong miskin dan tidak mampu yang memperoleh atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat mengakses pelayanan kesehatan
Interpretasi	Semakin besar jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat mengakses pelayanan kesehatan, maka semakin baik pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Konsep	penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Definisi/Deskripsi	banyaknya jenis penyakit menular yang penularannya dapat dicegah melalui pemberian imunisasi sesuai dengan program imunisasi yang ditetapkan oleh pemerintah
Klasifikasi	jenis penyakit
Ukuran	Jumlah
Satuan	penyakit
Rumus Perhitungan	Jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Interpretasi	Semakin banyak penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka semakin luas perlindungan kesehatan masyarakat melalui program imunisasi
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes
Konsep	fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi/Deskripsi	banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang tersedia dan berfungsi. fasilitas pelayanan kesehatan adalah Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Klasifikasi	jenis fasilitas pelayanan kesehatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes
Interpretasi	Semakin banyak dan merata ketersediaan rumah sakit, puskesmas, klinik/balai kesehatan, posyandu, dan polindes, maka semakin meningkat akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Konsep	Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Definisi/Deskripsi	kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis dan supervisi terhadap penyelenggaraan UKBM, yang menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan kualitas pengelolaan UKBM
Klasifikasi	jenis kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	kegiatan
Rumus Perhitungan	jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Interpretasi	Semakin optimal kegiatan hasil bimbingan teknis dan supervisi pada UKBM, maka semakin meningkat kemampuan pengelola dan kader UKBM dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	orang terduga menderita HIV
Konsep	penderita HIV
Definisi/Deskripsi	individu yang berdasarkan hasil skrining, pemeriksaan awal, atau penilaian faktor risiko menunjukkan dugaan terinfeksi HIV, namun masih memerlukan pemeriksaan lanjutan atau konfirmasi diagnosis sesuai standar pelayanan kesehatan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	jumlah orang terduga menderita HIV
Interpretasi	Semakin banyak orang terduga menderita HIV yang teridentifikasi dan tercatat, maka semakin baik jangkauan deteksi dini dan skrining HIV
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Konsep	orang terduga menderita tuberkulosis
Definisi/Deskripsi	individu yang menunjukkan gejala atau memiliki faktor risiko tuberkulosis dan telah menerima pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan/atau penatalaksanaan awal, di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan
Interpretasi	Semakin banyak orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan, maka semakin baik cakupan penemuan kasus dan akses pelayanan kesehatan, sehingga mendukung deteksi dini, pengobatan tepat waktu, serta pengendalian penularan tuberkulosis di masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine
Konsep	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine
Definisi/Deskripsi	banyaknya fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi konsultasi medis, pemantauan kesehatan, serta pertukaran informasi kesehatan, antara tenaga kesehatan dan pasien sesuai
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah pelayanan kesehatan berbasis telemedicine, maka semakin luas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, semakin meningkat akses dan kontinuitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Periode	tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penderita Diabetes Melitus
Konsep	Diabetes Melitus
Definisi/Deskripsi	Penderita Diabetes Melitus adalah seseorang yang didiagnosis menderita Diabetes Melitus oleh tenaga kesehatan yang berwenang, berdasarkan kriteria klinis dan/atau pemeriksaan laboratorium, baik DM tipe 1, DM tipe 2, diabetes gestasional, maupun jenis diabetes lain yang spesifik, yang tercatat dan/atau mendapatkan pelayanan kesehatan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penderita Diabetes Melitus
Interpretasi	semakin banyaknya penderita DM yang teridentifikasi, maka upaya pengendalian, pengobatan, dan pencegahan komplikasi dapat dilakukan lebih dini dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Diabetes Melitus
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penderita Hipertensi
Konsep	Hipertensi
Definisi/Deskripsi	seseorang yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan yang berwenang memiliki Tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain, yaitu tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penderita Hipertensi
Interpretasi	semakin banyak penderita hipertensi yang terdeteksi, maka upaya pengendalian penyakit dan pencegahan komplikasi (seperti stroke dan penyakit jantung) dapat dilakukan lebih dini dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
Konsep	Kejadian luar biasa
Definisi/Deskripsi	seluruh penduduk yang berada di wilayah terjadinya atau berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit, bencana kesehatan, atau kondisi kedaruratan kesehatan lainnya, yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung, serta memiliki risiko terpapar, tertular, atau mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi tersebut.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
Interpretasi	Semakin sedikit penduduk yang terdampak dan beresiko pada kondisi KLB, Semakin efektifnya upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanggulangan KLB
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penduduk Usia Lanjut
Konsep	Lanjut Usia
Definisi/Deskripsi	Orang Lanjut Usia (Lansia) adalah Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penduduk Usia Lanjut
Interpretasi	Semakin banyak penduduk usia lanjut, semakin meningkatnya angka harapan hidup dan keberhasilan pembangunan kesehatan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penduduk Usia Produktif
Konsep	Penduduk Usia Produktif
Definisi/Deskripsi	penduduk yang berada pada rentang usia 15–64 tahun yang secara potensial memiliki kemampuan untuk bekerja, berproduksi, dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penduduk Usia Produktif
Interpretasi	Semakin banyak penduduk usia produktif, potensi meningkatnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan
Konsep	Jaminan kesehatan
Definisi/Deskripsi	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan
Interpretasi	Semakin banyak penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, sebagai semakin luasnya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, sehingga penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, berkesinambungan, dan terjangkau
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Balita Gizi Buruk
Konsep	Balita Gizi Buruk
Definisi/Deskripsi	proporsi balita usia 0–59 bulan yang mengalami gizi buruk berdasarkan hasil penilaian status gizi antropometri (berat badan menurut tinggi badan/BB-TB, berat badan menurut umur/BB-U, atau indikator lain sesuai standar). Balita dikategorikan gizi buruk apabila hasil pengukuran menunjukkan: Z-score < -3 Standar Deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan WHO, dan/atau terdapat tanda klinis gizi buruk, sesuai pedoman pelayanan gizi.
Klasifikasi	Kecamatan/Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah balita gizi buruk/jumlah seluruh balita)x100%
Interpretasi	Semakin rendah persentase balita gizi buruk, Semakin baiknya status gizi balita dan kualitas kesehatan anak
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Wasting pada Balita
Konsep	Wasting pada Balita
Definisi/Deskripsi	wasting adalah Kondisi kurang gizi akut yang dicirikan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan akibat kurangnya asupan gizi dan infeksi penyakit. wasting diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: ? Sangat Kurus : Zscore & -3,0 ? Kurus : Zscore ?- 3,0 s/d Zscore & - 2,0
Klasifikasi	Kecamatan/Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah balita dengan wasting/jumlah seluruh balita)x100%
Interpretasi	Semakin kecil persentase wasting pada balita diinterpretasikan sebagai semakin baiknya status gizi balita, yang mencerminkan menurunnya kejadian gizi akut, meningkatnya efektivitas intervensi gizi, serta membaiknya akses pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pola pengasuhan anak
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Prasarana di Fasyankes
Konsep	Prasarana di Fasyankes
Definisi/Deskripsi	seluruh sarana fisik dasar dan pendukung yang bersifat permanen atau semi permanen, yang berfungsi menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat berjalan aman, efektif, bermutu, dan berkelanjutan
Klasifikasi	jenis fasilitas pelayanan kesehatan/kecamatan, jenis sarana prasarana
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Prasarana di Fasyankes
Interpretasi	Semakin banyak prasarana yang tersedia dan memenuhi standar di Fasyankes, Semakin baiknya kesiapan dan kapasitas Fasyankes dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan Meningkatnya mutu, keamanan, dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Prevalensi Balita Gizi Kurang
Konsep	Balita Gizi Kurang
Definisi/Deskripsi	proporsi balita usia 0–59 bulan yang mengalami gizi kurang berdasarkan hasil penilaian status gizi antropometri (umumnya berat badan menurut umur/BB-U). Balita dikategorikan gizi kurang apabila hasil pengukuran menunjukkan: Z-score ≥ -3 SD dan < -2 SD menurut standar pertumbuhan WHO, dan/atau Kriteria lain sesuai pedoman nasional penilaian status gizi balita.
Klasifikasi	Kecamatan/Puskesmas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah balita dengan gizi kurang/jumlah seluruh balita)x100%
Interpretasi	Semakin rendah prevalensi balita gizi kurang, semakin Membaiknya status gizi balita dan kualitas kesehatan anak
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Public Safety Center (PSC 119)
Konsep	Public Safety Center
Definisi/Deskripsi	Public Safety Center (PSC) adalah unit layanan terpadu kedaruratan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terkoordinasi kepada masyarakat dalam kondisi kegawatdaruratan, terutama kedaruratan medis, melalui akses tunggal (call center) yang beroperasi 24 jam
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Public Safety Center
Interpretasi	Semakin banyak Public Safety Center yang tersedia dan berfungsi, Semakin luasnya cakupan pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Puskesmas
Konsep	Puskesmas
Definisi/Deskripsi	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Puskesmas
Interpretasi	Semakin banyak puskesmas semakin luasnya akses dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit Kelas A
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Rumah Sakit Kelas A adalah rumah sakit rujukan tertinggi yang memiliki pelayanan medik spesialisik dan subspecialistik lengkap, sarana dan prasarana canggih, serta sumber daya manusia kesehatan yang komprehensif
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit Kelas A
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas A, Semakin kuatnya kapasitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit kelas B
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Rumah Sakit Kelas B adalah rumah sakit rujukan tingkat menengah–lanjut yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik luas dan sebagian pelayanan subspecialistik, didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan yang memadai
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit kelas B
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas B, Semakin kuatnya kapasitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat menengah
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	rumah sakit dengan klasifikasi kelas B yang belum memperoleh izin operasional dari instansi berwenang atau izin operasionalnya telah berakhir masa berlakunya dan belum diperpanjang, sehingga belum atau tidak diperkenankan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal
Interpretasi	Semakin sedikit rumah sakit kelas B yang belum memiliki atau habis masa izin operasional, Semakin baiknya kepatuhan rumah sakit terhadap ketentuan perizinan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	rumah sakit dengan klasifikasi kelas B yang telah memperoleh izin operasional yang masih berlaku dari instansi berwenang, serta memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan mutu pelayanan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas B yang memiliki izin operasional yang sah dan berlaku, Semakin baiknya tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap ketentuan perizinan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit kelas C
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Rumah Sakit Kelas C adalah rumah sakit rujukan tingkat dasar–menengah yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dasar, didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit kelas C
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas C, Semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dasar
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit Kelas C dan D
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D adalah rumah sakit rujukan tingkat dasar dan pertama dalam sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dasar (kelas C) dan pelayanan medik dasar (kelas D), didukung oleh sarana, prasarana, serta sumber daya manusia kesehatan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas C dan D, Semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dasar dan pertama
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rumah Sakit kelas D
Konsep	Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Rumah Sakit Kelas D adalah rumah sakit rujukan pertama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, serta berfungsi sebagai fasilitas rujukan awal dari Puskesmas, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah Sakit kelas D
Interpretasi	Semakin banyak rumah sakit kelas D, Semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan pertama
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
Konsep	Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)
Definisi/Deskripsi	jumlah spesimen klinis atau lingkungan (misalnya darah, serum, swab, feses, atau spesimen lain sesuai jenis penyakit) yang diambil dari kasus suspek atau kejadian yang berpotensi KLB, kemudian dikirim dan diterima oleh laboratorium rujukan atau laboratorium nasional untuk pemeriksaan, konfirmasi diagnosis, dan penetapan etiologi penyakit sesuai standar surveilans dan kewaspadaan dini.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
Interpretasi	Semakin banyak spesimen penyakit potensial KLB yang didistribusikan ke laboratorium rujukan/nasional, Semakin baiknya pelaksanaan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani
Konsep	PMKS/ PPKS
Definisi	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) merupakan individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) merupakan individu, kelompok, atau komunitas yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintah atau masyarakat
Klasifikasi	Jenis PMKS/PPKS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani / Jumlah PMKS/PPKS yang Terdata x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase PMKS/PPKS yang tertangani, maka semakin rendah jumlah PMKS/PPKS tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi acuan karena data PMKS/PPKS bergerak secara dinamis
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif
Konsep	PSKS yang aktif
Definisi	PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Klasifikasi	Jenis PSKS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah PSKS yang Aktif / Jumlah PSKS yang Ada x 100%
Interpretasi	Jumlah PSKS yang aktif dapat ditingkatkan lagi keaktifannya dan yang tidak aktif dapat dilakukan pembinaan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya
Konsep	Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nganjuk
Definisi	Digunakan untuk mengukur persentase penanganan kasus kekerasan yang tertangani
Klasifikasi	Jenis_Tindak_Kekerasan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani / Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan x 100%
Interpretasi	semakin rendahnya kasus yang tertangani harapannya semakin rendahnya kasus yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, tetapi hal ini tidak dapat menjadi acuan karena kasus yang belum dilaporkan jumlahnya banyak disebabkan pihak korban takut untuk melaporkan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Konsep	Predikat Kabupaten Layak Anak
Definisi	Kecamatan yang sudah memenuhi indikator indikator sebagai kecamatan layak anak
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Kecamatan Layak Anak / Jumlah Kecamatan x 100%
Interpretasi	Predikat Kabupaten yang sudah layak anak dengan salah satu kategori memiliki SK Gugus Tugas Layak Anak dan Sesuai dengan range nilai yang ada dalam indikator
Periodesasi	> Dua Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penduduk miskin ekstrim
Konsep	Untuk mengukur penduduk dalam kemiskinan ekstrim
Definisi	Individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi kemiskinan paling parah, di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal layak, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Klasifikasi	Semua Desa/ Kelurahan, Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persentase
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim / Jumlah Penduduk Total $\times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang menunjukkan bahwa masih ada kelompok penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks pemberdayaan gender (IDG)
Konsep	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender dalam hal pemberdayaan perempuan dalam masyarakat
Definisi	Untuk mengukur pemberdayaan gender (IDG) dalam tiga dimensi utama, partisipasi dalam dunia kerja, tingkat pendidikan gender (IDG), dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
Klasifikasi	Semua Desa/ Kelurahan, Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	IDG Tinggi / IDG Sedang / IDG Rendah
Interpretasi	Untuk menghasilkan satu angka yang menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di suatu wilayah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase lembaga pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender
Konsep	Tingkat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lembaga pemerintahan
Definisi	Lembaga pemerintah yang telah melaksanakan kebijakan, program, atau kegiatan seperti pelatihan kesetaraan gender untuk pegawai, perumusan kebijakan berbasis gender, dan penyusunan anggaran yang responsif gender.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah lembaga pemerintah yang telah melaksanakan PUG / Jumlah total lembaga pemerintah $\times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak lembaga pemerintah yang telah mengarusutamakan gender dalam kegiatannya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	jumlah PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin
Konsep	Keterpaparan terhadap masalah kesejahteraan sosial
Definisi	Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin adalah total individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tercatat di luar panti sosial dan dikelompokkan menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)
Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PMKS Laki-laki} - \text{Jumlah PMKS Perempuan}}{\text{Jumlah Total PMKS}}$
Interpretasi	Menunjukkan jumlah individu yang memerlukan bantuan sosial di luar panti sosial
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Anak terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
Konsep	Untuk mengukur jumlah anak terlantar yang tercatat di luar panti sosial dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Definisi	Jumlah anak terlantar yang tidak memiliki pengasuhan orang tua atau keluarga dan tidak berada dalam lembaga pengasuhan, dibedakan berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan
Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kelamin / Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	<u>Jumlah Anak Terlantar Laki-laki dan Perempuan</u> Jumlah Anak Terlantar
Interpretasi	Menunjukkan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kecamatan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan
Konsep	Untuk mengukur jumlah PMKS yang berada di luar panti sosial di setiap kecamatan
Definisi	Jumlah individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak tinggal di panti sosial, berdasarkan menurut kecamatan
Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kelamin / Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	<u>Jumlah PMKS di Kecamatan</u> Jumlah Total PMKS di Semua Kecamatan
Interpretasi	Menunjukkan jumlah individu yang memerlukan bantuan sosial di tingkat kecamatan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
Konsep	Individu yang hidup dalam kondisi sosial yang sangat sulit dan membutuhkan perhatian khusus dari lembaga sosial atau pemerintah
Definisi	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan adalah jumlah total individu yang termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis yang tercatat berada di luar panti sosial, yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, pada masing-masing kecamatan
Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kelamin / Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	<u>Jumlah Gelandangan dan Pengemis Laki-laki dan Perempuan</u> Jumlah Gelandangan dan Pengemis
Interpretasi	Menunjukkan jumlah individu yang mengalami masalah sosial dan hidup di jalanan di tingkat kecamatan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana
Konsep	Jumlah korban yang terkena dampak dari bencana alam, dengan pembagian berdasarkan jenis bencana yang terjadi
Definisi	Individu atau kelompok orang yang mengalami dampak langsung dari suatu peristiwa bencana alam, dibedakan berdasarkan jenis bencana (banjir, gempa bumi, tanah longsor, dll)
Klasifikasi	Jenis Bencana Alam / Jumlah Bencana Alam
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	<u>Korban Jiwa+Korban Luka-luka+Korban Mengungsi+Korban Terisolasi</u> Jenis Bencana Alam
Interpretasi	Menunjukkan tingkat keparahan yang terdampak bencana alam terhadap masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana
Konsep	Mengukur jumlah korban yang terkena dampak dari peristiwa bencana sosial
Definisi	Individu atau kelompok yang mengalami bencana sosial, dengan pembagian berdasarkan jenis bencana sosial yang terjadi, seperti kerusuhan sosial, konflik antar kelompok, tindakan terorisme, atau tindakan kekerasan massal.
Klasifikasi	Jenis Bencana Sosial
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	$\text{Korban Jiwa} + \text{Korban Luka-luka} + \text{Korban Mengungsi} + \text{Korban Terisolasi} + \text{Korban Trauma Psikologis}$ Jenis Bencana Sosial
Interpretasi	Untuk mengukur jumlah korban yang tinggi pada jenis bencana sosial tertentu
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan
Konsep	Mengukur jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam sektor kesejahteraan sosial pada setiap kecamatan
Definisi	Jumlah individu yang bekerja dalam sektor kesejahteraan sosial di setiap kecamatan
Klasifikasi	Jenis Sumber Daya Manusia (SDM)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	$\text{Pekerja Sosial} + \text{Tenaga Pendamping Sosial} + \text{Relawan Sosial} + \text{Petugas Program Kesejahteraan Sosial}$
Interpretasi	Menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Konsep	Mengukur jumlah tenaga kerja dalam sektor kesejahteraan sosial masing-masing kecamatan, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin
Definisi	Jumlah tenaga kerja dalam sektor kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan, yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja ini melibatkan individu yang bekerja dalam berbagai kapasitas, baik sebagai pekerja sosial, pendamping, maupun relawan.
Klasifikasi	Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kesejahteraan Sosial Laki-laki} + \text{Tenaga Kesejahteraan Sosial Perempuan}$ Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Interpretasi	Keberadaan jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di kecamatan dapat menunjukkan kesetaraan gender yang baik dalam sektor kesejahteraan sosial
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Konsep	Jumlah relawan sosial yang terlibat dalam kegiatan sosial di setiap kecamatan
Definisi	Individu yang bekerja tanpa mendapatkan imbalan finansial untuk melayani masyarakat, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, seperti bantuan bencana, pelayanan sosial kepada kelompok rentan, atau program pemberdayaan masyarakat
Klasifikasi	Jumlah total relawan sosial / Jenis Relawan Sosial
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	$\text{Relawan Sosial Laki-laki} + \text{Relawan Sosial Perempuan}$ Jumlah Total Relawan Sosial
Interpretasi	Jumlah relawan sosial yang lebih besar menunjukkan kebutuhan atau kecenderungan dalam jenis kegiatan sosial tertentu
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka Kemiskinan Ekstrem
Konsep	Angka Kemiskinan Ekstrem mengukur persentase penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan yang sangat parah, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
Definisi	Individu atau rumah tangga mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
Klasifikasi	Klasifikasi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Pengeluaran/Pendapatan
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Angka kemiskinan ekstrem menunjukkan seberapa dalam kondisi kemiskinan yang dialami oleh penduduk di wilayah, Semakin tinggi angka kemiskinan ekstrem, semakin banyak orang yang hidup dalam kondisi yang sangat terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Konsep	Pembangunan Gender
Definisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Untuk mengetahui tingkat ketimpangan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di suatu wilayah
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	skor
Rumus Perhitungan	- $\text{Indeks Kesetaraan} = \frac{\text{Nilai Indikator Perempuan}}{\text{Nilai Indikator Laki-laki}}$
Interpretasi	IPG berfungsi sebagai alat untuk memantau dan memperbaiki ketimpangan gender dalam berbagai sektor, serta membantu merancang kebijakan yang berfokus pada kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
Konsep	Lanjut Usia Terlantar
Definisi	Jumlah lanjut usia (lansia) yang tidak mendapatkan perawatan atau pengawasan di panti sosial, dan ditemukan di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin di tiap kecamatan
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah lansia terlantar laki-laki + Jumlah lansia terlantar perempuan per kecamatan
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat keberadaan lanjut usia terlantar di luar panti sosial dalam setiap kecamatan. Interpretasi angka ini dapat mengindikasikan tingkat perlindungan sosial yang ada bagi lansia serta efektivitas kebijakan atau layanan di tiap kecamatan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Konsep	PMKS adalah singkatan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan dasar (jasmani, rohani, sosial) secara wajar, yang meliputi fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, hingga korban bencana
Definisi/Deskripsi	Pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi tujuan utama dari pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatasi hambatan yang dialami PMKS.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	kebutuhan
Rumus Perhitungan	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Interpretasi	semakin terpenuhinya kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berarti menurunnya jumlah individu/keluarga yang termasuk dalam kategori PMKS, menunjukkan bahwa program intervensi berhasil mengangkat mereka dari kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan)
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data Penerima Bantuan Sosial
Konsep	Penerima Bantuan Sosial
Definisi/Deskripsi	Penerima Bantuan Sosial (Bansos) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta bukan merupakan ASN/TNI/Polri, yang berhak menerima bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perlindungan dari risiko sosial.
Klasifikasi	-
Ukuran	Total
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Bantuan sosial
Interpretasi	semakin terpenuhi data penerima bantuan sosial berarti proses validasi dan pemutakhiran data semakin efektif, sehingga penerima bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran, mengurangi inclusion error (orang tidak layak menerima), dan menggantinya dengan penerima yang lebih membutuhkan (exclusion error) seperti lansia atau disabilitas yang tinggal sendiri
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)
Konsep	Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)
Definisi/Deskripsi	ASPD merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
Klasifikasi	-
Ukuran	Total
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)
Interpretasi	semakin terpenuhi bagi penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) berarti peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Konsep	Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Definisi/Deskripsi	Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok masyarakat miskin yang terdiri dari 5-10 Kepala Keluarga (KK), yang dibentuk secara mandiri atau diinisiasi pemerintah, untuk menerima modal usaha sebagai Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dari Kementerian Sosial, guna mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka.
Klasifikasi	-
Ukuran	Total
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Interpretasi	semakin terpenuhi" pada Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berarti kondisi kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan partisipasi sosial anggota KUBE menunjukkan peningkatan signifikan, bukan hanya sekedar menerima bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha produktif secara mandiri, membangun solidaritas, dan berdampak positif bagi lingkungan sosial mereka
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Konsep	Kesetaraan Gender
Definisi/Deskripsi	Angka yang menggambarkan suatu kondisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam hal memperoleh hak-haknya sebagai manusia terkait akses dan kontrol sumber daya, partisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> IKG = $\sqrt[3]{(\text{Ketimpangan}_{\text{Kesehatan}} \times \text{Ketimpangan}_{\text{Pemberdayaan}} \times \text{Ketimpangan}_{\text{Pasar Tenaga Kerja}})}$ <p>Interpretasi Nilai IKG</p> <ul style="list-style-type: none"> Rentang Nilai: 0 sampai 1 (atau mendekati 1). Nilai 0: Kesetaraan gender sempurna. Nilai Semakin Tinggi: Menunjukkan ketimpangan gender semakin besar.
Interpretasi	Semakin terpenuhi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berarti nilai IKG-nya semakin kecil atau menurun, menunjukkan perbaikan kesetaraan gender di suatu wilayah karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar kerja semakin berkurang.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun berdasarkan jenis kelamin
Konsep	Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun
Definisi/Deskripsi	Anak yang menikah di bawah 19 tahun adalah pernikahan yang melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, di mana batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, baik secara resmi maupun tidak resmi, dan dapat dianggap sebagai Pernikahan Dini atau Perkawinan Anak karena calon mempelai belum matang secara fisik, mental, dan emosional. Meskipun demikian, ada pengecualian melalui dispensasi pengadilan karena alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, dengan persetujuan orang tua.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Anak
Rumus Perhitungan	Jumlah Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun berdasarkan jenis kelamin
Interpretasi	Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Konsep	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Definisi/Deskripsi	Banyaknya kasus yang ditangani terkait perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kasus
Rumus Perhitungan	Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Interpretasi	Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Konsep	Pasangan usia subur yang belum terlayani KB
Definisi	Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah PUS yang seharusnya KB tapi belum KB/Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x 100%
Interpretasi	Semakin rendah angka unmeet need, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Total Fertilyty Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran
Konsep	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan
Definisi	TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Anak
Rumus Perhitungan	$TFR = 5 \sum_{i=1}^5 ASFR_i$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak angka kelahiran
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
Konsep	Pasangan usia subur yang terlayani KB
Definisi	Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak PUS yang terlayani KB (modern)
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
Konsep	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
Definisi	Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Klasifikasi	-
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	<p>Rumus:</p> $mCPR = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah total PUS}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUS (Pasangan Usia Subur): Pasangan suami istri, di mana istri berusia 15-49 tahun. • Kontrasepsi Modern: Alat atau cara KB seperti IUD, Implan, Suntik, Pil, Kondom, MOW, dan MOP.
Interpretasi	Semakin tinggi Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) berarti semakin banyak pasangan usia subur (PUS) yang efektif menunda, menjarakkan, atau membatasi kehamilan dengan metode modern, menunjukkan keberhasilan program KB dalam meningkatkan akses dan penggunaan kontrasepsi modern seperti pil, suntik, kondom, IUD, implan, atau sterilisasi, yang berdampak positif pada kesehatan ibu dan anak serta perencanaan keluarga.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis Kelamin
Konsep	Keluarga Berencana
Definisi/Deskripsi	Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis Kelamin
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah peserta KB aktif mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi, dan tercapainya tujuan membentuk keluarga berkualitas, meski perlu diiringi analisis jenis kontrasepsi yang digunakan (modern atau tradisional) dan faktor pendukungnya.
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kader KB menurut Jenis kelamin
Konsep	Kader KB
Definisi/Deskripsi	Kader KB (Keluarga Berencana) adalah tenaga sukarela dari masyarakat yang dipilih untuk membantu pelaksanaan program KB di tingkat desa/kelurahan, seperti melakukan pendataan, penyuluhan, pendampingan, motivasi, dan koordinasi data kependudukan dan KB kepada petugas lapangan, dengan tujuan utama mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Kader KB menurut Jenis kelamin
Interpretasi	Semakin tinggi kader KB berarti semakin efektif mereka menjalankan perannya dalam menggerakkan program, yang berujung pada peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kualitas keluarga di tingkat masyarakat.
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Keluarga Resiko Stunting menurut Kecamatan
Konsep	Tengkes/Stunting
Definisi/Deskripsi	Bagian dari populasi keluarga yang memiliki anggota keluarga pendek atau sangat pendek yang disebabkan asupan nutrisi yang tidak memadai dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Keluarga
Rumus Perhitungan	Jumlah Keluarga Resiko Stunting menurut Kecamatan
Interpretasi	Semakin banyak keluarga Resiko Stunting berdampak pada masa depan yang kurang baik untuk keluarga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan
Konsep	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) adalah alat ukur komposit dari BKKBN untuk mengukur pemahaman dan sikap remaja serta keluarga terhadap isu-isu kependudukan, mencakup KB, pernikahan anak, mobilitas, dan lingkungan, serta digunakan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	$IKIK = \frac{SkorDimensi1 + SkorDimensi2 + \dots + SkorDimensiN}{N}$
Interpretasi	IKIK membantu pemerintah dan masyarakat memahami "kesiapan" sosial terhadap isu kependudukan, dari sekadar tahu menjadi peduli, hingga akhirnya beraksi nyata.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana
Konsep	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana
Definisi/Deskripsi	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana merupakan data informasi Program Bangga Kencana yang memenuhi kriteria dari aspek kelengkapan data, ketepatan waktu, keakuratan data (konsistensi dan akurasi data) dan pemanfaatan data
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	skor
Rumus Perhitungan	Indeks Kualitas Data & Informasi (Bangga Kencana) = $(\sum(\text{Bobot_IKK}_i * \text{Nilai_IKK}_i)) / \sum(\text{Bobot_IKK}_i)$
Interpretasi	kualitas data dan informasi yang digunakan dalam program tersebut semakin baik, sehingga menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan program, seperti pembangunan kualitas keluarga, pengasuhan remaja, dan penyiapan infrastruktur informasi kependudukan yang mendukung percepatan pencapaian target program Bangga Kencana.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Konsep	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Definisi/Deskripsi	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks yang mengukur sejauh mana pembangunan di Indonesia menempatkan penduduk sebagai pusatnya, dengan menilai lima dimensi: Partisipasi, Keberlanjutan, Pemihakan, Integrasi, dan Kesetaraan, menjadi alat ukur BKKBN untuk memastikan pembangunan berkualitas dan berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya infrastruktur.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	$IPBK = \sqrt[5]{I_{Partisipasi} \times I_{Keberlanjutan} \times I_{Pemihakan} \times I_{Integrasi} \times I_{Kesetaraan}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), artinya pembangunan di suatu wilayah semakin berpusat pada rakyat (people-centered development) dengan kualitas penduduk yang baik, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam kebijakan secara holistik, dilihat dari dimensi partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan penduduknya.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi
Konsep	kontrasepsi
Definisi/Deskripsi	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi adalah jumlah pasangan suami istri di mana istrinya berusia 15-49 tahun (atau di luar rentang usia ini tapi masih haid) yang aktif memakai salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik program pemerintah maupun non-program, diukur sebagai Peserta KB Aktif
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pasangan
Rumus Perhitungan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi
Interpretasi	Semakin banyak PUS menggunakan kontrasepsi mengindikasikan keberhasilan program KB dalam meningkatkan kesadaran dan akses, yang berdampak positif pada perencanaan keluarga, kesehatan ibu & anak (menurunkan stunting/kematian), serta pengendalian laju penduduk, meskipun faktor seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan suami memengaruhi pilihan metode kontrasepsi.
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Konsep	Kontrasepsi Jangka Panjang
Definisi/Deskripsi	Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pasangan suami istri di mana istrinya berusia 15-49 tahun (atau di luar rentang usia ini jika masih haid) yang memilih metode kontrasepsi efektif seperti IUD, Implan, atau Sterilisasi (Kontap) untuk menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan dalam waktu lama (lebih dari 2 tahun atau permanen) dengan efektivitas tinggi, bukan kontrasepsi sementara seperti pil atau suntik.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pasangan
Rumus Perhitungan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Interpretasi	Semakin banyak PUS menggunakan MKJP (IUD, Implan, Kontap) mengindikasikan peningkatan kesadaran akan efektivitas dan kemudahan MKJP, keberhasilan program KB pemerintah dalam edukasi dan penyediaan layanan, serta perubahan perilaku karena manfaat jangka panjang seperti tidak perlu repot setiap hari/bulan, namun tetap perlu waspada terhadap faktor penghambat (pengetahuan, mitos) yang masih ada dan memastikan aksesibilitas layanan.
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita
Konsep	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)
Definisi/Deskripsi	Nilai tengah dari usia saat pertama kali kawin pada perempuan berumur 15—49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin
Klasifikasi	-
Ukuran	Median
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	$MUKP = L + \left(\frac{50\% - PKL}{F_M} \right) \times C$ <ul style="list-style-type: none"> • <i>L</i>: Batas bawah kelas median (usia termuda di kelas median). • <i>PKL</i>: Persentase kumulatif sebelum kelas median. • <i>F_M</i>: Frekuensi kelas median (jumlah wanita di kelas median). • <i>C</i>: Lebar kelas (biasanya 5 tahun, sesuai kelompok umur).
Interpretasi	wanita cenderung menikah lebih matang, memiliki waktu lebih untuk pendidikan, perencanaan masa depan, dan membangun keluarga berkualitas, yang sejalan dengan program pendewasaan usia kawin BKKBN untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dengan mengurangi pernikahan usia dini yang berpotensi masalah.
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB
Konsep	Bina Keluarga Balita
Definisi/Deskripsi	Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB" adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi (dalam persen) dari total keluarga yang memiliki anak usia balita (0-5 tahun) di suatu wilayah yang berpartisipasi aktif dalam program Bina Keluarga Balita (BKB), sebuah program dari BKKBN untuk membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui pola asuh benar.
Klasifikasi	-
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	tingkat partisipasi dan kesadaran keluarga yang meningkat dalam upaya mengasuh dan mendidik anak usia dini secara benar, menghasilkan keluarga dengan pengetahuan pengasuhan lebih baik, peningkatan keterampilan orang tua, ikatan batin kuat, dan tumbuh kembang anak lebih optimal, yang berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)
Konsep	Bina Keluarga Remaja (BKR)
Definisi/Deskripsi	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi (dalam persen) keluarga yang memiliki remaja (usia 10-24 tahun) yang berpartisipasi aktif dalam program BKR, sebuah wadah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam mengasuh remaja, agar remaja siap menghadapi tantangan masa depan
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah keluarga anggota BKR} / \text{Jumlah keluarga sasaran BKR}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase keluarga Remaja yang ikut BKR maka semakin banyak keluarga yang mendapat layanan penyuluhan dalam hal pengasuhan
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)
Konsep	Pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)
Definisi/Deskripsi	persentase Pasangan Usia Subur (PUS, 15-49 tahun) yang subur dan aktif secara seksual namun tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka tidak ingin punya anak lagi (for spacing) atau ingin menunda kehamilan berikutnya (for limiting), yang berarti kebutuhan mereka akan KB tidak terpenuhi
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah PUS yang ingin menunda/tidak punya anak tapi tidak pakai KB} / \text{Jumlah PUS}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak persentase PUS (Pasangan Usia Subur 15-49 tahun) yang memiliki unmet need (tidak ingin hamil tapi tak ber-KB) menunjukkan kesenjangan besar antara keinginan dan praktik Keluarga Berencana (KB), yang berdampak pada peningkatan risiko kehamilan tak diinginkan, masalah kesehatan ibu dan bayi, potensi penurunan kualitas keluarga, serta lambatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
Periodesasi	Tribulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Konsep	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Definisi/Deskripsi	Persentase Peserta KB Aktif MKJP adalah perbandingan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terhadap total seluruh peserta KB aktif, menunjukkan porsi pengguna metode efektif seperti IUD, Implant, dan Kontap (sterilisasi) untuk menjarangkan atau menghentikan kehamilan dalam jangka waktu lama (tiga tahun hingga seumur hidup).
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peserta KB Aktif MKJP} = \left(\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Total}} \right) \times 100\%$ <p>Penjelasan Komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta KB Aktif MKJP: Total pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (seperti IUD, Implant, Steril). Jumlah Peserta KB Aktif Total: Total seluruh PUS yang menggunakan semua jenis metode kontrasepsi, baik jangka panjang maupun jangka pendek (pil, suntik, kondom).
Interpretasi	Semakin banyak persentase peserta KB aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan peningkatan adopsi metode KB yang efektif, minim kegagalan, dan tahan lama seperti IUD (spiral), Implant (susuk), dan Kontap (sterilisasi), yang mengindikasikan keberhasilan program KB dalam menunda/mengatur kehamilan secara berkelanjutan, mengurangi kehamilan tidak direncanakan, dan meningkatkan kesehatan ibu-anak karena jarak kelahiran ideal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) 12 bulan
Konsep	Kontrasepsi/Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) 12 bulan
Definisi/Deskripsi	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DCR) 12 bulan adalah persentase pengguna metode kontrasepsi yang berhenti menggunakannya dalam 12 bulan pertama pemakaian, diukur dari total episode pemakaian yang diamati dalam periode waktu tertentu (misalnya, 5 tahun) sebelum survei dilakukan, menunjukkan seberapa banyak wanita yang menghentikan penggunaan kontrasepsi dini. Indikator ini penting untuk melihat keberlanjutan penggunaan KB dan masalah terkait efek samping atau ketidakpuasan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$DCR\ 12\ Bulan\ (\%) = \frac{\text{Jumlah Pengguna yang Berhenti dalam 12 bulan}}{\text{Jumlah Kumulatif Pengguna Baru yang Memulai}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DCR) 12 bulan yang semakin tinggi artinya semakin banyak akseptor KB yang berhenti menggunakan metode kontrasepsi dalam 12 bulan pertama pemakaian, yang mengindikasikan potensi masalah seperti efek samping, ketidaknyamanan, atau kurangnya dukungan, sehingga meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan kegagalan program KB
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Konsep	Pelayanan Publik
Definisi/Deskripsi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Klasifikasi	4,51-5,00: pelayanan prima (A); 4,01-4,5: sangat baik (A-); 3,51-4,00: baik (B); 3,01-3,50: baik dengan catatan (B-); 2,51-3,00: cukup (C); 2,01-2,50: cukup dengan catatan (C-); 1,51-2,00: buruk (D); 1,01-1,50: sangat buruk (E); 0-1,00: gagal (F)
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{Nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas pelayanan publik menurut masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan kepemilikan KTP
Konsep	kepemilikan KTP
Definisi/Deskripsi	Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat menjadi KTP adalah dokumen identitas resmi penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai bukti diri yang berlaku di seluruh NKRI, berisi data kependudukan penting seperti NIK, nama, alamat, dan foto, serta berfungsi sebagai syarat utama berbagai urusan administratif, yang berlaku bagi penduduk berusia 17 tahun
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penduduk yang memiliki KTP} / \text{Jumlah penduduk wajib KTP}) \times 100\%$
Interpretasi	Tingginya cakupan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP telah memiliki identitas hukum yang sah, sehingga memudahkan akses terhadap layanan publik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan kepemilikan KIA
Konsep	Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Definisi/Deskripsi	Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah anak memiliki KIA} / \text{Jumlah anak wajib KIA}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), maka semakin baik tertib administrasi kependudukan serta semakin kuat perlindungan dan pemenuhan hak anak
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun
Konsep	kepemilikan akta kelahiran
Definisi/Deskripsi	1. Akta Kelahiran: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat kelahiran seseorang. Akta kelahiran mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, serta identitas orang tua. 2. Penduduk Usia 0 s.d. 17 Tahun: Semua individu yang berusia antara 0 hingga 17 tahun (sebelum mencapai ulang tahun ke-18) dalam suatu wilayah administratif tertentu. 3. Jumlah Total Penduduk Usia 0 s.d. 17 Tahun: Total jumlah individu yang berusia antara 0 hingga 17 tahun dalam wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. 4. Jumlah Penduduk Usia 0 s.d. 17 Tahun dengan Akta Kelahiran: Total jumlah individu berusia antara 0 hingga 17 tahun yang memiliki akta kelahiran resmi.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penduduk usia 0 s.d 17 tahun dengan akta kelahiran} / \text{Jumlah total penduduk usia 0 s.d 17 tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 sampai dengan 17 tahun, maka semakin baik tertib administrasi kependudukan serta semakin kuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status anak
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan penerbitan akta perkawinan
Konsep	penerbitan akta perkawinan
Definisi/Deskripsi	1. Buku Nikah/Akta Perkawinan: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat pernikahan pasangan suami istri. Buku nikah biasanya dikeluarkan oleh kantor urusan agama (untuk umat Muslim) atau kantor catatan sipil (untuk non-Muslim), sedangkan akta perkawinan adalah dokumen pencatatan sipil yang mencatat pernikahan tersebut. 2. Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan: Pasangan suami istri yang telah melaporkan pernikahan mereka kepada instansi pemerintah yang berwenang, seperti kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. 3. Jumlah Total Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan: Total jumlah pasangan suami istri yang telah melaporkan pernikahan mereka ke instansi pemerintah yang berwenang dalam periode waktu tertentu. 4. Jumlah Pasangan yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan: Total jumlah pasangan suami istri yang telah menerima buku nikah atau akta perkawinan resmi setelah melaporkan pernikahan mereka.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah pasangan yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan} / \text{Jumlah total pasangan yang perkawinannya dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan penerbitan akta perkawinan, maka semakin baik tertib administrasi kependudukan serta semakin kuat kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan pasangan suami istri
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan penerbitan akta perceraian
Konsep	penerbitan akta perceraian
Definisi/Deskripsi	1. Akta Perceraian: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pengadilan yang mencatat perceraian antara dua individu. Akta perceraian mencakup informasi seperti nama kedua pihak yang bercerai, tanggal perceraian, dan keputusan resmi pengadilan tentang perceraian. 2. Individu Pasangan yang Perceraianya Dilaporkan: Orang-orang yang telah melaporkan perceraianya ke instansi pemerintah atau pengadilan yang berwenang dan yang seharusnya menerima akta perceraian. 3. Jumlah Total Individu Pasangan yang Perceraianya Dilaporkan: Total jumlah individu (bukan pasangan) yang perceraianya telah dilaporkan dan dicatat dalam periode waktu tertentu. Setiap perceraian melibatkan dua individu, sehingga jika ada n laporan perceraian, maka jumlah total individu adalah $2 \times n$. 4. Jumlah Individu yang Memiliki Akta Perceraian: Total jumlah individu yang telah menerima akta perceraian resmi setelah melaporkan perceraian mereka.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah individu yang memiliki akta perceraian} / \text{Jumlah total individu pasangan yang perceraianya dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan penerbitan akta perceraian, maka semakin baik tertib administrasi kependudukan serta semakin kuat kepastian hukum atas status perkawinan setelah perceraian
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan penerbitan akta kematian
Konsep	penerbitan akta kematian
Definisi/Deskripsi	1. Akta Kematian: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat informasi tentang kematian seseorang. Akta kematian mencakup data seperti nama, tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebab kematian. 2. Peristiwa Kematian yang Dilaporkan: Kasus kematian yang telah dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau instansi lain yang mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Jumlah Total Peristiwa Kematian yang Dilaporkan: Total jumlah kematian yang telah dilaporkan dalam wilayah administratif tertentu dan periode waktu tertentu. 4. Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan: Total jumlah akta kematian yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang setelah menerima laporan kematian
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah akta kematian yang diterbitkan} / \text{Jumlah total peristiwa kematian yang dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan penerbitan akta kematian, maka semakin baik tertib administrasi kependudukan serta semakin kuat kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase perangkat daerah yang melakukan perjanjian kerjasama
Konsep	Pemanfaatan data kependudukan
Definisi/Deskripsi	proporsi perangkat daerah yang telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan instansi pengelola data kependudukan, dibandingkan dengan seluruh perangkat daerah yang membutuhkan dan berpotensi memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah perangkat daerah yang telah melakukan PKS} / \text{Jumlah seluruh perangkat daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak perangkat daerah yang melakukan perjanjian kerja sama data kependudukan, maka semakin baik tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas perangkat daerah
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah data kependudukan update SIAK terpusat
Konsep	data kependudukan
Definisi/Deskripsi	jumlah data kependudukan penduduk yang berhasil diperbarui, diverifikasi, dan tersinkronisasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat, sesuai dengan perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, sehingga data kependudukan menjadi mutakhir, akurat, dan valid secara nasional.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin besar jumlah data kependudukan yang ter-update pada SIAK terpusat, maka semakin baik tingkat kemutakhiran dan kualitas data kependudukan.
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Lansia menurut Jenis Kelamin
Konsep	Lanjut Usia
Definisi/Deskripsi	Lanjut Usia adalah Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak lanjut usia yang terdata, maka semakin nyata kesiapan pemerintah dalam melayani kebutuhan lanjut usia secara tepat dan berkelanjutan
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Disabilitas menurut Jenis Kelamin
Konsep	Disabilitas
Definisi/Deskripsi	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak penyandang disabilitas yang terdata, maka semakin jelas gambaran kondisi riil kelompok disabilitas di masyarakat. Pendataan yang lengkap memungkinkan pemerintah merancang kebijakan, program, dan layanan yang lebih tepat sasaran
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
Konsep	penduduk
Definisi/Deskripsi	penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Data penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Informasi ini menggambarkan struktur demografi masyarakat yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, penentuan kebutuhan layanan publik, serta perumusan kebijakan yang responsif gender.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penduduk menurut kelompok umur
Konsep	penduduk
Definisi/Deskripsi	penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Klasifikasi	kelompok umur
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Data penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan struktur usia penduduk dalam suatu wilayah, yang menggambarkan proporsi penduduk usia anak, usia produktif, dan lanjut usia.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai nomor induk kependudukan
Konsep	kepemilikan NIK
Definisi/Deskripsi	proporsi jumlah penduduk berusia 17 tahun ke atas yang telah memiliki NIK yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum pada berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai nomor induk kependudukan} / \text{jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai NIK, maka semakin baik tertib administrasi kependudukan dan semakin luas akses penduduk terhadap berbagai layanan publik.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Konsep	pemanfaatan data kependudukan
Definisi/Deskripsi	total instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga lain yang telah menjalin kerja sama dan secara aktif menggunakan data kependudukan nasional (berbasis NIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	lembaga
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin besar jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik, maka semakin luas pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pelayanan yang akurat dan terintegrasi
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Konsep	pemanfaatan data kependudukan
Definisi/Deskripsi	total instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga lain yang secara resmi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman terkait pemanfaatan data kependudukan nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	lembaga
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin besar jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional, maka semakin kuat komitmen integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pedoman/kebijakan/SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun
Konsep	Dokumen kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan
Definisi/Deskripsi	total dokumen pedoman, kebijakan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh instansi terkait sebagai acuan pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan
Klasifikasi	jenis dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak pedoman, kebijakan, dan SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun, maka semakin jelas dan terstandar pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikembangkan dan diintegrasikan
Konsep	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
Definisi/Deskripsi	total pengembangan modul, fitur, atau aplikasi pendukung SIK serta sistem informasi lain yang telah dibangun, disempurnakan, dan diintegrasikan dengan SIK guna mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemutakhiran data, dan pelayanan publik secara efektif dan terintegrasi
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	sistem
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak SIK yang dikembangkan dan diintegrasikan, maka semakin tinggi tingkat integrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Konsep	penduduk
Definisi/Deskripsi	penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Klasifikasi	pendidikan terakhir
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Data penduduk berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan tingkat dan sebaran capaian pendidikan penduduk dalam suatu wilayah
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Kab Nganjuk Berdasarkan KK
Konsep	penduduk
Definisi/Deskripsi	total penduduk yang tercatat dan terdaftar dalam dokumen Kartu Keluarga pada wilayah Kabupaten Nganjuk. Penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Jumlah penduduk berdasarkan KK menunjukkan gambaran riil penduduk yang tercatat secara administratif di Kabupaten Nganjuk. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, penentuan kebutuhan layanan publik, penyaluran bantuan sosial, serta penyusunan kebijakan kependudukan.
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penduduk Umur 0-19
Konsep	penduduk
Definisi/Deskripsi	total penduduk yang berusia sejak lahir sampai dengan 19 tahun yang tercatat dalam data administrasi kependudukan pada suatu wilayah
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Jumlah penduduk umur 0–19 tahun menunjukkan besaran generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan di masa depan. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan anak, serta sarana dan prasarana pendukung tumbuh kembang.
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Kualitas Pemberdayaan Desa
Konsep	Kualitas Pemberdayaan Desa
Definisi/Deskripsi	indikator yang mengukur tingkat keberhasilan atau efektivitas program pemberdayaan masyarakat di desa, berdasarkan capaian hasil kegiatan, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah desa yang memenuhi standar kualitas pemberdayaan} / \text{jumlah desa yang menjadi sasaran pemberdayaan}) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan Program pemberdayaan desa berjalan efektif, masyarakat terlibat aktif, kapasitas kelembagaan desa meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terangkat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Desa Swasembada
Konsep	Desa Swasembada
Definisi/Deskripsi	Desa Swasembada adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau komoditas penting secara mandiri melalui produksi lokal, tanpa tergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar desa
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah desa yang mencapai swasembada} / \text{jumlah seluruh desa yang menjadi sasaran}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok, menunjukkan efektivitas program pemberdayaan desa, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal yang kuat.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase BUM Desa aktif
Konsep	BUM Desa
Definisi/Deskripsi	Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, berstatus aktif
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah BUM Desa aktif} / \text{jumlah seluruh BUM desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak BUM Desa Bersama yang aktif, maka semakin banyak peluang yang tercipta untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa yang lembaganya diberdayakan
Konsep	Lembaga desa yang diberdayakan
Definisi/Deskripsi	proporsi desa yang telah melakukan pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani, kelompok usaha bersama, atau lembaga kemasyarakatan lain, agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa yang lembaganya diberdayakan} / \text{jumlah desa keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin besar persentasenya, maka semakin banyak desa yang melibatkan lembaga desanya untuk aktif serta dalam pembangunan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penetapan dan penegasan batas desa
Konsep	penetapan dan penegasan batas desa
Definisi/Deskripsi	Penetapan dan penegasan batas desa adalah proses untuk menentukan batas wilayah administrasi desa secara hukum dan teknis. Batas desa ini ditandai dengan koordinat-koordinat yang berada di permukaan bumi.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah desa yang telah menyelenggarakan penetapan dan penegasan batas desa} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase desa yang telah menyelenggarakan penetapan dan penegasan batas desa, maka semakin jelas dan pasti status wilayah administratif desa secara hukum dan geografis.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP
Konsep	partisipasi masyarakat
Definisi/Deskripsi	indikator yang mengukur proporsi masyarakat desa atau warga yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah, penyampaian aspirasi, hingga penyusunan RKP desa.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentasenya, semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat/berpartisipasi pada perencanaan pembangunan di desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa yang telah menyelenggarakan administrasi tata kelola pemerintahan desa sesuai standart
Konsep	Penyelenggaraan administrasi tata kelola pemerintahan desa
Definisi/Deskripsi	perbandingan antara jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan, pedoman, dan standar yang berlaku (meliputi administrasi umum, keuangan, pembangunan, dan kemasayarakatan) dengan jumlah seluruh desa yang menjadi sasaran penilaian
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa dengan administrasi tata kelola pemerintahan desa sesuai standart} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase desa yang telah menyelenggarakan administrasi tata kelola pemerintahan desa sesuai standart, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa yang posyandunya melaksanakan SPM 6 Bidang layanan
Konsep	Pelaksanaan SPM 6 Bidang layanan pada posyandu
Definisi/Deskripsi	desa yang memiliki posyandu aktif dan telah menyelenggarakan pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal pada 6 bidang layanan, yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara terpadu sesuai regulasi yang berlaku.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa yang posyandunya melaksanakan SPM 6 bidang layanan} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak desa yang posyandunya melaksanakan SPM 6 bidang layanan, maka semakin luas pemenuhan standar pelayanan dasar di tingkat desa.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Desa Membangun (IDM)
Konsep	Pembangunan Nasional, Desa
Definisi/Deskripsi	Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$1/3(\text{Indeks Ketahanan Sosial} + \text{Indeks Ketahanan Ekonomi} + \text{Indeks Ketahanan Lingkungan})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Desa Membangun, maka semakin baik tingkat kemandirian dan kualitas pembangunan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Definisi/Deskripsi	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang dipilih atau ditetapkan untuk membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan, fasilitasi, dan penggerakan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Desa/Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin optimal peran KPMD, maka semakin efektif proses pemberdayaan masyarakat, meningkatnya keterlibatan warga dalam kegiatan desa, serta semakin kuatnya kelembagaan dan kemandirian desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa beserta kodenya
Konsep	desa
Definisi/Deskripsi	desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Interpretasi	data desa berserta kode referensi wilayah administrasi
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa yang Datanya Terpublikasi Secara Online
Konsep	Publikasi Data Desa
Definisi/Deskripsi	desa yang telah mempublikasikan data kependudukan, data ekonomi, data layanan publik, atau profil desa melalui media digital atau platform online resmi, seperti portal pemerintah, website desa, dashboard layanan publik, atau sistem informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Desa yang datanya terpublikasi secara online mencerminkan tingkat keterbukaan informasi dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah RT/RW (Kabupaten)
Konsep	RT/RW
Definisi/Deskripsi	RT (Rukun Tetangga) adalah Satuan organisasi masyarakat paling kecil yang terdiri atas sejumlah kepala keluarga dalam satu lingkungan permukiman. RW (Rukun Warga) adalah Gabungan dari beberapa RT dalam satu wilayah yang lebih luas.
Klasifikasi	kecamatan, desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	RT/RW
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin aktif dan berfungsi RT/RW, semakin baik kondisi sosial kemasyarakatan, ketahanan lingkungan, dan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan desa atau kelurahan.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah seluruh desa/kelurahan
Konsep	desa/kelurahan
Definisi/Deskripsi	desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah Daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa/kelurahan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	desa/kelurahan yang berfungsi dengan baik menunjukkan kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan, memberdayakan masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta melaksanakan perencanaan dan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas wilayah desa
Konsep	Luas wilayah desa
Definisi/Deskripsi	Luas wilayah desa adalah besaran area geografis yang menjadi batas administrasi suatu desa, yang mencakup seluruh wilayah daratan dan/atau perairan (jika ada) sesuai dengan penetapan batas desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil penetapan batas wilayah oleh pemerintah yang berwenang
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	km2 atau ha
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	desa dengan wilayah yang lebih luas umumnya memiliki tantangan yang lebih besar dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan wilayah, dan pemerataan pembangunan, sementara luas wilayah yang lebih kecil cenderung memudahkan koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
Konsep	tingkat kemajuan suatu kawasan perdesaan
Definisi/Deskripsi	nilai indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan dan kemandirian kawasan perdesaan yang dibentuk oleh beberapa desa secara fungsional dan terintegrasi, berdasarkan capaian indikator-indikator pembangunan yang mencerminkan kualitas pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, konektivitas wilayah, serta pengelolaan sumber daya dan lingkungan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kawasan perdesaan yang semakin berkembang, terintegrasi, dan berdaya saing, dengan akses pelayanan dasar yang lebih baik, aktivitas ekonomi yang produktif, infrastruktur yang memadai, serta keterpaduan antar desa yang kuat; sebaliknya
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Nasional
Konsep	BUMDesa dan BUMDesa Bersama
Definisi/Deskripsi	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih melalui kerja sama antar desa untuk mengelola usaha, pelayanan, dan/atau aset secara kolektif guna meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan
Klasifikasi	Desa, kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin aktif, produktif, dan berkelanjutan pengelolaan BUM Desa maupun BUM Desa Bersama, semakin kuat kemandirian ekonomi desa, integrasi ekonomi kawasan, serta kontribusinya terhadap pembangunan perdesaa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Masyarakat Desa yang Diberi Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan
Konsep	Pemberdayaan Masyarakat Desa
Definisi/Deskripsi	Banyaknya orang yang tinggal di desa yang diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai kompetensi tertentu.
Klasifikasi	Jenis Pelatihan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak masyarakat yang memperoleh pelatihan menunjukkan semakin luas upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi warga dalam mendukung kemandirian ekonomi, peningkatan produktivitas, serta partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Konsep	tenaga kerja BUMDes
Definisi/Deskripsi	total orang yang terlibat secara aktif dalam kegiatan operasional dan pengelolaan BUMDes, baik sebagai pengurus, pengelola, maupun pekerja, yang bekerja secara tetap atau tidak tetap sesuai dengan unit usaha yang dijalankan, dalam periode waktu tertentu.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar jumlah tenaga kerja yang terserap menunjukkan semakin berkembangnya skala dan aktivitas usaha BUMDes
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama
Konsep	BUMDesa/ BUMDesa Bersama
Definisi/Deskripsi	jumlah unit usaha yang dijalankan, ragam bidang usaha sesuai potensi dan kebutuhan desa atau kawasan perdesaan (seperti jasa, perdagangan, pengelolaan aset, pariwisata, pertanian, atau keuangan), serta status badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak dan beragam jenis usaha yang dikelola secara legal menunjukkan semakin kuatnya kapasitas manajerial, kepastian hukum, serta kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa atau kawasan perdesaan secara profesional dan berkelanjutan.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Omset BUMDesa/ BUMDesa Bersama
Konsep	Omset BUMDesa/ BUMDesa Bersama
Definisi/Deskripsi	total nilai pendapatan kotor yang diperoleh dari seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi biaya operasional dan kewajiban lainnya, yang mencerminkan besarnya aktivitas dan perputaran usaha desa.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar nilai omzet menunjukkan semakin tingginya volume usaha, efektivitas pengelolaan, serta kemampuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa atau kawasan perdesaan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peringkat BUMDes
Konsep	Peringkat BUMDes
Definisi/Deskripsi	klasifikasi terhadap kinerja dan tingkat perkembangan BUM Desa berdasarkan indikator tertentu, seperti kelembagaan, tata kelola, jenis dan skala usaha, kinerja keuangan, kontribusi terhadap perekonomian desa, serta keberlanjutan usaha
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Peringkat
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	peringkat yang lebih tinggi menunjukkan BUM Desa yang dikelola secara profesional, sehat secara kelembagaan dan keuangan, memiliki usaha yang produktif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kontribusi BUMDesa/ BUMDesa Bersama terhadap PADes
Konsep	kontribusi BUMDesa/ BUMDesa Bersama terhadap PADes
Definisi/Deskripsi	ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan pendapatan yang berasal dari BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terhadap total PADes dalam satu periode anggaran tertentu.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah pendapatan yang disetorkan BUMDesa/ BUMDesa Bersama ke PADes} / \text{total PADes}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin kuat peran BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menghasilkan pendapatan desa, mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah BUMDesa berdasarkan Klasifikasi
Konsep	BUMDesa
Definisi/Deskripsi	banyaknya BUM Desa yang dikelompokkan menurut tingkat perkembangan dan kinerjanya dalam periode tertentu, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang, seperti aspek kelembagaan, tata kelola, jenis dan skala usaha, kinerja keuangan, serta keberlanjutan usaha.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	BUM Desa pada klasifikasi yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya kapasitas pengelolaan, kesehatan usaha, dan kontribusi BUM Desa terhadap perekonomian desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah BumdesMa hasil transformasi UPK eks PNPM
Konsep	BumdesMa hasil transformasi UPK eks PNPM
Definisi/Deskripsi	banyaknya Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dibentuk melalui proses pengalihan dan penyesuaian kelembagaan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, untuk melanjutkan pengelolaan dana bergulir, aset, dan kegiatan usaha secara legal, profesional, dan berkelanjutan
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	keberadaannya mencerminkan keberhasilan transformasi kelembagaan dari program berbasis bantuan menjadi badan usaha yang sah, mandiri, dan akuntabel, serta berperan dalam menjaga keberlanjutan dana bergulir
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah desa berdasarkan Indeks Desa
Konsep	klasifikasi desa berdasarkan indeks desa
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan nilai Indeks Desa. Klasifikasi indeks desa yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak desa berada pada kategori berkembang, maju, dan mandiri menunjukkan keberhasilan pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa berdasarkan Klasifikasi Kondisi Desa
Konsep	klasifikasi desa berdasarkan kondisi desa
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan tingkat kondisi dan perkembangan desa yang dinilai melalui indikator sosial, ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar, dan lingkungan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam periode penilaian tertentu
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak desa berada pada klasifikasi kondisi yang lebih baik menunjukkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, efektivitas pembangunan desa, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa Berdasarkan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi
Konsep	klasifikasi desa berdasarkan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kelengkapan dan kepatuhan terhadap dokumen administrasi pemerintahan desa yang wajib dimiliki dan disusun
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak desa yang memenuhi kelengkapan dokumen administrasi menunjukkan semakin baiknya kapasitas kelembagaan, tertib administrasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan status perkembangan
Konsep	klasifikasi desa berdasarkan status perkembangan
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa dan/atau kelurahan yang dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sesuai tingkat perkembangan wilayah dan kapasitasnya, yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian indikator sosial, ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan, dalam periode penilaian tertentu
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	meningkatnya jumlah desa/kelurahan pada status perkembangan yang lebih tinggi menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan entry/update profil desa/kelurahan
Konsep	desa/kelurahan yang melakukan entry/update profil desa/kelurahan
Definisi/Deskripsi	banyaknya desa dan/atau kelurahan yang melakukan pengisian dan/atau pemutakhiran data profil desa/kelurahan ke dalam sistem yang ditetapkan oleh pemerintah
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak desa/kelurahan yang melakukan pemutakhiran profil menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data yang akurat dan mutakhir, yang menjadi dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Konsep	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Definisi/Deskripsi	Kelompok masyarakat yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah kelompok warga atau organisasi masyarakat di desa/kelurahan yang memanfaatkan dan mengimplementasikan teknologi sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan setempat, untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup masyarakat.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	kelompok masyarakat
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak kelompok yang menerapkan TTG menunjukkan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengadopsi solusi teknologi yang efektif, berbiaya terjangkau, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan lokal
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Jatim Puspa
Konsep	Penerima Manfaat Program Jatim Puspa
Definisi/Deskripsi	banyaknya keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Program Jatim Puspa sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Jatim Puspa adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha perempuan dan penguatan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga prasejahtera atau rentan, melalui dukungan permodalan, pendampingan usaha, dan pengembangan kapasitas kewirausahaan agar keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	kelompok masyarakat
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin besar jumlah keluarga penerima manfaat menunjukkan semakin luas cakupan intervensi program dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga rentan, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kerjasama Desa
Konsep	kerjasama Desa
Definisi/Deskripsi	Kerjasama antar desa meliputi pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan sumber daya alam bersama, pengembangan ekonomi bersama, dan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	kerjasama
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak kerja sama yang terjalin menunjukkan semakin terbukanya desa terhadap kemitraan strategis, meningkatnya kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas akses pembiayaan dan teknologi, serta memperkuat efektivitas pelayanan publik dan pembangunan desa secara berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah LPMD/K dan PKK
Konsep	kerjasama Desa
Definisi/Deskripsi	banyaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terbentuk dan aktif di desa dan/atau kelurahan
Klasifikasi	Kecamatan, Desa/Kelurahan
Ukuran	Jumlah
Satuan	organisasi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak dan berfungsinya LPMD/K dan PKK menunjukkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, penguatan peran keluarga, serta efektivitas sinergi antara pemerintah dan masyarakat
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah SDM Pemerintahan Desa
Konsep	SDM Pemerintahan Desa
Definisi/Deskripsi	total aparatur dan tenaga pendukung yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi kepala desa, perangkat desa, serta unsur pelaksana lainnya sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa
Klasifikasi	Kecamatan, Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	kecukupan dan komposisi SDM yang memadai mencerminkan kemampuan desa dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan administrasi pemerintahan, mengelola pembangunan, serta memberdayakan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang terfasilitasi
Konsep	Usaha Ekonomi Masyarakat
Definisi/Deskripsi	banyaknya unit usaha milik masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, yang memperoleh dukungan atau fasilitasi dari pemerintah atau pihak terkait, berupa pendampingan, pelatihan, bantuan permodalan, akses pemasaran, perizinan, atau dukungan sarana dan prasarana, dalam periode waktu tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	usaha
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak usaha yang difasilitasi menunjukkan semakin luas upaya pemerintah dalam mendorong penguatan usaha mikro dan ekonomi lokal
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai investasi daerah
Konsep	Investasi
Definisi/Deskripsi	Besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	nilai realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) dalam satu tahun/periode pelaporan di wilayah daerah
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan iklim investasi yang kondusif dan daya tarik daerah yang baik Nilai rendah mengindikasikan perlunya perbaikan kebijakan, infrastruktur, atau pelayanan investasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal
Konsep	Layanan
Definisi/Deskripsi	Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang berwenang dalam periode waktu tertentu, sebagai bentuk fasilitasi dan pelayanan kepada pelaku usaha penanaman modal.
Klasifikasi	-
Ukuran	Layanan
Satuan	Kuantitatif
Rumus Perhitungan	Jumlah Perizinan Penanaman Modal + Jumlah Non Perizinan Penanaman Modal
Interpretasi	Mengetahui tingkat aktivitas pelayanan penanaman modal serta minat dan realisasi administrasi investasi di daerah
Periodesasi	Triwulanan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik
Konsep	Pelayanan Perizinan
Definisi/Deskripsi	Untuk mengukur seberapa besar proporsi izin usaha industri yang berhasil diterbitkan dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan usaha industri.
Klasifikasi	-
Ukuran	Layanan
Satuan	Jenis Perizinan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perizinan yang didelegasikan dan diproses melalui PTSP Prima berbasis elektronik, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu, peningkatan efisiensi birokrasi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodisasi	Semester
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Konsep	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Definisi/Deskripsi	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai ekonomi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	pelaku usaha
Rumus Perhitungan	$((\text{PDRB industri tahun ke } n - \text{PDRB industri tahun ke } n-1) / \text{PDRB industri tahun ke } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Pertumbuhan positif pada sektor ini mengindikasikan bahwa perputaran barang dan jasa perdagangan semakin meningkat, seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan jasa perawatannya.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
Konsep	Pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam kabupaten
Definisi/Deskripsi	tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten nganjuk dibandingkan tahun sebelumnya
Klasifikasi	Pelaku Usaha
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n-1) / \text{Jumlah IKM tahun } n-1 \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak persentasenya, semakin banyak industri kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan omzet sektor perdagangan
Konsep	Omzet
Definisi/Deskripsi	Uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual berupa pendapatan kotor yang belum dikurangi pembayaran beban atau biaya-biaya lainnya dalam bisnis.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$((\text{jumlah omzet sektor perdagangan tahun } n - \text{jumlah omzet sektor perdagangan tahun } n-1) / \text{jumlah omzet sektor perdagangan tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	semakin besar persentasenya, semakin meningkat omzet sektor perdagangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
Konsep	informasi industri secara lengkap dan terkini
Definisi/Deskripsi	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini berarti adanya akses terhadap data, berita, tren, dan analisis industri yang komprehensif, akurat, dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi operasional maupun kebijakan.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	-
Rumus Perhitungan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Interpretasi	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini menunjukkan bahwa data dan informasi terkait kondisi, potensi, serta perkembangan industri telah tersedia secara menyeluruh, akurat, dan diperbarui secara berkala.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Konsep	kinerja realisasi pupuk
Definisi/Deskripsi	Kinerja Realisasi Pupuk adalah tingkat pencapaian penyaluran dan penggunaan pupuk dibandingkan dengan rencana, target, atau alokasi yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingginya realisasi pupuk mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam sistem penyediaan pupuk, serta menunjukkan bahwa kebutuhan petani terhadap sarana produksi pertanian dapat terpenuhi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Konsep	Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Definisi/Deskripsi	Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku adalah peralatan metrologi legal yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau pelayanan publik, telah diuji dan disahkan oleh petugas berwenang, serta masih dalam masa berlaku tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingginya realisasi pupuk mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam sistem penyediaan pupuk, serta menunjukkan bahwa kebutuhan petani terhadap sarana produksi pertanian dapat terpenuhi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
Konsep	pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
Definisi/Deskripsi	pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan adalah untuk menjamin ketersediaan barang, menjaga stabilitas harga, memperlancar arus distribusi, mendukung pelaku usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>
Interpretasi	Pengelolaan sarana distribusi yang efektif memastikan bahwa fasilitas perdagangan beroperasi secara optimal, tertib, dan terawat, sehingga mampu menekan biaya distribusi, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung keterjangkauan harga. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap penguatan sistem perdagangan daerah, peningkatan daya saing pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan
Konsep	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi/Deskripsi	ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Industri Pengolahan yang dihitung berdasarkan Harga Konstan (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK) pada tahun dasar tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{((\text{PDRB perdagangan tahun ke } n - \text{PDRB perdagangan tahun ke } n-1)/\text{PDRB perdagangan tahun ke } n-1) \times 100\%}{}$
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah berdasarkan jenis kelamin
Konsep	Pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam kabupaten
Definisi/Deskripsi	Indutri kecil Biasanya didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, omset tahunan, atau nilai aset. Industri Menengah: Biasanya didefinisikan sebagai industri yang lebih besar dari industri kecil tetapi lebih kecil dari industri besar.
Klasifikasi	industri kecil dan menengah, jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	pelaku usaha
Rumus Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n-1) / \text{Jumlah IKM tahun } n-1}{}$ x 100%
Interpretasi	semakin banyak persentasenya, semakin banyak industri kecil dan menengah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pasar tradisional/rakyat
Konsep	Pasar Tradisional / Pasar Rakyat
Definisi/Deskripsi	Pasar Tradisional / Pasar Rakyat adalah sarana perdagangan tempat terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, BUMDes, atau masyarakat, dengan sistem tawar-menawar langsung antara penjual dan pembeli.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pasar Tradisional/ Pasar Rakyat
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak jumlah pasar tradisional /rakyat maka tingginya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan ekonomi lokal, terutama bagi pedagang kecil, UMKM, dan produsen lokal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data perusahaan industri berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan
Konsep	Data perusahaan industri berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan
Definisi/Deskripsi	Industri berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan adalah data atau pengelompokan perusahaan industri yang diklasifikasikan menurut besar-kecilnya usaha, dengan satuan penghitungan berupa jumlah perusahaan (unit usaha).
Klasifikasi	Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Besar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perusahaan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian
Konsep	verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian
Definisi/Deskripsi	Verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara teknis yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk memastikan bahwa kegiatan usaha industri telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perusahaan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kegiatan usaha yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi standar, menunjukkan meningkatnya kualitas tata kelola industri, kepatuhan regulasi, serta perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha industri yang tertib, aman, dan berdaya saing.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan
Konsep	Tenaga Kerja Industri Pengolahan
Definisi/Deskripsi	Tenaga Kerja Industri Pengolahan adalah jumlah orang yang bekerja pada kegiatan usaha di sektor industri pengolahan, yaitu kegiatan yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang mentah menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Klasifikasi	Tenaga Kerja
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tenaga kerja pada sektor ini menunjukkan adanya pertumbuhan usaha industri, perluasan kapasitas produksi, dan meningkatnya permintaan terhadap produk industri.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Unit Usaha Industri Pengolahan
Konsep	Unit Usaha Industri Pengolahan
Definisi/Deskripsi	Unit Usaha Industri Pengolahan adalah satu kesatuan tempat atau kegiatan usaha yang melakukan proses pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang mentah menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah, baik menggunakan tenaga manusia, mesin, maupun teknologi tertentu.
Klasifikasi	Unit Usaha/ Perusahaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perusahaan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak unit usaha industri pengolahan menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi, tumbuhnya wirausaha baru, serta bertambahnya kapasitas produksi dan nilai tambah sektor industri.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Produksi Industri Pengolahan
Konsep	Produksi Industri Pengolahan
Definisi/Deskripsi	Produksi Industri Pengolahan adalah jumlah barang atau output yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan melalui proses pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang mentah menjadi barang jadi atau barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak nilai produksi industri pengolahan menunjukkan adanya pertumbuhan volume produksi, peningkatan kualitas produk, diversifikasi hasil industri, serta membaiknya permintaan pasar.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Konsep	Operasi Pasar
Definisi/Deskripsi	Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat, terutama pada saat terjadi kenaikan harga, kelangkaan barang, atau gangguan distribusi.
Klasifikasi	jumlah titik lokasi
Ukuran	kegiatan
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak Pelaksanaan Operasi Pasar semakin efektif nya kebijakan intervensi pemerintah dalam merespons kondisi pasar yang tidak stabil, seperti kenaikan harga akibat gangguan pasokan, inflasi musiman, atau meningkatnya permintaan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota
Konsep	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota
Definisi/Deskripsi	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah saran, masukan, dan penilaian teknis yang diberikan oleh perangkat daerah atau instansi berwenang (umumnya urusan perindustrian di tingkat provinsi/pusat) terhadap rancangan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan, standar, dan arah kebijakan pembangunan industri.
Klasifikasi	-
Ukuran	Dokumen
Satuan	Kualitas
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin baik kualitas dan tingkat tindak lanjut rekomendasi teknis, mencerminkan efektivitas koordinasi lintas pemerintahan, ketepatan arah pengembangan industri, dan kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase koperasi sehat
Konsep	Koperasi
Definisi	Perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah koperasi sehat tahun } n - \text{jumlah koperasi sehat tahun } n-1) / \text{jumlah koperasi sehat tahun } n-1 \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentasenya, semakin banyak koperasi sehat yang artinya semakin banyak koperasi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan kelembagaannya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro
Konsep	Usaha Mikro
Definisi	Usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	presentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$\text{Volume usaha mikro tahun } n - \text{volume usaha mikro tahun } n-1) / \text{volume usaha mikro tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentasenya, semakin besar volume usaha mikro (rata-rata pendapatan/omzet) yang artinya pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan ekonomi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase koperasi aktif
Konsep	Koperasi aktif
Definisi	Koperasi Aktif adalah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	presentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah koperasi aktif} / \text{jumlah koperasi keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	keaktifan koperasi menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal
Konsep	usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal
Definisi	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal adalah ukuran yang menunjukkan proporsi usaha Mikro yang sebelumnya beroperasi secara informal dan telah beralih menjadi entitas formal dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	presentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal} / \text{jumlah pelaku usaha mikro informal keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin meningkatnya jumlah usaha mikro yang bertransformasi ke sektor formal menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas, akses yang lebih luas dan kualitas tata kelola usaha mikro semakin membaik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pendataan Jumlah UMKM Kabupaten Nganjuk
Konsep	Jumlah UMKM
Definisi/Deskripsi	Jumlah UMKM berdasarkan survei pendataan UMKM di Kabupaten Nganjuk (UMKM yang terdata oleh Dinas Koperasi UM)
Klasifikasi	Kecamatan, jenis usaha
Ukuran	Jumlah
Satuan	Usaha
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Proses pembaruan informasi terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap akurat, relevan, dan sesuai dengan kondisi terkini.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Fasilitas Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri
Konsep	Fasilitas Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri
Definisi/Deskripsi	proporsi koperasi yang menerima bantuan dalam bentuk pembinaan, bimbingan teknis, atau pengembangan kapasitas dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu
Klasifikasi	pembinaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Usaha
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	kegiatan fasilitasi pembinaan usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif serta berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan
Konsep	Koperasi Modern
Definisi/Deskripsi	Koperasi modern yang dikembangkan merupakan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi digital, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan daya saing usaha
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	usaha
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak jumlah koperasi modern yang dikembangkan maka akan mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan anggota dan daya saing usaha
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi
Konsep	Koperasi yang berbadan hukum
Definisi/Deskripsi	koperasi yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP) dibandingkan dengan total koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak koperasi yang memiliki badan hukum, semakin kuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitas Factory Sharing
Konsep	koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitas Factory Sharing
Definisi/Deskripsi	Koperasi yang memperoleh dukungan fasilitas factory sharing adalah koperasi yang difasilitasi untuk mengakses, menggunakan, dan mengelola sarana produksi bersama (pabrik, mesin, peralatan, dan infrastruktur pendukung) secara kolektif guna meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha, dan daya saing anggota koperasi.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak koperasi yang mendapat dukungan fasilitas Factory Sharing maka akan meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha dan daya saing anggota koperasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan
Konsep	koperasi yang mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan
Definisi/Deskripsi	koperasi yang memperoleh dukungan atau kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan maupun non-keuangan melalui program fasilitas pemerintah dan/atau pemangku kepentingan terkait. Fasilitas tersebut dapat berupa pendampingan pengajuan pembiayaan, penjaminan kredit, subsidi bunga/margin, kemitraan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, serta akses ke skema pembiayaan khusus bagi koperasi.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak koperasi yang mendapat dukungan fasilitas akses pembiayaan maka akan meningkatkan permodalan koperasi, memperkuat kapasitas usaha, serta mendorong keberlanjutan dan daya saing koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi anggota dan masyarakat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi yang mendapatkan Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi
Konsep	koperasi yang mendapatkan Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi
Definisi/Deskripsi	indikator yang menggambarkan banyaknya koperasi sektor pangan yang telah memperoleh fasilitasi, pendampingan, atau intervensi program industrialisasi berbasis rantai pasok produksi secara terintegrasi.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak koperasi yang mendapat Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi maka akan meningkatkan nilai tambah produk pangan anggota, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis koperasi melalui pendekatan industrialisasi dan integrasi rantai pasok produksi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi Pangan Modern
Konsep	koperasi yang mendapatkan Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi Pangan Modern
Definisi/Deskripsi	jumlah koperasi yang telah melaksanakan atau menerima dukungan pembaruan dan inovasi produk melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas, diversifikasi produk, pengembangan kemasan, sertifikasi mutu, serta adaptasi terhadap kebutuhan dan preferensi pasar modern.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak koperasi yang melaksanakan atau menerima dukungan pembaruan dan inovasi produk pangan modern maka memperkuat posisi koperasi dalam rantai nilai pangan, serta meningkatkan kontribusi koperasi terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan anggota, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah
Konsep	koperasi syariah
Definisi/Deskripsi	pemberian bimbingan bantuan perkuat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak jumlah pembinaan dan pengembangan maka semakin baik koperasi Syariah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Daftar Usaha Makanan/Minuman
Konsep	Usaha makanan/minuman
Definisi/Deskripsi	kumpulan data terstruktur yang memuat informasi mengenai pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan/atau penjualan makanan dan minuman.
Klasifikasi	jenis makanan/minuman
Ukuran	jenis usaha
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	data usaha pangan dapat dikelola secara sistematis, akurat, dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah keanggotaan koperasi
Konsep	anggota koperasi
Definisi/Deskripsi	Jumlah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota. Anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
Klasifikasi	wilayah, jenis kelamin
Ukuran	total
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak jumlah keanggotaan koperasi maka akan memperkuat basis usaha bersama dan meningkatkan legitimasi kelembagaan. sebaliknya jika semakin menurun jumlah keanggotaanya mengindikasikan perlunya perbaikan layanan, transparansi, dan relevansi program koperasi terhadap kebutuhan anggota.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Koperasi
Konsep	koperasi
Definisi/Deskripsi	Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Mengukur perkembangan dan sebaran koperasi di tingkat nasional, regional, maupun lokal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Koperasi Aktif berdasarkan klasifikasi usaha
Konsep	koperasi aktif
Definisi/Deskripsi	Koperasi Aktif adalah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Tingginya jumlah koperasi aktif pada kelompok tertentu menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang kuat, relevansi model usaha koperasi, serta keberhasilan pembinaan dan pengawasan pada sektor tersebut.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Koperasi Aktif berdasarkan kelompok
Konsep	koperasi aktif
Definisi/Deskripsi	Koperasi Aktif adalah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Tingginya jumlah koperasi aktif pada kelompok tertentu menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang kuat, relevansi model usaha koperasi, serta keberhasilan pembinaan dan pengawasan pada sektor tersebut.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koperasi berdasarkan status keaktifan
Konsep	status keaktifan koperasi
Definisi/Deskripsi	Menjelaskan data jumlah koperasi berdasarkan jenis dan status keaktifan (aktif/tidak aktif) dalam periode tertentu (misal, tahunan).
Klasifikasi	kecamatan, jenis koperasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	mengidentifikasi potensi penguatan koperasi aktif sekaligus menentukan strategi intervensi yang tepat bagi koperasi yang tidak aktif atau dalam kondisi transisi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah tenaga kerja koperasi
Konsep	tenaga kerja koperasi
Definisi/Deskripsi	Jumlah para pekerja yang bekerja mengelola sebuah koperasi dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak jumlah tenaga kerja maka dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan aktivitas usaha dan perluasan layanan koperasi, sementara stagnasi atau penurunan dapat menjadi sinyal perlunya penguatan manajemen, efisiensi usaha, atau inovasi model bisnis koperasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah UKM yang berpartisipasi pada kegiatan promosi Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur
Konsep	UKM
Definisi/Deskripsi	indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) asal Jawa Timur dalam berbagai kegiatan promosi yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah UKM yang berpartisipasi, semakin besar peluang terjadinya peningkatan jejaring usaha, perluasan pasar, dan peningkatan nilai ekonomi produk lokal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Usaha Makanan/Minuman
Konsep	usaha
Definisi/Deskripsi	Jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan produksi dan/atau penjualan makanan dan/atau minuman, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, yang beroperasi pada wilayah dan periode tertentu.
Klasifikasi	jenis usaha
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak jumlah usaha semakin bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatnya kreativitas dan inovasi produk pangan, menguatnya peran UMKM sedangkan semakin sedikit jumlah usaha mengindikasikan keterbatasan akses permodalan, perubahan pola konsumsi, persaingan pasar, atau dampak regulasi dan kondisi ekonomi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Keragaan Usaha Koperasi
Konsep	koperasi
Definisi/Deskripsi	Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Jumlah keragaan koperasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan
Konsep	koperasi
Definisi/Deskripsi	Koperasi yang telah didirikan, dikelola, dan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memiliki legalitas formal, struktur organisasi yang sah, serta melaksanakan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten.
Klasifikasi	jenis koperasi
Ukuran	-
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan merupakan koperasi yang legal, tertib administrasi, patuh terhadap regulasi usaha dan keuangan, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Koperasi dalam kategori ini layak memperoleh pembinaan lanjutan, kemitraan, dan akses pembiayaan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Konsep	Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Definisi/Deskripsi	Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi yang dilaksanakan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun buku.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	kali (berapa kali RAT dilaksanakan dalam waktu satu tahun)
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin konsisten pelaksanaan RAT setiap tahun, semakin baik tingkat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas koperasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) (minimal 3 tahun terakhir)
Konsep	Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) (minimal 3 tahun terakhir)
Definisi/Deskripsi	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal}}{\text{Total penyandang disabilitas bekerja}}$
Interpretasi	semakin besar proporsi penyandang disabilitas yang memperoleh pekerjaan di sektor formal, mencerminkan meningkatnya akses, perlindungan kerja, dan kesempatan ekonomi yang inklusif.
Periodesasi	tahunan
Metode	Survey

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (minimal 3 tahun terakhir)
Konsep	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (minimal 3 tahun terakhir)
Definisi/Deskripsi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
Klasifikasi	status kepesertaan, jenis kepesertaan
Ukuran	persentase
Satuan	persen/orang
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepesertaan} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Peserta Aktif}}{\text{Total Tenaga Kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai kepesertaan meningkat menunjukkan semakin luasnya perlindungan sosial tenaga kerja dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompilasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Konsep	Partisipasi Angkatan Kerja
Definisi/Deskripsi	TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah..
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah angkatan kerja} / \text{Jumlah penduduk usia kerja}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pencari kerja yang ditempatkan
Konsep	Pencari Kerja yang ditempatkan
Definisi/Deskripsi	Pencarian kerja (job search) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah
Klasifikasi	Kecamatan, Jenis kelamin
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	(jumlah pencari kerja yang ditempatkan / jumlah pencari kerja yang terdaftar) X 100%
Interpretasi	Jika jumlah pencari kerja yang terdaftar banyak ditempatkan di perusahaan maka angka pengangguran semakin berkurang
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama
Konsep	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Definisi/Deskripsi	hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak.
Klasifikasi	nama perusahaan, nama pekerja, jenis perselisihan
Ukuran	Jumlah
Satuan	kasus
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama, mengindikasikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh para pihak berhasil dan tidak perlu diajukan pada peradilan hubungan industrial
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah transmigran yang diberangkatkan
Konsep	Transmigran yang Diberangkatkan
Definisi/Deskripsi	Transmigrasi adalah program pemerintah untuk pemerataan penduduk, di mana masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke wilayah yang jarang penduduknya
Klasifikasi	Lokasi transmigrasi
Ukuran	jumlah
Satuan	kk
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum \text{Transmigran yang Diberangkatkan}}{\sum \text{Calon Transmigran Terdaftar}} \times 1005$
Interpretasi	Transmigrasi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan serta pemerataan pembangunan. Selain itu, transmigrasi juga ditujukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Konsep	Pekerja Migran
Definisi/Deskripsi	Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia..
Klasifikasi	Kecamatan, Tingkat Pendidikan
Ukuran	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Interpretasi	-
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Tempat Kerja
Konsep	Pekerja Migran
Definisi/Deskripsi	Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia..
Klasifikasi	Kecamatan, Tempat Kerja
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Tempat Kerja
Interpretasi	-
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Konsep	Pekerja Migran
Definisi/Deskripsi	Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia..
Klasifikasi	Kecamatan, Tempat Kerja
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pekerja Migran Nganjuk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Interpretasi	-
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi
Konsep	Transmigran Terdaftar dan Terseleksi
Definisi/Deskripsi	individu atau kepala keluarga yang telah mendaftarkan diri sebagai calon peserta program transmigrasi dan telah melalui proses seleksi administrasi serta verifikasi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi	jenis transmigrasi, jenis kelamin, daerah asal
Ukuran	jumlah
Satuan	orang/ kepala keluarga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh calon transmigran yang telah dinyatakan lulus seleksi pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah calon transmigran terdaftar dan terseleksi menunjukkan meningkatnya minat masyarakat serta kesiapan peserta dalam mengikuti program transmigrasi.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan
Konsep	Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan
Definisi/Deskripsi	Jumlah calon transmigrasi atau transmigran yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan dan mampu menerapkan materi penyuluhan tersebut dalam bentuk praktik nyata, baik dalam kegiatan ekonomi produktif, pengelolaan lingkungan, maupun kehidupan sosial di kawasan transmigrasi.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	orang/kepala keluarha
Rumus Perhitungan	Jumlah calon transmigrasi atau transmigran yang mampu mengimplementasikan hasil penyuluhan.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah atau persentase calon transmigrasi atau transmigran yang mampu mengimplementasikan hasil penyuluhan menunjukkan semakin efektifnya kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan transmigran.
Periodesasi	tahunan
Metode	observasi lapangan/wawancara

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data Upah Minimum Kab./Kota (UMK)
Konsep	Balas Jasa dan Upah Pekerja
Definisi/Deskripsi	Nilai upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Klasifikasi	wilayah
Ukuran	nilai
Satuan	rupiah
Rumus Perhitungan	$UMK_t = UMK_{t-1} + (UMK_{t-1} \times (\text{Inflasi} + \text{Pertumbuhan Ekonomi}))$
Interpretasi	Nilai UMK meningkat menunjukkan adanya penyesuaian upah minimum untuk menjaga daya beli pekerja terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan
Konsep	Kepala Keluarga yang ditempatkan
Definisi/Deskripsi	Jumlah kepala keluarga (KK) yang secara resmi ditempatkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang ke suatu lokasi tertentu dalam rangka program penataan, relokasi, transmigrasi, rehabilitasi, atau intervensi sosial lainnya pada periode waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	Kepala Keluarga (KK)
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kepala keluarga yang telah ditempatkan sesuai dengan dokumen atau berita acara penempatan pada periode pelaporan.
Interpretasi	Nilai yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan realisasi program penempatan kepala keluarga.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompilasi data

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Mediator Hubungan Industrial Kab./Kota
Konsep	Mediator Hubungan Industrial Kab./Kota
Definisi/Deskripsi	Banyaknya pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh menteri untuk melaksanakan tugas mediasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Klasifikasi	jenis kelamin, wilayah, tingkat pendidikan
Ukuran	total
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh Mediator Hubungan Industrial yang tercatat aktif pada Kabupaten/Kota dalam satu tahun.
Interpretasi	Jumlah seluruh Mediator Hubungan Industrial yang tercatat aktif pada Kabupaten/Kota dalam satu tahun.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompilasi data

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online
Konsep	Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online
Definisi/Deskripsi	perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau pembentukan lembaga kerja sama bipartit.
Klasifikasi	jenis perusahaan
Ukuran	jumlah
Satuan	perusahaan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh perusahaan yang statusnya terdaftar aktif dalam sistem WLKP Online pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan ketenagakerjaan serta semakin baiknya ketersediaan data ketenagakerjaan nasional.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Mekanisme Penempatan
Konsep	Tenaga Kerja yang ditempatkan
Definisi/Deskripsi	jumlah tenaga kerja pekerja yang ditempatkan melalui berbagai cara atau proses penempatan kerja.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
Interpretasi	semakin banyak jumlah pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan maka angka pengangguran semakin berkurang
Periodesasi	triwulan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan
Konsep	Keluarga yang ikut Pelatihan
Definisi/Deskripsi	Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat dalam periode tertentu.
Klasifikasi	jenis pelatihan
Ukuran	jumlah
Satuan	kepala keluarga/orang
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kepala keluarga yang mengikuti pelatihan pada periode pengamatan.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat partisipasi kepala keluarga yang baik dalam upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tingkat Kesempatan Kerja
Konsep	Kesempatan Kerja
Definisi/Deskripsi	Tingkat Kesempatan Kerja adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja terhadap total angkatan kerja pada periode waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja.
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Tingkat Kesempatan Kerja (%)=Jumlah Penduduk yang Bekerja/Jumlah Angkatan Kerjax100%
Interpretasi	Nilai TTK tinggi menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja dan kondisi pasar kerja yang relatif baik.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan
Konsep	Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan
Definisi/Deskripsi	Jumlah calon transmigran yang telah lulus seleksi akhir pada tahap pra pemberangkatan, meliputi verifikasi administrasi, kesehatan, kesiapan sosial-ekonomi, serta pemantapan pembekalan, dan dinyatakan siap diberangkatkan ke lokasi transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Klasifikasi	jenis transmigrasi
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi akhir pra pemberangkatan pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan menunjukkan efektivitas proses seleksi dan pembinaan calon transmigran serta kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi.
Periodesasi	tahunan
Metode	verifikasi dokumen

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (Kampung DIAL)
Konsep	Digitalisasi Desa/Kelurahan
Definisi/Deskripsi	Proporsi desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk yang menerapkan program Kampung Digital Anjuk Ladang. Kampung Digital Anjuk Ladang Adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dan Kelurahan Secara Terpadu, Terarah, Berkelanjutan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (tik). Kampung Digital Anjuk Ladang Memiliki 5 Sasaran Yaitu Pelayanan Membahagiakan, Keluarga Sejahtera, Masyarakat Harmonis, Pemerintahan Terpercaya, Masyarakat Partisipatif
Klasifikasi	Kecamatan dan Desa Lokus Kampung Digital Anjuk Ladang
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah desa lokus penerapan Kampung DIAL} / \text{Jumlah desa keseluruhan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentasenya, semakin banyak desa yang menerapkan program program Kampung Digital Anjuk Ladang untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai aspek TIK
Konsep	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE
Definisi/Deskripsi	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penggunaan sistem penghubung layanan nstansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Perhitungan nilai dari 4 indikator pada aspek "TIK" domain "Tata Kelola SPBE" (pengukuran Indeks SPBE)
Interpretasi	Semakin besar nilainya (maksimal nilai 5), semakin baik penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka
Konsep	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik
Definisi/Deskripsi	- Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. -Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Perhitungan nilai indikator "Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka" pada domain "Layanan SPBE" aspek "Layanan Publik Berbasis Elektronik" (pengukuran Indeks SPBE)
Interpretasi	Semakin besar nilainya (maksimal nilai 5), maka semakin baik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan layanan data terbuka berbasis elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Nganjuk dan masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Skor Keterbukaan Informasi Publik kabupaten Nganjuk
Konsep	Predikat atau kategori keterbukaan informasi publik
Definisi/Deskripsi	Kepatuhan Perangkat Daerah dalam hal Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui Self Assesment Question atau SAQ dengan nilai sampai dengan 100. Skor tersebut dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif.
Klasifikasi	perangkat daerah, periode waktu
Ukuran	Skor
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin baik skor keterbukaan informasi publik, maka semakin baik kepatuhan badan publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi, dan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks SPBE
Konsep	Nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi/Deskripsi	Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian SPBE melalui web https://tauval.spbe.go.id/
Interpretasi	Semakin baik indeks SPBE, maka semakin baik suatu daerah dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, semakin baik suatu daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, semakin baik pula suatu daerah dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terpercaya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah desa dalam satu kabupaten yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G
Konsep	Pemerataan Infrastruktur internet
Definisi/Deskripsi	Desa yang mendapatkan akses sinyal internet telepon seluler 4G. Sinyal internet telepon seluler adalah Jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Desa
Rumus Perhitungan	Banyaknya desa yang mendapat akses sinyal internet 4G di Kab Nganjuk
Interpretasi	Semakin banyak desa yang mendapat akses sinyal internet 4G, maka masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses informasi dan layanan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city
Konsep	Masterplan Smart City
Definisi/Deskripsi	Masterplan Smart City adalah dokumen rencana induk yang menjadi pedoman strategis pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mewujudkan kota cerdas secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang (umumnya 5-10 tahun).
Klasifikasi	Kabupaten/Kota
Ukuran	Dokumen
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak kabupaten/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan masterplan Smart City mencerminkan peningkatan kapasitas perencanaan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital secara berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah konten negatif yang diblokir
Konsep	Pemblokiran konten negatif
Definisi/Deskripsi	Konten negatif yang diblokir adalah konten yang dianggap merugikan, membahayakan, atau melanggar hukum serta norma yang berlaku
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Konten
Rumus Perhitungan	banyaknya konten negatif yang diblokir oleh Dinas Kominfo
Interpretasi	Semakin banyak konten negatif yang diblokir, maka masyarakat akan lebih mudah menerima informasi yang akurat dan bermanfaat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital
Konsep	Literasi digital
Definisi/Deskripsi	Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Literasi digital adalah Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif, teknis, dan sosial yang sesuai.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	banyaknya masyarakat yang mendapatkan literasi digital melalui kegiatan/sarana Dians Kominfo
Interpretasi	semakin tinggi literasi digital masyarakat, maka internet akan menjadi ruang yang lebih aman, produktif, dan bermanfaat, serta mendukung percepatan transformasi digital bangsa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital
Konsep	Pelatihan digital skill
Definisi/Deskripsi	Pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital adalah kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara produktif, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti usaha, pekerjaan, dan layanan digital lainnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah peserta pelatihan digital skill yang diadakan/melibatkan OMAH TANDANG Dinas Kominfo
Interpretasi	semakin banyak peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital maka semakin banyak masyarakat cakap digital dan siap menjadi bagian dari ekonomi yang berbasis teknologi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitas Adopsi Teknologi Digital UMKM
Konsep	Fasilitas Adopsi Teknologi Digital UMKM
Definisi/Deskripsi	Fasilitas Adopsi Teknologi Digital UMKM adalah upaya membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat menggunakan teknologi digital dalam menjalankan, mengembangkan, memasarkan usahanya dan bisa naik kelas
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pelaku usaha
Rumus Perhitungan	banyaknya pelaku UMKM yang mendapat Fasilitas Adopsi Teknologi Digital oleh Dinas Kominfo
Interpretasi	semakin banyak UMKM yang difasilitasi digitalisasi, maka ekonomi digital akan lebih inklusif, merata, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa yang menerima sinyal internet
Konsep	Pemerataan Infrastruktur digital
Definisi/Deskripsi	proporsi banyaknya desa yang mendapat akses sinyal internet baik dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi (3G, 4G, 5G, dsb)
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah desa yang menerima sinyal internet} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak desa yang menerima akses sinyal internet, maka masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses informasi dan layanan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/Government Network)
Konsep	Jaringan Intra Pemerintah
Definisi/Deskripsi	proporsi banyaknya perangkat daerah yang terhubung Jaringan Intra pemerintah daerah. JIP adalah Suatu jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul (unit kerja) di dalam Pemerintah Daerah atau Instansi Pusat, serta ke Jaringan Intra Pemerintah tingkat nasional
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah perangkat daerah yang terhubung JIP} / \text{jumlah seluruh perangkat daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak perangkat daerah yang terhubung ke JIP, maka kinerja pemerintahan daerah akan lebih efisien, aman, dan terintegrasi secara digital
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase OPD yang memanfaatkan cloud pemerintah
Konsep	Pemanfaatan cloud pemerintah
Definisi/Deskripsi	proporsi perangkat daerah yang memanfaatkan cloud pemerintah. Cloud Pemerintah adalah infrastruktur komputasi awan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan SPBE secara nasional.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan cloud pemerintah/jumlah seluruh perangkat daerah)x100%
Interpretasi	Semakin banyak perangkat daerah yang pakai Cloud Pemerintah, maka pelayanan publik makin cepat, data lebih aman, dan kerja pemerintahan jadi lebih hemat dan efisien
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik
Konsep	Infrastruktur jaringan serat optik
Definisi/Deskripsi	proporsi kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik. Infrastruktur jaringan serat optik adalah sistem jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik (fiber optic) untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi dan kapasitas besar
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(jumlah kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik/jumlah seluruh kecamatan)x100%
Interpretasi	semakin banyak kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik maka Akses layanan digital di tingkat lokal akan semakin cepat, stabil, dan merata
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR
Konsep	pengaduan masyarakat
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnya media resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Aduan
Rumus Perhitungan	banyaknya aduan masyarakat yang disampaikan melalui platform selain SP4N LAPOR
Interpretasi	semakin banyak aduan masyarakat yang ditangani maka pelayanan publik semakin responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan warga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor
Konsep	pengaduan masyarakat
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Aduan
Rumus Perhitungan	banyaknya aduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-Lapor
Interpretasi	semakin banyak aduan masyarakat yang ditangani maka pelayanan publik semakin responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan warga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
Konsep	Aplikasi khusus
Definisi/Deskripsi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Aplikasi
Rumus Perhitungan	banyaknya aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan Pemkab Nganjuk
Interpretasi	Aplikasi khusus Pemda digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara digital, mulai dari pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan berbasis data
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
Konsep	Aplikasi khusus
Definisi/Deskripsi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Aplikasi
Rumus Perhitungan	banyaknya aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi
Interpretasi	Semakin banyak aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) maka Tingkat keterpaduan, keamanan, dan pengelolaan aplikasi pemerintahan akan semakin baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Konsep	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	banyaknya diseminasi kegiatan pada media komunikasi publik Pemkab Nganjuk
Interpretasi	Semakin banyak diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah maka semakin banyak Masyarakat yang mengetahui, memahami, dan terlibat dalam program serta kebijakan pemerintah daerah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
Konsep	Aplikasi Umum
Definisi/Deskripsi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Aplikasi
Rumus Perhitungan	banyaknya aplikasi umum yang telah dimanfaatkan Pemkab Nganjuk
Interpretasi	Semakin banyak Pemda memakai Aplikasi Umum, maka semakin sedikit aplikasi buatan sendiri yang tumpang tindih
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
Konsep	Isu Publik
Definisi/Deskripsi	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	banyaknya laporan isu publik
Interpretasi	Semakin banyak isu publik yang dipantau maka Pemerintah daerah dapat merespons lebih cepat, tepat, dan proaktif terhadap kebutuhan, keluhan, atau potensi masalah di masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berbasis bukti nyata di lapangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
Konsep	Kanal Pengaduan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kanal
Rumus Perhitungan	banyaknya kanal pengaduan masyarakat
Interpretasi	Semakin banyak kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah maka Akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau saran akan semakin mudah dan luas
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pembinaan dibidang Statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data
Konsep	Pembinaan dibidang Statistik
Definisi/Deskripsi	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	banyaknya pembinaan statistik yang dilakukan walidata kepada produsen data
Interpretasi	Semakin banyak pembinaan statistik yang dilakukan walidata kepada produsen data makasemakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pengaduan berdasarkan tindak lanjut penyelesaian pada Kab/Kota melalui SP4N Lapor
Konsep	Penyelesaian pengaduan masyarakat
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor berdasarkan tindak lanjut penyelesaian- Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara
Klasifikasi	status tindak lanjut
Ukuran	Jumlah
Satuan	pengaduan
Rumus Perhitungan	jumlah pengaduan melalui SP4N Lapor yang diklasifikasikan menurut tindak lanjutnya
Interpretasi	semakin banyak aduan masyarakat yang ditangani maka pelayanan publik semakin responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan warga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah sosialisasi hasil Statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data
Konsep	Sosialisasi hasil Statistik sektoral
Definisi/Deskripsi	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sosialisasi
Rumus Perhitungan	banyaknya sosialisasi tentang data statistik sektoral
Interpretasi	Semakin banyak sosialisasi hasil statistik sektoral dilakukan, maka semakin tinggi pemahaman dan penggunaan data oleh pengguna dalam mendukung kebijakan yang berbasis bukti
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas
Konsep	sosialisasi program Provinsi Cerdas
Definisi/Deskripsi	Sosialisasi Program Provinsi Cerdas adalah kegiatan penyampaian informasi, pemahaman, dan penyamaan persepsi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait mengenai kebijakan, konsep, dan implementasi Provinsi Cerdas
Klasifikasi	Wilayah Provinsi
Ukuran	jumlah
Satuan	Kab/Kota
Rumus Perhitungan	banyak kab/kota yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
Konsep	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
Definisi/Deskripsi	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi adalah jaringan komunikasi data internal yang menghubungkan perangkat daerah di tingkat provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta unit kerja terkait, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).
Klasifikasi	Kab/Kota
Ukuran	Jumlah
Satuan	
Rumus Perhitungan	banyak nya kab/kota yang terhubungan dengan jaringan intra
Interpretasi	Semakin optimal pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi mencerminkan kematangan transformasi digital pemerintahan, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
Konsep	Diseminasi informasi
Definisi/Deskripsi	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	banyaknya orang yang mendapat informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
Interpretasi	Semakin banyak khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan di bidang informasi dan komunikasi publik, maka semakin tinggi pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal
Konsep	Diseminasi informasi
Definisi/Deskripsi	- Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	banyaknya orang yang mendapat informasi publik
Interpretasi	Semakin banyak khalayak yang terpapar informasi publik, maka semakin meningkat keterbukaan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Komunitas Informasi Masyarakat
Konsep	Komunitas Informasi Masyarakat
Definisi/Deskripsi	-Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Komunitas
Rumus Perhitungan	banyaknya komunitas informasi masyarakat diseluruh desa/kelurahan
Interpretasi	Semakin banyak KIM yang terbentuk dan aktif, semakin kuat jaringan informasi lokal, semakin tinggi literasi masyarakat, serta semakin efektif komunikasi antara pemerintah dan warga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Konten Audio Video
Konsep	konten audio video
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Konten
Rumus Perhitungan	banyaknya konten audio video yang dipublikasikan
Interpretasi	Semakin banyak konten audio dan video, maka akan terjadi peningkatan keterlibatan audiens, penyampaian pesan yang lebih efektif, dan peningkatan visibilitas online
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Konten Foto
Konsep	konten foto
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangkapan kamera
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Konten Digital
Rumus Perhitungan	banyaknya konten foto yang dipublikasikan
Interpretasi	Semakin banyak konten foto, maka semakin tinggi potensi keterlibatan (engagement) pengguna, peningkatan visibilitas, dan peluang untuk membangun brand yang kuat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Konten Grafis
Konsep	konten grafis
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Konten
Rumus Perhitungan	banyaknya konten grafis yang dipublikasikan
Interpretasi	Semakin banyak konten grafis, maka akan semakin menarik perhatian dan meningkatkan daya tarik visual dari sebuah pesan informasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Konten Teks
Konsep	konten teks
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Konten
Rumus Perhitungan	banyaknya konten teks yang dipublikasikan
Interpretasi	Konten teks berfungsi untuk menyampaikan informasi, menceritakan kisah, memberikan instruksi, atau membangun hubungan dengan audiens
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
Konsep	Layanan publik berbasis elektronik
Definisi/Deskripsi	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Layanan
Rumus Perhitungan	banyaknya layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan Pemkab nganjuk
Interpretasi	Semakin banyak layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda, maka semakin tinggi kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Media Online yang dikelola oleh Pemda
Konsep	Media Online
Definisi/Deskripsi	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Media
Rumus Perhitungan	banyaknya media online yang dikelola Pemkab Nganjuk
Interpretasi	Media online digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berbagai tujuan, termasuk penyebaran informasi publik, komunikasi dua arah dengan masyarakat, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE
Konsep	Literasi SPBE
Definisi/Deskripsi	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	banyaknya pengguna SPBE yang mendapat literasi terkait SPBE
Interpretasi	Semakin banyak pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE, maka akan semakin optimal pemanfaatan SPBE dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Konsep	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Definisi/Deskripsi	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perangkat Daerah
Rumus Perhitungan	banyaknya OPD yang terhubung dengan SPLP daerah
Interpretasi	Semakin banyak Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, maka semakin tinggi tingkat integrasi layanan, efisiensi birokrasi, serta kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Konsep	Permohonan informasi publik
Definisi/Deskripsi	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Permohonan
Rumus Perhitungan	banyaknya Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai regulasi
Interpretasi	Semakin banyak permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka semakin tinggi kualitas pelayanan informasi, tingkat kepercayaan masyarakat, serta citra positif badan publik sebagai institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak- hak warga negara.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pertemuan tatap muka
Konsep	Pertemuan Tatap Muka
Definisi/Deskripsi	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	banyaknya pertemuan tatap muka OMAH TANDANG
Interpretasi	semakin sering melaksanakan pertemuan tatap muka maka informasi berupa program pemerintah semakin banyak diterima masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Siaran pers yang dibuat
Konsep	Siaran pers
Definisi/Deskripsi	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siaran Pers
Rumus Perhitungan	banyaknya siaran pers yang disusun
Interpretasi	Semakin banyak kegiatan maka semakin luas menyebarkan informasi atau berita kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Strategi Komunikasi Publik yang disusun
Konsep	komunikasi publik
Definisi/Deskripsi	dokumen perencanaan komunikasi yang memuat tujuan, sasaran, pesan kunci, kanal/media, tahapan pelaksanaan, serta metode evaluasi komunikasi publik yang dirancang secara sistematis untuk mendukung kebijakan, program, dan kegiatan instansi pemerintah.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun dalam periode tertentu
Interpretasi	Semakin banyak Strategi Komunikasi Publik yang disusun dan terdokumentasi dengan baik, semakin tinggi kesiapan instansi dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik sasaran komunikasi.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Titik Blank Spot
Konsep	Aksesibilitas wilayah terhadap layanan dasar.
Definisi/Deskripsi	Titik Blank Spot adalah lokasi atau wilayah yang belum terjangkau atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar tertentu (misalnya jaringan telekomunikasi/internet, penyiaran, listrik, atau layanan publik digital), sehingga masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat menikmati layanan secara optimal.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	titik/lokasi
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh lokasi yang teridentifikasi sebagai wilayah tidak terjangkau atau memiliki akses terbatas terhadap layanan tertentu pada periode tertentu.
Interpretasi	semakin tinggi jumlah Titik Blank Spot menunjukkan semakin banyak wilayah yang belum memperoleh akses layanan dasar secara merata.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
Konsep	kondisi jalan kabupaten
Definisi/Deskripsi	Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).
Klasifikasi	Kemantapan Jalan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten (km)}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kondisi mantap jalan, berarti semakin banyak jalan yang dalam kondisi baik. Kondisi jalan yang baik mendukung mobilitas masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
Konsep	akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
Definisi/Deskripsi	Peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum: Jumlah jiwa yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada tahun N melalui sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota terhadap jumlah total penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan Pelaksana penyelenggaraan SPAM adalah: BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, BUMDes, Kelompok masyarakat SPAM Jaringan Perpipaan (JP) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Air yang diproduksi tanpa atau melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air/perpipaan sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), UPT (Unit Pelaksana Teknis)/UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Kelompok Masyarakat/ KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum), BUKS (Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP): satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan (Sumur Dangkal, Sumur Pompa, Bak Penampung Air hujan, Terminal Air, Bangunan penangkap mata air).
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan aman. - Nilai rendah menunjukkan masih terbatasnya akses air minum layak sehingga memerlukan peningkatan layanan SPAM dan perlindungan sumber air
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman
Konsep	Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Aman
Definisi/Deskripsi	Persentase rumah tangga dalam suatu populasi atau area tertentu yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Akses ini umumnya diukur berdasarkan kriteria seperti: 1. Kualitas Air: Air harus bebas dari kontaminan biologis, kimia, dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit. Ini biasanya mencakup air yang telah diproses atau dimurnikan sesuai standar kesehatan. 2. Ketersediaan: Air harus tersedia secara konsisten dan dapat diakses oleh rumah tangga tanpa harus menempuh jarak yang sangat jauh. 3. Aksesibilitas: Rumah tangga harus memiliki fasilitas atau sarana yang memadai untuk memperoleh dan menyimpan air minum dengan cara yang aman, seperti pipa air bersih, sumur yang dikelola dengan baik, atau layanan distribusi air bersih. 4. Kepemilikan: Rumah tangga harus memiliki hak atau kontrol terhadap sumber air yang mereka gunakan.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman / Jumlah total rumah tangga x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman menunjukkan semakin baik kondisi kesehatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur air bersih dan intervensi kebijakan terkait penyediaan air minum aman.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Layak dan Aman
Konsep	Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Layak dan Aman
Definisi/Deskripsi	- Rumah tangga dalam suatu wilayah (seperti desa, kecamatan, atau kota) yang memiliki akses atau terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik, seperti septic tank, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau sistem pembuangan limbah terpusat. Air limbah domestik adalah air buangan dari kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga dan berbagai aktivitas lain. - Layanan pengolahan air limbah domestik meliputi proses pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, seperti penggunaan toilet, mandi, mencuci, dan lain-lain.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Layak dan Aman / Jumlah Rumah Tangga x 100%
Interpretasi	- Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang telah menikmati layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman, mencerminkan kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan yang baik. - Nilai persentase yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses layanan sanitasi air limbah, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur, pelayanan, dan edukasi masyarakat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	IKSI Kewenangan Kabupaten
Konsep	Kinerja Sistem Irigasi
Definisi/Deskripsi	Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran ini adalah Luas daerah irigasi kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik.
Klasifikasi	Kondisi Jaringan Irigasi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	"(Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik) x 100 % / (Total Luas Daerah Irigasi Di Kabupaten Nganjuk)"
Interpretasi	Luas daerah irigasi merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
Konsep	Pemenuhan Kebutuhan Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
Definisi/Deskripsi	Persentase luas lahan yang pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku, dibandingkan dengan total luas wilayah yang direncanakan.
Klasifikasi	Jenis Pemanfaatan Lahan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Luas lahan yang sesuai RTR / Total luas wilayah yang direncanakan x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang, menunjukkan semakin baik tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang dan efektivitas pengendalian pemanfaatan lahan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan konflik tata ruang dan dampak lingkungan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik
Konsep	Kondisi jaringan irigasi sekunder
Definisi/Deskripsi	Persentase perbandingan antara panjang jaringan irigasi sekunder yang berada dalam kondisi baik (berfungsi optimal tanpa kerusakan signifikan) terhadap total panjang jaringan irigasi sekunder yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Klasifikasi	letak jaringan irigasi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Panjang Irigasi Sekunder Kondisi Baik / Total Panjang Irigasi Sekunder x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik menunjukkan semakin optimalnya fungsi jaringan irigasi dalam mendukung distribusi air pertanian. Persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, atau pembangunan jaringan irigasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Konsep	rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Definisi/Deskripsi	Layanan pengolahan air limbah domestik meliputi proses pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, seperti penggunaan toilet, mandi, mencuci, dan lain-lain.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik / Jumlah seluruh rumah tangga x 100%
Interpretasi	- Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang telah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak. - Nilai yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses sanitasi dan perlunya peningkatan infrastruktur serta layanan pengolahan air limbah domestik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kinerja penyediaan unit pelayanan setempat
Konsep	Kinerja pelayanan publik
Definisi/Deskripsi	Persentase capaian kinerja penyediaan unit pelayanan setempat yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu periode pelaporan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah unit pelayanan yang memenuhi standar / Total unit pelayanan setempat x 100%
Interpretasi	- Nilai persentase yang tinggi menunjukkan penyediaan unit pelayanan setempat telah berjalan efektif dan sesuai standar. - Nilai persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas, kapasitas, atau pemerataan unit pelayanan.
Periodesasi	Tahunan

Metode	Kompromin
--------	-----------

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Konsep	Infrastruktur pekerjaan umum
Definisi/Deskripsi	indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar pelayanan dan kelaikan fungsi infrastruktur pekerjaan umum meliputi jalan, jembatan, sumber daya air, permukiman, dan prasarana pendukung lainnya berdasarkan kondisi fisik, tingkat kemantapan, serta kemampuan infrastruktur dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Infrastruktur PU} = \frac{(I_J \times B_J) + (I_{SDA} \times B_{SDA}) + (I_{AM} \times B_{AM}) + (I_S \times B_S) + (I_P \times B_P)}{B_J + B_{SDA} + B_{AM} + B_S + B_P}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I_J = Indeks Infrastruktur Jalan • I_{SDA} = Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air • I_{AM} = Indeks Infrastruktur Air Minum • I_S = Indeks Infrastruktur Sanitasi • I_P = Indeks Infrastruktur Permukiman • B = Bobot masing-masing sub-indikator
Interpretasi	- Nilai indeks tinggi menunjukkan kondisi dan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang baik dan merata - Nilai indeks rendah menunjukkan keterbatasan atau ketimpangan infrastruktur sehingga memerlukan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani akses air minum menurut kecamatan
Konsep	Rumah tangga dengan akses air minum
Definisi/Deskripsi	rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap diperlukan dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani akses air minum
Interpretasi	Semakin besar jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum di suatu kecamatan, menunjukkan semakin baik tingkat pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani pengolahan Air Limbah Domestik menurut kecamatan
Konsep	Rumah tangga dengan akses air limbah domestik
Definisi/Deskripsi	- Jumlah Rumah Tangga (RT) yang telah memperoleh akses terhadap sistem pengolahan air limbah domestik, baik melalui sistem setempat (onsite) maupun terpusat (offsite), yang memenuhi standar teknis dan kesehatan lingkungan, dikelompokkan berdasarkan kecamatan. - Layanan pengolahan air limbah domestik meliputi proses pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, seperti penggunaan toilet, mandi, mencuci, dan lain-lain.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh Rumah Tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik pada setiap kecamatan.
Interpretasi	Semakin besar jumlah RT yang terlayani pengolahan air limbah domestik, menunjukkan semakin baik akses sanitasi dan kualitas lingkungan di suatu kecamatan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur sanitasi dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan
Konsep	rumah tangga memiliki akses sanitasi layak
Definisi/Deskripsi	Jumlah rumah tangga di setiap kecamatan yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak, yaitu sarana pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan, tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah yang aman.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh rumah tangga pada suatu kecamatan yang memiliki akses sanitasi layak.
Interpretasi	- Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan kondisi kesehatan lingkungan yang lebih baik. - Semakin rendah nilai indikator, mengindikasikan masih terbatasnya akses sanitasi layak sehingga diperlukan intervensi kebijakan dan program pembangunan sanitasi.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kepemilikan RISPAM
Konsep	Kepemilikan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Definisi/Deskripsi	Kondisi di mana pemerintah daerah telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah panjang yang memuat kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan sistem penyediaan air minum secara terpadu dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Ya/Tidak
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	- Memiliki RISPAM: Pemerintah daerah telah memiliki perencanaan air minum yang terarah dan berkelanjutan. - Tidak Memiliki RISPAM: Pemerintah daerah belum memiliki dasar perencanaan komprehensif untuk pengembangan SPAM, sehingga berpotensi menghambat peningkatan layanan air minum.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kepemilikan TPS3R (kab/kota)
Konsep	ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R
Definisi/Deskripsi	TPS3R adalah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle, yaitu fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berfungsi untuk melakukan pemilahan, pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah sebelum residu dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak TPS3R yang dimiliki dan berfungsi, semakin baik kapasitas Kabupaten/Kota dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Konsep	Pelayanan perizinan bangunan gedung dan pemenuhan standar keselamatan, kenyamanan, serta fungsi bangunan.
Definisi/Deskripsi	jumlah dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah IMB diterbitkan + Jumlah SLF diterbitkan
Interpretasi	- Nilai semakin tinggi menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perizinan bangunan serta efektivitas pelayanan perizinan. - Nilai rendah dapat mengindikasikan rendahnya permohonan, hambatan pelayanan, atau masih tingginya pembangunan tanpa izin.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun
Konsep	Perlintasan tidak sebidang Kereta Api
Definisi/Deskripsi	Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan perlintasan KA di Kabupaten
Klasifikasi	wilayah
Ukuran	total
Satuan	titik lokasi
Rumus Perhitungan	Jumlah perlintasan tidak sebidang = Σ perlintasan tidak sebidang yang dibangun
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perlintasan tidak sebidang yang dibangun di wilayah perkotaan menunjukkan meningkatnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi, mengurangi kemacetan, serta mendukung mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
Konsep	rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
Definisi/Deskripsi	Jaringan Perpipaan (JP) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Air yang diproduksi tanpa atau melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air/perpipaan sampai di rumah responden. rumah tangga dalam suatu populasi atau area tertentu yang memiliki akses ke air minum melalui sistem jaringan perpipaan yang terhubung dengan penyedia layanan air bersih.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh rumah tangga yang tercatat memiliki sambungan aktif air minum jaringan perpipaan.
Interpretasi	Semakin besar jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum melalui jaringan perpipaan menunjukkan semakin baik cakupan pelayanan air minum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM
Konsep	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Definisi/Deskripsi	Total jumlah sambungan rumah tangga (SR) yang telah terhubung dengan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diperluas.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	total
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh sambungan rumah baru yang terpasang dan berfungsi dari hasil kegiatan perluasan SPAM dalam periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin besar jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM menunjukkan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum layak.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Daerah Irigasi dalam keadaan rusak
Konsep	Luas Daerah Irigasi
Definisi/Deskripsi	Total luas area irigasi yang mengalami kerusakan, baik dari segi fisik maupun fungsional, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas sistem irigasi dalam mendistribusikan air untuk pertanian atau kebutuhan lainnya.
Klasifikasi	wilayah
Ukuran	total
Satuan	hektare
Rumus Perhitungan	Luas Daerah Irigasi Rusak = Σ luas daerah irigasi yang mengalami kerusakan (ringan + sedang + berat)
Interpretasi	semakin besar nilai luas daerah irigasi dalam keadaan rusak menunjukkan semakin rendah tingkat pelayanan jaringan irigasi.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas lahan irigasi berdasarkan kewenangan
Konsep	luas lahan irigasi
Definisi/Deskripsi	Luas lahan irigasi berdasarkan kewenangan adalah jumlah luas lahan pertanian (dalam hektare) yang dilayani oleh jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu periode pelaporan.
Klasifikasi	jenis kewenangan, kondisi lahan irigasi
Ukuran	total
Satuan	hektare
Rumus Perhitungan	Luas lahan irigasi
Interpretasi	Semakin besar luas lahan irigasi pada suatu kewenangan menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah pada tingkat tersebut dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Daerah Irigasi Permukaan
Konsep	Peta Daerah Irigasi Permukaan
Definisi/Deskripsi	Peta Daerah Irigasi Permukaan adalah data spasial yang menggambarkan sebaran wilayah layanan irigasi yang bersumber dari air permukaan (sungai, waduk, bendung, danau, atau embung).
Klasifikasi	-
Ukuran	luas
Satuan	hektare
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin besar luas daerah irigasi, semakin tinggi potensi peningkatan produktivitas pertanian yang dapat dicapai.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah
Konsep	Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah
Definisi/Deskripsi	Perbandingan antara total panjang jalan yang ada di suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut, yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Rasio
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Panjang Jalan / Luas Wilayah
Interpretasi	- Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketersediaan jaringan jalan yang lebih baik dan aksesibilitas wilayah yang lebih tinggi - Nilai rasio yang rendah menunjukkan keterbatasan infrastruktur jalan dan potensi hambatan mobilitas
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Konsep	koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Definisi/Deskripsi	Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi antar pemangku kepentingan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait) dalam rangka perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang disusun dan ditetapkan dalam satu tahun
Interpretasi	- Semakin banyak dan terdokumentasinya koordinasi menunjukkan semakin baik sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan penataan ruang. - Tidak tersedianya dokumen menunjukkan lemahnya koordinasi dan berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Konsep	Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Definisi/Deskripsi	Dokumen perencanaan teknis yang memuat hasil survei, investigasi, desain, perhitungan teknis, gambar kerja, dan rencana anggaran biaya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan konstruksi jaringan irigasi dan rawa.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun dan/atau disahkan dalam satu periode.
Interpretasi	Semakin banyak dokumen rencana teknis yang tersedia, semakin siap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan konstruksi irigasi dan rawa secara terencana dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Bendung Irigasi
Konsep	Bendung Irigasi
Definisi/Deskripsi	Jumlah bangunan bendung yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkannya ke jaringan irigasi guna mendukung penyediaan air pertanian dalam suatu wilayah pada periode tertentu.
Klasifikasi	letak bendung
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Bendung Irigasi
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah bendung irigasi menunjukkan semakin baik dukungan infrastruktur pengairan untuk lahan pertanian, yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan stabilitas hasil pertanian.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Curah Hujan Rerata Bulanan di Kabupaten/Kota berdasarkan Wilayah Sungai
Konsep	Curah Hujan
Definisi/Deskripsi	Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter (mm).
Klasifikasi	-
Ukuran	rerata
Satuan	mm
Rumus Perhitungan	Curah Hujan Rerata Bulanan = jumlah curah hujan pada hari ke-1 dalam bulan tersebut (biasanya dalam milimeter/mm) / jumlah hari dalam bulan tersebut (misalnya 30 atau 31 hari)
Interpretasi	rata-rata jumlah air hujan yang turun di suatu wilayah dalam waktu satu bulan, biasanya diukur dalam milimeter (mm). Nilai ini diperoleh dari rata-rata data harian atau dari beberapa titik pengamatan dalam satu wilayah.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah dokumen roadmap sanitasi
Konsep	roadmap sanitasi
Definisi/Deskripsi	Jumlah dokumen perencanaan strategis (roadmap) sanitasi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan terkait sebagai acuan pengembangan layanan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh dokumen roadmap sanitasi yang tersedia dan tercatat pada periode tertentu.
Interpretasi	Nilai meningkat menunjukkan semakin banyak wilayah atau sektor yang telah memiliki perencanaan sanitasi yang jelas dan terarah.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah
Konsep	akses air limbah
Definisi/Deskripsi	Air Limbah adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama..
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	jiwa
Rumus Perhitungan	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah
Interpretasi	Semakin banyak masyarakat yang terlayani pengolahan Air Limbah , maka semakin banyak air limbah yang diolah agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat
Periodesasi	semester
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi
Konsep	Lembaga jasa konstruksi
Definisi/Deskripsi	Jasa Konstruksi adalah jumlah bangunan konstruksi yang diawasi pada tahun berjalan dibagi jumlah seluruh bangunan konstruksi hasil kegiatan konstruksi yang telah FHO sesuai dengan kewenangannya pada tahun sebelumnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	lembaga
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh Lembaga Jasa Konstruksi yang terdaftar dan aktif pada periode pengamatan.
Interpretasi	peningkatan jumlah Lembaga Jasa Konstruksi menunjukkan berkembangnya kapasitas dan peran kelembagaan di sektor konstruksi, yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rehabilitasi Check dam
Konsep	Rehabilitasi Check dam
Definisi/Deskripsi	Rehabilitasi Check Dam adalah kegiatan perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan infrastruktur bendungan kecil (check dam) yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi untuk mengembalikan atau meningkatkan kemampuan bangunan tersebut dalam mengendalikan sedimen, memperlambat aliran air, mencegah banjir, dan menjaga kualitas lingkungan sungai
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Rehabilitasi Check dam
Interpretasi	semakin tinggi rehabilitasi check dam" berarti semakin besar dan efektif upaya perbaikan/pemeliharaan bendung penahan (check dam) untuk mengendalikan erosi, mengurangi sedimentasi, dan meningkatkan fungsi sungai, yang menghasilkan manfaat lebih baik seperti pengelolaan air yang optimal
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Konsep	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Definisi/Deskripsi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir adalah upaya perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan kembali fungsi struktur fisik pintu air dan bendung agar dapat berfungsi optimal dalam mengendalikan aliran air untuk mencegah banjir, mengatur irigasi, dan menjaga stabilitasnya, mengembalikan atau bahkan meningkatkan kapasitasnya agar lebih baik dan memadai.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Interpretasi	Semakin banyak rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir" menginterpretasikan peningkatan upaya preventif dan mitigasi bencana banjir
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD
Konsep	Penerima Layanan SPALD
Definisi/Deskripsi	Semua penduduk yang terdaftar sebagai warga negara di suatu wilayah atau negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD
Interpretasi	Semakin banyak warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah, semakin rendah kemungkinan penyebaran penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kegiatan Normalisasi Sungai dan Saluran Irigasi
Konsep	Normalisasi Sungai dan Saluran Irigasi
Definisi/Deskripsi	Normalisasi sungai adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki tata air alami dari suatu sungai atau saluran air. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk mengembalikan atau mempertahankan keadaan alami sungai, sehingga dapat mengalir dengan baik tanpa menimbulkan ancaman banjir atau erosi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	Jumlah Kegiatan Normalisasi Sungai dan Saluran Irigasi
Interpretasi	Semakin banyak kegiatan normalisasi sungai dan saluran irigasi mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah banjir, meningkatkan fungsi hidrologi (irigasi), memperbaiki lingkungan sungai, serta mengantisipasi perubahan iklim dan curah hujan ekstrem.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Konsep	Lembaga P3A/GP3A/IP3A
Definisi/Deskripsi	perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A) yang terbentuk dan/atau aktif pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lembaga
Rumus Perhitungan	Jumlah P3A + Jumlah GP3A + Jumlah IP3A
Interpretasi	- Nilai indikator meningkat menunjukkan bertambahnya jumlah kelembagaan petani pemakai air yang terbentuk atau aktif, mencerminkan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi. - Nilai indikator menurun atau stagnan menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, fasilitasi, atau revitalisasi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Daerah Irigasi berdasarkan Hasil Sinkronisasi Daerah Irigasi
Konsep	Luas Daerah Irigasi Sinkronisasi
Definisi/Deskripsi	Total luas daerah irigasi (dalam satuan hektar) yang telah melalui proses sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, serta ditetapkan sebagai data resmi dan valid.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Luas Daerah Irigasi Tersinkronisasi = \sum Luas Daerah Irigasi hasil sinkronisasi
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin luas daerah irigasi yang telah terverifikasi dan disepakati melalui proses sinkronisasi, sehingga mencerminkan kesiapan data irigasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Konsep	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
Definisi/Deskripsi	Panjang total jaringan irigasi permukaan yang berfungsi untuk menyalurkan air dari sumber air ke lahan pertanian melalui saluran terbuka, meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier, yang berada dalam wilayah tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Panjang
Satuan	Km
Rumus Perhitungan	Panjang Saluran Primer + Panjang Saluran Sekunder + Panjang Saluran Tersier (Km)
Interpretasi	- Nilai yang lebih besar menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi permukaan yang lebih luas. - Peningkatan indikator mencerminkan upaya pengembangan atau rehabilitasi infrastruktur irigasi. - Penurunan nilai dapat mengindikasikan kerusakan atau alih fungsi jaringan irigasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan
Konsep	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan
Definisi/Deskripsi	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan merupakan peta tematik yang menggambarkan distribusi spasial curah hujan (dalam milimeter) dan jumlah hari hujan (hari dengan curah hujan ≥ 1 mm) pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Peta
Satuan	-
Rumus Perhitungan	<p>2. Rumus Indeks Curah Hujan dan Hari Hujan (ICHH)</p> $ICHH = \frac{CH}{HH}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICHH = Indeks Curah Hujan dan Hari Hujan • CH = Total curah hujan (mm) • HH = Jumlah hari hujan (hari)
Interpretasi	Nilai curah hujan dan jumlah hari hujan yang tinggi menunjukkan wilayah dengan potensi ketersediaan air yang besar, namun juga berisiko terhadap banjir. Sebaliknya, nilai rendah mengindikasikan potensi kekeringan dan keterbatasan air.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Jaringan Listrik
Konsep	jaringan listrik
Definisi/Deskripsi	Gambaran spasial yang menunjukkan sebaran dan keterhubungan infrastruktur jaringan listrik, meliputi jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, gardu distribusi, dan wilayah layanan listrik di suatu daerah.
Klasifikasi	Wilayah / Peta
Ukuran	jumlah
Satuan	jaringan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Peta Jaringan Listrik digunakan untuk mengetahui kondisi, cakupan, dan keterjangkauan layanan listrik. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan pemerataan akses listrik, peningkatan kapasitas jaringan, serta mitigasi risiko gangguan listrik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Kawasan Industri Eksisting
Konsep	Kawasan Industri Eksisting
Definisi/Deskripsi	<p>- representasi spasial yang menggambarkan lokasi, batas wilayah, dan sebaran kawasan industri yang telah beroperasi dan ditetapkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Peta yang menggambarkan sebaran dan luasan kawasan industri yang telah ditetapkan dan/atau beroperasi pada wilayah tertentu (kabupaten/kota/provinsi), sesuai dengan perizinan dan rencana tata ruang yang berlaku.</p>
Klasifikasi	Wilayah / Peta
Ukuran	luas
Satuan	km ²
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Peta Kawasan Industri Eksisting menunjukkan kondisi aktual persebaran dan jumlah kawasan industri yang telah berkembang di suatu wilayah. Semakin luas dan terdistribusi dengan baik kawasan industri eksisting, maka semakin besar potensi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan investasi. Peta ini juga menjadi acuan penting dalam pengendalian tata ruang agar pengembangan industri selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Kawasan Wilayah Pertahanan
Konsep	Kawasan Wilayah Pertahanan
Definisi/Deskripsi	Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara adalah gambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	km ²
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin besar peta kawasan wilayah pertahanan, maka semakin luas cakupan wilayah yang digambarkan, menunjukkan gambaran umum atau makro untuk perencanaan strategis pertahanan negara
Periodesasi	2023-2043
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk
Konsep	Lokasi Gardu Induk
Definisi/Deskripsi	Peta sebaran lokasi gardu induk adalah representasi geografis yang menampilkan titik-titik lokasi instalasi gardu induk (GI) beserta informasi terkait seperti tegangan, kapasitas, dan data spasial lainnya untuk visualisasi dan analisis sistem tenaga listrik, membantu manajemen, perencanaan, dan pengoperasian jaringan distribusi listrik.
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	peningkatan kapasitas gardu induk mendukung seluruh jaringan secara efisien, menghindari hambatan dan menjaga stabilitas sistem
Periodesasi	2023-2043
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Sebaran Lokasi SPAM
Konsep	Sistem Penyediaan Air Minum
Definisi/Deskripsi	Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Sebaran SPAM semakin meluas sebagai upaya strategis untuk menjamin ketersediaan air bersih yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan mandat pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.
Periodesasi	2023-2043
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Sebaran Pembangkit Listrik
Konsep	Pembangkit Listrik
Definisi/Deskripsi	Pembangkit Listrik adalah fasilitas atau sistem yang mengubah berbagai bentuk energi (seperti energi air, angin, panas bumi, bahan bakar fosil, atau surya) menjadi energi listrik melalui proses transformasi, umumnya melibatkan generator yang digerakkan turbin untuk menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan lainnya
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak peta sebaran pembangkit listrik menunjukkan perkembangan signifikan dalam perencanaan energi, diversifikasi sumber energi (terutama terbarukan seperti surya, panas bumi), peningkatan aksesibilitas energi, serta upaya mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia
Periodesasi	2023-2043
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peta Sistem Perkotaan
Konsep	Sistem Perkotaan
Definisi/Deskripsi	Sistem perkotaan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang saling terhubung dan berinteraksi melalui jaringan prasarana, pelayanan, serta aktivitas sosial-ekonomi, yang membentuk hierarki dan keterkaitan fungsi antar kota dalam mendukung pembangunan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	sistem perkotaan semakin baik, interpretasinya adalah kota menjadi lebih teratur, efisien, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya, dengan ditandai pengurangan masalah kekumuhan, kemacetan, dan pencemaran, peningkatan aksesibilitas infrastruktur, fasilitas, dan layanan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
Periodesasi	2023-2043
Metode	kompromim

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan
Konsep	Kecelakaan Lalu Lintas
Definisi/Deskripsi	Angka kematian karena kecelakaan lalu lintas (road traffic injury) adalah jumlah kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas, yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 penduduk. Angka kematian ini terus meningkat setiap tahun seiring dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Angka kematian lalu lintas di Indonesia sangat sulit ditentukan secara pasti karena ketiadaan sistem surveilans terintegrasi. Dengan demikian, saat ini data kematian akibat kecelakaan lalu lintas diperoleh dari sistem registrasi vital.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas} / \text{jumlah kendaraan}) \times 10.000\%$
Interpretasi	Nilai rasio yang tinggi menunjukkan tingkat kecelakaan yang relatif besar dibandingkan jumlah kendaraan, yang dapat mengindikasikan rendahnya keselamatan berlalu lintas, kurangnya kepatuhan terhadap aturan, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, atau lemahnya pengawasan. Nilai rasio yang rendah mencerminkan kondisi lalu lintas yang lebih aman, meningkatnya kesadaran masyarakat, efektivitas penegakan hukum, serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rute Angkutan Sekolah Gratis
Konsep	Rute Angkutan
Definisi/Deskripsi	Jalur perjalanan angkutan yang disediakan pemerintah daerah secara cuma-cuma bagi peserta didik dari titik penjemputan tertentu menuju sekolah dan sebaliknya, yang ditetapkan secara resmi untuk mendukung akses pendidikan yang aman, terjangkau, dan merata.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rute
Rumus Perhitungan	jumlah Rute Angkutan Sekolah Gratis
Interpretasi	Semakin banyak rute angkutan sekolah gratis yang tersedia, menunjukkan semakin luas jangkauan layanan transportasi pendidikan dan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Angkutan Sekolah Gratis
Konsep	Jumlah Angkutan
Definisi/Deskripsi	Jumlah unit kendaraan angkutan sekolah yang disediakan dan dioperasikan secara gratis oleh pemerintah daerah untuk melayani peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dalam periode waktu satu tahun.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Angkutan Sekolah Gratis
Interpretasi	Nilai meningkat: menunjukkan bertambahnya fasilitas angkutan sekolah gratis yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan keselamatan siswa. Nilai menurun atau tetap: menunjukkan keterbatasan penambahan sarana atau optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Perlintasan Kereta Api
Konsep	Perlindungan Kereta Api yang Ditangani
Definisi/Deskripsi	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pengelolaan dan pengawasan terhadap perlindungan kereta api. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi melalui pengelolaan yang baik atas infrastruktur perlindungan kereta api yang ada.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perlindungan Kereta Api
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan banyaknya perlindungan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan memerlukan pengawasan serta penanganan. Nilai menurun dapat mengindikasikan keberhasilan penutupan perlindungan ilegal atau pembangunan perlindungan tidak sebanding.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Zoss (Zona Selamat Sekolah)
Konsep	Zona Selamat Sekolah
Definisi/Deskripsi	Jumlah kawasan di sekitar sekolah yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan lalu lintas sesuai ketentuan sebagai Zona Selamat Sekolah (ZOSS) guna menjamin keselamatan pejalan kaki, khususnya peserta didik.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Zona
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ZOSS yang tersedia menunjukkan semakin baik komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi pelajar. Semakin banyak zona selamat sekolah, semakin baik upaya dalam mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Terminal dan Ruang Laktasi
Konsep	Ketersediaan ruang laktasi pada terminal tipe C
Definisi/Deskripsi	Jumlah fasilitas terminal transportasi dan ruang laktasi yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan publik serta pemenuhan ibu menyusui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Klasifikasi	Tipe Terminal
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah terminal yang tersedia + jumlah ruang laktasi yang tersedia dan berfungsi
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah terminal dan ruang laktasi menunjukkan semakin baik ketersediaan fasilitas publik yang inklusif dan mendukung kenyamanan masyarakat, khususnya ibu dan anak.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Angkutan Umum
Konsep	Angkutan Umum
Definisi/Deskripsi	Jumlah Angkutan Umum yang dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu angkutan orang dan angkutan barang.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Angkutan Umum
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah angkutan umum menunjukkan ketersediaan sarana transportasi yang lebih baik untuk menunjang mobilitas masyarakat, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan dan kualitas layanan agar tidak menimbulkan kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat
Konsep	Sosialisasi
Definisi/Deskripsi	jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat oleh perangkat daerah/instansi, dalam rangka penyampaian informasi, kebijakan, program, atau layanan pemerintah.
Klasifikasi	jenis sosialisasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah pelaksanaan sosialisasi penyampaian langsung kepada masyarakat, menunjukkan semakin aktifnya pemerintah dalam menjalin komunikasi langsung dan meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang
Konsep	Jumlah kejadian kecelakaan
Definisi/Deskripsi	Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan dalam periode waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kejadian
Rumus Perhitungan	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang
Interpretasi	Nilai semakin tinggi menunjukkan tingkat risiko dan keselamatan perlintasan sebidang semakin rendah. Nilai semakin rendah menunjukkan kondisi keselamatan perlintasan sebidang semakin baik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan
Konsep	Kejadian Kecelakaan diperlintasan
Definisi/Deskripsi	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di area perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan raya dalam periode waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kejadian
Rumus Perhitungan	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan
Interpretasi	Nilai indikator meningkat menunjukkan meningkatnya tingkat risiko dan rendahnya keselamatan di perlintasan, sehingga diperlukan peningkatan pengamanan, sosialisasi, dan penegakan aturan lalu lintas. Nilai indikator menurun menunjukkan adanya perbaikan tingkat keselamatan perlintasan, yang dapat mencerminkan efektivitas kebijakan, infrastruktur, dan upaya pengawasan. Nilai indikator stabil perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah kondisi keselamatan sudah optimal atau masih terdapat potensi risiko yang belum tertangani.
riodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota menurut kecamatan
Konsep	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
Definisi/Deskripsi	-Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. -Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
Interpretasi	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana bertujuan untuk membantu korban untuk melangsungkan hidup yang layak demi kesejahteraan hidupnya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Konsep	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
Definisi/Deskripsi	-Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. -Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
Interpretasi	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana bertujuan untuk membantu korban untuk melangsungkan hidup yang layak demi kesejahteraan hidupnya
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Konsep	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
Definisi/Deskripsi	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tahun n - jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tahun n-1
Interpretasi	rumah tidak layak huni menjadi sasaran prioritas pembangunan demi meningkatkan kelayakan hidup masyarakat. Semakin sedikit RTLH menunjukkan semakin banyak RTLH yang ditangani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana menurut kecamatan
Konsep	rumah yang berada pada kawasan rawan bencana
Definisi/Deskripsi	- Kawasan rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami bencana alam atau bencana lainnya - Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana
Interpretasi	rumah yang berada pada kawasan bencana perlu dijadikan fokus penanganan pemerintah dalam menjamin keberlangsungan hidup layak dan aman bagi mereka
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas kawasan permukiman kumuh menurut kecamatan
Konsep	Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi/Deskripsi	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh berat (skor 60-80), 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan (skor 16-37). Kawasan kumuh bisa diukur dengan melihat kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. Jumlah skor dari 7 parameter sesuai Permen PUPR No. 14/2018 untuk menentukan nilai kumuh.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Luas
Satuan	Ha
Rumus Perhitungan	Luas kawasan permukiman kumuh
Interpretasi	semakin sedikit luas kawasan kumuh, semakin banyak kawasan kumuh yang sudah ditangani
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah yang terkena bencana alam menurut kecamatan
Konsep	rumah yang terkena bencana alam
Definisi/Deskripsi	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah yang terkena bencana alam
Interpretasi	semakin banyak rumah yang terkena bencana alam, menunjukkan bahwa bencana yang terjadi memiliki dampak yang luas/besar
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan
Konsep	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
Definisi/Deskripsi	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
Interpretasi	rumah tidak layak huni menjadi sasaran prioritas pembangunan demi meningkatkan kelayakan hidup masyarakat
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Rumah Layak Huni
Konsep	Rumah Layak Huni
Definisi/Deskripsi	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Rumah Layak Huni} / \text{Jumlah Total Rumah}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Persentase Rumah Layak Huni (RLH) berarti semakin banyak rumah tangga yang memenuhi standar hunian layak, mencakup aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas (min. 7,2 m ² /kapita), akses air minum layak, sanitasi layak, serta pencahayaan dan penghawaan yang memadai, yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh
Konsep	Pengurangan luasan kawasan kumuh
Definisi/Deskripsi	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh berat (skor 60-80). 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan (skor 16-37). Kawasan kumuh bisa diukur dengan melihat kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. Jumlah skor dari 7 parameter sesuai Permen PUPR No. 14/2018 untuk menentukan nilai kumuh.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{luas total kawasan kumuh tahun } n - \text{luas kawasan kumuh yang ditangani tahun } n - 1) / \text{luas total kawasan kumuh tahun } n \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak persentasenya, semakin banyak kawasan permukiman kumuh yang belum ditangani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
Konsep	Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani
Definisi/Deskripsi	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh terbagi menjadi : 1). Kumuh berat (skor 60-80). 2). Kumuh sedang (skor 38-59), 3). Kuning ringan (skor 16-37). Kawasan kumuh bisa diukur dengan melihat kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. Jumlah skor dari 7 parameter sesuai Permen PUPR No. 14/2018 untuk menentukan nilai kumuh.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{luas kawasan permukiman kumuh yang sudah ditangani} / \text{luas total kawasan permukiman kumuh}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak persentasenya, semakin banyak kawasan permukiman kumuh yang sudah ditangani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Konsep	perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Definisi/Deskripsi	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU adalah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum. PSU merupakan kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau
Klasifikasi	desa/kelurahan, kecamatan, nama perumahan
Ukuran	Jumlah
Satuan	perumahan
Rumus Perhitungan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Interpretasi	semakin banyak perumahan yang sudah dilengkapi PSU menunjukkan kemajuan dalam sektor perumahan dan tata kota yang lebih baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Konsep	pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya
Definisi/Deskripsi	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi berarti luas tanah yang telah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang atau izin peruntukan yang diberikan dalam suatu wilayah izin lokasi.
Klasifikasi	Nama PT (perumahan)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{luas tanah yang dimanfaatkan sesuai peruntukan} / \text{luas izin lokasi yang diterbitkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Jika persentasenya rendah, berarti masih ada lahan yang belum dimanfaatkan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam izin lokasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Konsep	penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Definisi/Deskripsi	Penetapan tanah perumahan untuk pembangunan fasilitas umum adalah kebijakan yang mengatur alokasi sebagian dari kawasan perumahan untuk digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) guna mendukung kebutuhan masyarakat yang tinggal di area tersebut
Klasifikasi	Nama perumahan, lokasi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah penetapan luas tanah untuk pembangunan fasilitas umum} / \text{jumlah kebutuhan luas tanah untuk pembangunan fasilitas umum}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar porsi lahan yang digunakan untuk fasilitas umum, yang berkontribusi pada kenyamanan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, jika persentasenya rendah, bisa menyebabkan keterbatasan akses ke fasilitas penting seperti jalan, taman, tempat ibadah, dan sekolah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Konsep	lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Definisi/Deskripsi	lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Klasifikasi	wilayah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lokasi
Rumus Perhitungan	Jumlah Lokasi pembangunan
Interpretasi	Semakin banyak lokasi pembangunan untuk investasi menunjukkan peningkatan minat dan kepercayaan investor karena adanya peluang keuntungan (potensi pasar, sumber daya alam, upah buruh murah), didukung kemudahan kebijakan pemerintah (perizinan, infrastruktur), serta pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan memperluas ketersediaan barang/jasa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS)
Konsep	Rumah Layak Huni (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS)
Definisi/Deskripsi	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS)
Interpretasi	Semakin banyak penerima BSPS berarti semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terbantu mewujudkan rumah layak huni, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup melalui perbaikan rumah secara swadaya (gotong royong) dengan stimulan pemerintah, yang berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Di Luar Kawasan Kumuh)
Konsep	Rumah Layak Huni (Di Luar Kawasan Kumuh)
Definisi/Deskripsi	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Di Luar Kawasan Kumuh) adalah data statistik mengenai keluarga atau individu yang menerima bantuan atau program untuk membangun/merehabilitasi rumah tinggalnya agar memenuhi standar layak huni (kualitas, kesehatan, kenyamanan, sanitasi, dan legalitas) di wilayah yang secara definisi bukan merupakan kawasan kumuh, berbeda dengan program penanganan kumuh yang fokus pada kawasan kumuh.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni
Interpretasi	Semakin banyak penerima manfaat rumah layak huni (di luar kawasan kumuh)" mengindikasikan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di luar area kumuh, menunjukkan adanya perluasan jangkauan bantuan, peningkatan kesadaran, atau adanya perbaikan data sasaran, meskipun implementasi bisa menghadapi tantangan seperti tepat sasaran dan keberlanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Dalam Kawasan Kumuh)
Konsep	Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Dalam Kawasan Kumuh)
Definisi/Deskripsi	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Layak Huni (Dalam Kawasan Kumuh) adalah total individu atau keluarga yang mendapatkan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah agar memenuhi standar kelayakan (seperti kualitas bangunan, sanitasi, air bersih, luas bangunan, pencahayaan) di area permukiman yang sebelumnya tergolong kumuh, diukur dari jumlah unit rumah atau kepala keluarga yang menerima manfaat program pemerintah.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah unit RLH(Dalam Kawasan Kumuh)} / \text{Total unit rumah}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak penerima manfaat program Rumah Layak Huni (RLH) di kawasan kumuh mengindikasikan peningkatan kesadaran dan kebutuhan mendesak perumahan layak
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah backlog kepemilikan rumah
Konsep	backlog kepemilikan rumah
Definisi/Deskripsi	Jumlah backlog kepemilikan rumah adalah selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia, sering kali dihitung berdasarkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri (meski layak huni) atau yang tinggal di hunian tidak layak
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	$\text{Backlog} = (\text{Faktor Penambah}) - (\text{Faktor Pengurang}) + (\text{Faktor Eksternal})$
Interpretasi	Semakin banyak backlog kepemilikan rumah berarti terjadi kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan hunian layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menunjukkan banyak keluarga tidak memiliki rumah sendiri akibat harga mahal
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah luasan kawasan Permukiman, kumuh yang ditangani
Konsep	Kawasan Permukiman
Definisi/Deskripsi	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	luasan
Rumus Perhitungan	$(\text{Luas Kumuh Ditangani} / \text{Total Luas Kumuh}) \times 100\%$
Interpretasi	semakin banyak luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani" berarti upaya pemerintah atau pengembang berhasil memperluas cakupan program penanganan kekumuhan, menunjukkan peningkatan komitmen dan sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur, lingkungan, dan kualitas hidup warga di area kumuh
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)
Konsep	Rumah di lokasi rawan bahaya
Definisi/Deskripsi	kawasan perumahan dan permukiman di lokasi yang dapat. menimbulkan bahaya
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	$\text{Risiko} = \text{Bahaya} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas}$
Interpretasi	Semakin banyak rumah di lokasi rawan bahaya seperti bantaran sungai dan sempadan rel menimbulkan risiko besar: banjir akibat aliran air terhambat, pencemaran lingkungan (air dan tanah), kerusakan struktur bangunan (rapuh, ambruk), ancaman keselamatan hidup penghuni, serta konflik sosial dan masalah legalitas kepemilikan karena seringkali ilegal, menciptakan permukiman kumuh yang tidak sehat dan mengganggu fungsi ekologis sungai/rel.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Layak Huni
Konsep	Rumah Layak Huni
Definisi/Deskripsi	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	$\text{RLH} = (\text{Jumlah Rumah Layak Huni} / \text{Jumlah Total Rumah})$
Interpretasi	Semakin banyak rumah layak huni" menginterpretasikan peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat karena berarti lebih banyak keluarga memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas, sanitasi, air bersih, pencahayaan, dan penghawaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi backlog perumahan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang di renovasi
Konsep	Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
Definisi/Deskripsi	Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rumah
Rumus Perhitungan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang di renovasi
Interpretasi	Semakin banyak RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) yang direnovasi mengindikasikan peningkatan perhatian pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kebijakan Bidang PKP
Konsep	Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Definisi/Deskripsi	Kebijakan terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mencakup peraturan, pedoman, dan program untuk mengatur perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, serta pengendalian perumahan dan permukiman agar memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam kerangka hukum seperti UU No. 1 Tahun 2011.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah Kebijakan Bidang PKP
Interpretasi	Semakin banyak kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) mengindikasikan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang kompleks, mencakup pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyaluran subsidi (seperti FLPP), dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program seperti BENAR-PKP, yang menuntut regulasi yang terintegrasi, pengawasan ketat, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target "3 Juta Rumah" dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat urban.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama
Konsep	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama
Definisi/Deskripsi	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah PSU yang tersedia dari hasil kerja sama
Interpretasi	Semakin banyak Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) hasil kerja sama, interpretasinya adalah peningkatan kualitas hidup, daya tarik wilayah, pertumbuhan ekonomi, efisiensi layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, karena ketersediaan PSU yang memadai memfasilitasi kegiatan sehari-hari
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
Konsep	rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Definisi/Deskripsi	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan atau Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	rumah tangga
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah/jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	semakin tinggi jumlah RT yang menerima pengumpulan sampah menunjukkan bahwa cakupan layanan persampahan di suatu wilayah sudah baik, mencerminkan akses rumah tangga terhadap layanan dasar lingkungan yang layak, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan
Konsep	penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan
Definisi/Deskripsi	Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di perkotaan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin tinggi nilai semakin baik sistem pengolahan sampah perkotaan termasuk ketersediaan infrastruktur persampahan, efektivitas layanan pengangkutan, partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah, serta penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan
Konsep	pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan
Definisi/Deskripsi	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan adalah upaya untuk mengurangi volume dan dampak negatif sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga serta aktivitas komersial, institusional, dan industri kecil yang menghasilkan sampah serupa dengan sampah rumah tangga.
Klasifikasi	wilayah perkotaan
Ukuran	-
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Persentase Pengurangan Sampah=(Jumlah Sampah yang Dikurangi melalui 3R/Total Sampah yang Dihasilkan)x100%
Interpretasi	semakin banyak masyarakat yang mengelola sampah melalui 3R maka semakin sedikit timbulan sampah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan RTH perkotaan
Konsep	Ruang Terbuka Hijau
Definisi/Deskripsi	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/Jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	(jumlah luas RTH saat ini/luas RTH yang seharusnya ada)x100%
Interpretasi	Semakin Luas RTH maka semakin terpenuhi kebutuhan RTH dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota
Konsep	Pengelolaan Sampah
Definisi/Deskripsi	Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Klasifikasi	Kabupaten Nganjuk
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Persentase Pengelolaan Sampah = $\frac{\sum \text{sampah yang dikelola}}{\sum \text{Timbulan sampah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi presentase pengelolaan sampah maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan kebersihan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota
Konsep	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota
Definisi/Deskripsi	serangkaian proses administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menerima, menelaah, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan atau laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan yang timbul akibat penerbitan izin lingkungan, izin PPLH, atau pelaksanaan regulasi lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Tingkat Penyelesaian(%)=(Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan/Jumlah Total Pengaduan Masuk)x100
Interpretasi	semakin banyak masyarakat yang melakukan pengaduan maka semakin banyak pengaduan yang diselesaikan dan timbulan sampah semakin berkurang
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Konsep	Status mutu air
Definisi/Deskripsi	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah metode yang sederhana digunakan dalam survei umum kualitas air, melibatkan penggunaan parameter dan metode khusus untuk menilai kualitas air..
Klasifikasi	sampel air
Ukuran	-
Satuan	inseks
Rumus Perhitungan	Persentase Jumlah Titik Pantau Air Sungai Indeks Pencemaran Air x Koefisien)
Interpretasi	klasifikasi kualitas air berdasarkan skor yang menunjukkan tingkat pencemaran.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Konsep	Kualitas Udara
Definisi/Deskripsi	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu angka yang mencerminkan tingkat kualitas atau kebaikan udara berdasarkan karakteristik komponen penyusunnya. IKU merupakan representasi atau nilai yang dihasilkan dari transformasi parameter individual polusi udara yang terkait, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum..
Klasifikasi	sampel udara
Ukuran	-
Satuan	indeks
Rumus Perhitungan	" $IKU_p = Indeks\ kualitas\ udara\ untuk\ polutan\ p$ $C = Konsentrasi\ polutan\ yang\ diukur$ $C_{High} = Batas\ atas\ rentang\ konsentrasi\ yang\ sesuai$ $C_{Low} = Batas\ bawah\ rentang\ konsentrasi\ yang\ sesuai$ $I_{High} = Batas\ atas\ indeks\ kualitas\ udara\ untuk\ rentang\ tersebut$ $I_{Low} = Batas\ bawah\ indeks\ kualitas\ udara\ untuk\ rentang\ tersebut$ "
Interpretasi	semakin rendah nilai polusi udara maka indeks kualitas udara semakin baik dan sebaliknya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Konsep	Kualitas Tutupan Lahan
Definisi/Deskripsi	indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan..
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	indeks
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - (84,3 - (TL/100)50/54,3)$ IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL : Tutupan Lahan LTL / LW : Luas Tutupan Lahan LW : Luas Wilayah Kabupaten/Kota
Interpretasi	Rentang nilai IKTL menunjukkan kualitas tutupan lahan, di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan kualitas tutupan lahan yang semakin baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Konsep	Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi/Deskripsi	Indeks ini merupakan nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan..
Klasifikasi	Kabupaten Nganjuk
Ukuran	-
Satuan	nilai
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi IKLH, Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk semakin Baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan
Konsep	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan
Definisi/Deskripsi	Jumlah dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan tahapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkelanjutan dalam suatu wilayah administrasi pada periode tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan yang telah disusun, ditetapkan, dan/atau diberlakukan pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah dokumen yang tersedia dan berlaku, semakin kuat dasar perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan persampahan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan
Konsep	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan
Definisi/Deskripsi	Jumlah dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan tahapan pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, atau wilayah tertentu, yang telah disusun dan ditetapkan secara resmi.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan yang telah disusun dan ditetapkan secara resmi pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia, semakin baik kesiapan perencanaan pengelolaan persampahan yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penghargaan Adipura
Konsep	penghargaan adipura
Definisi/Deskripsi	Penghargaan Adipura adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup perkotaan, mencakup aspek tata kelola persampahan, ruang terbuka hijau, kualitas lingkungan, dan partisipasi masyarakat.
Klasifikasi	kabupaten/kota
Ukuran	-
Satuan	kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak kabupaten/kota yang memperoleh Penghargaan Adipura menunjukkan semakin baik kinerja pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup perkotaan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerima Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri
Konsep	Desa/Kelurahan Berseri
Definisi/Deskripsi	Banyaknya penerima penghargaan Desa/Kelurahan Berseri yang merupakan program inovasi Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan.
Klasifikasi	kategori penghargaan
Ukuran	total
Satuan	Desa/Kelurahan Berseri
Rumus Perhitungan	Penjumlahan penerima penghargaan Desa/Kelurahan Berseri per kategori
Interpretasi	- Kategori Pratama: minimal 65% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori pratama; - Kategori Madya: minimal 70% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori madya; dan - Kategori Mandiri: minimal 75% dari nilai total Desa/Kelurahan Berseri berdasar kategori mandiri.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerima Penghargaan Kalpataru
Konsep	Penerima Penghargaan Kalpataru
Definisi/Deskripsi	penghargaan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk memotivasi dan menghormati organisasi, perusahaan, atau individu yang memiliki kontribusi besar dalam memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Penghargaan ini diterima oleh mereka yang memiliki praktik lingkungan yang baik dan berkelanjutan, dan menunjukkan komitmen untuk memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Klasifikasi	jenis penghargaan
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerima Kalpataru = Total individu + kelompok + lembaga penerima penghargaan dalam satu tahun
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penerima Penghargaan Kalpataru menunjukkan meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan peran aktif masyarakat serta lembaga dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah
Konsep	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah
Definisi/Deskripsi	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Tingkat emisi gas rumah kaca (ton CO ₂ e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Perbandingan volume Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sub Sektor Persampahan dengan periode sebelumnya
Interpretasi	Semakin tinggi penurunan emisi GRK maka semakin baik tingkat kualitas lingkungan hidup
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Timbulan Limbah B3 (TON)
Konsep	Limbah B3
Definisi/Deskripsi	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Timbulan limbah B3 dapat bervariasi tergantung pada jenis industri, skala kegiatan, dan praktik pengelolaan limbah yang diterapkan. Peningkatan aktivitas industri atau perubahan dalam proses produksi dapat menghasilkan peningkatan timbulan limbah B3
Periodesasi	Tahunan

Metode	Kompilasi Produk Administrasi
ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (TON)
Konsep	Limbah B3 yang dikelola
Definisi/Deskripsi	Persentase Limbah B3 yang Terkelola adalah persentase dari total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu periode yang telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan, dibandingkan dengan total jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Limbah B3 yang dikelola / Jumlah Total Limbah B3 yang dihasilkan x 100%
Interpretasi	Semakin banyak limbah B3 yang dikelola dengan benar, artinya semakin baik pula kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Ini mencerminkan bahwa kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya telah memiliki sistem penanganan yang sesuai, sehingga risiko terhadap kesehatan dan lingkungan bisa ditekan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah sampah (Timbulan Sampah, Jumlah Sampah yang dikelola, Jumlah Sampah yang didaur ulang)
Konsep	Mengetahui tingkat produksi sampah serta efektivitas pengelolaan dan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dalam rangka mendukung lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Definisi/Deskripsi	- Timbulan Sampah: Sampah yang dihasilkan oleh penduduk dan aktivitas ekonomi. - Sampah yang Dikelola: Sampah yang telah tertangani melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. - Sampah yang Didaur Ulang: Sampah yang diolah kembali menjadi bahan atau produk baru melalui kegiatan daur ulang.
Klasifikasi	Lingkungan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Sampah yang Dikelola+Jumlah Sampah yang Didaur Ulang / Timbulan Sampah x 100%
Interpretasi	- Tingginya Timbulan Sampah menunjukkan meningkatnya aktivitas penduduk dan ekonomi, namun juga menjadi tantangan pengelolaan lingkungan. - Meningkatnya Sampah yang Dikelola mencerminkan kinerja pengelolaan sampah yang semakin baik. - Meningkatnya Sampah yang Didaur Ulang menunjukkan keberhasilan program pengurangan sampah dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Parameter Kualitas Udara
Konsep	Kualitas Udara
Definisi/Deskripsi	Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO2 , SO2 dan PM2,5
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	indeks
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin rendah konsentrasi parameter pencemar dibandingkan baku mutu yang ditetapkan, maka kualitas udara semakin baik dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sebaliknya, nilai yang melebihi baku mutu menunjukkan kondisi udara tercemar dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serta lingkungan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Dikelola
Konsep	Limbah B3 yang dikelola
Definisi/Deskripsi	Persentase Limbah B3 yang Terkelola adalah persentase dari total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu periode yang telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan, dibandingkan dengan total jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola / Jumlah total Limbah B3 yang dihasilkan x 100%
Interpretasi	- Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik pengelolaan limbah B3 dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. - Nilai persentase yang rendah mengindikasikan masih adanya limbah B3 yang belum dikelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Sampah yang Dikelola
Konsep	Pengelolaan Sampah
Definisi/Deskripsi	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18/2008). Persentase sampah nasional yang terkelola adalah banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan.
Klasifikasi	Jenis Sampah
Ukuran	persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah timbulan sampah kabupaten yang dikelola / Jumlah timbulan sampah kabupaten yang diproduksi secara keseluruhan x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase sampah yang dikelola, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Nilai yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan sarana, prasarana, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Dinas Pertanian

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan produksi pertanian
Konsep	peningkatan produksi pertanian
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui jumlah peningkatan produksi pertanian
Klasifikasi	produk pertanian
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Produksi Tahun Terakhir–Produksi Tahun Sebelumnya dibagi Produksi Tahun Sebelumnya dikali 100%
Interpretasi	persentase peningkatan produksi pertanian berfungsi untuk menilai seberapa besar perubahan hasil pertanian dalam periode tertentu
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase peningkatan produksi peternakan
Konsep	peningkatan produksi peternakan
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui jumlah peningkatan produksi peternakan
Klasifikasi	produk peternakan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Produksi Tahun Terakhir–Produksi Tahun Sebelumnya dibagi Produksi Tahun Sebelumnya dikali 100%
Interpretasi	persentase peningkatan produksi peternakan berfungsi untuk menilai seberapa besar perubahan hasil peternakan dalam periode tertentu
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produktivitas pertanian perhektar pertahun
Konsep	Produksi pertanian
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui peningkatan produksi pertanian.
Klasifikasi	Produk pertanian
Ukuran	Persentase
Satuan	Persenn
Rumus Perhitungan	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) dibagi Luas panen (ha) dikali 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin tinggi peningkatan produksi pertanian
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Konsep	Kasus penyakit hewan
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan.
Klasifikasi	Kasus penyakit hewan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persenn
Rumus Perhitungan	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun n-1 – jumlah kejadian tahun n/kasus penyakit hewan menular tahun n dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun n-1 dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin tinggi penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	NTP
Konsep	Nilai Tukar Petani
Definisi/Deskripsi	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Indeks harga yang diterima petani (It) didapatkan dari hasil survei harga di tingkat produsen - Indeks harga yang dibayar petani (Ib) didapatkan dari hasil survei harga konsumen di pasar pedesaan - $NTP = \frac{IT}{IB} \times 100\%$
Interpretasi	- NTP di atas 100 berarti petani mengalami surplus. Artinya, pendapatan petani lebih tinggi dari pengeluarannya. - NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami impas. Artinya, kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga barang konsumsi. - NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit. Artinya, kenaikan harga produksi lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	semester
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan
Konsep	Pupuk
Definisi/Deskripsi	Bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan
Interpretasi	Semakin banyak bantuan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) disalurkan mengindikasikan peningkatan komitmen pemerintah untuk mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, memperbaiki kesehatan tanah, dan meningkatkan kemandirian petani dalam produksi pupuk organik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	semester
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
Konsep	Kelompok Tani
Definisi/Deskripsi	Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
Klasifikasi	Nama Kelompok Tani, Jenis Kelamin, Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian
Konsep	Komoditas Unggulan Pertanian
Definisi/Deskripsi	Daftar komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, daya saing, dan potensi pasar yang kuat di suatu daerah. Komoditas unggulan ini ditetapkan berdasarkan hasil produksi, kontribusi terhadap pendapatan petani, dan peluang pengembangan usaha tani.
Klasifikasi	Jenis Komoditas Unggulan
Ukuran	Berat
Satuan	Berat
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan
Konsep	Komoditas Unggulan Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Daftar komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, daya saing, dan potensi pasar yang kuat di suatu daerah. Komoditas unggulan ini ditetapkan berdasarkan hasil produksi, kontribusi terhadap pendapatan, dan peluang pengembangan usaha perkebunan
Klasifikasi	Jenis Komoditas Unggulan
Ukuran	Berat
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura
Konsep	Komoditas Unggulan Holtikultura
Definisi/Deskripsi	Daftar komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi, daya saing, dan potensi pasar yang kuat di suatu daerah. Komoditas unggulan ini ditetapkan berdasarkan hasil produksi, kontribusi terhadap pendapatan, dan peluang pengembangan usaha hortikultura
Klasifikasi	Jenis Komoditas Unggulan
Ukuran	Berat
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan
Konsep	produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan
Definisi/Deskripsi	Produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan adalah ukuran kemampuan lahan perkebunan dalam menghasilkan output berupa hasil panen komoditas tertentu (seperti kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, karet, dan sejenisnya) per satuan luas lahan dalam periode waktu tertentu, yang mencerminkan tingkat efisiensi dan kinerja usaha perkebunan
Klasifikasi	-
Ukuran	rasio
Satuan	Ton per hektare (ton/ha), Kilogram per hektare (kg/ha)
Rumus Perhitungan	Total Produksi Komoditas Perkebunan/luas areal tanam
Interpretasi	semakin tinggi nilai produktivitas menunjukkan semakin optimal pemanfaatan lahan, penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, serta meningkatnya hasil dan pendapatan petani
Periodesasi	Tahunan

Metode	Kompromin
ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian
Konsep	SDM Pelatihan Pertanian
Definisi/Deskripsi	banyaknya sumber daya manusia, baik petani, pelaku usaha tani, penyuluh, maupun masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, yang mengikuti kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, atau peningkatan kapasitas di bidang pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak SDM yang mengikuti pelatihan menunjukkan meningkatnya upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan adopsi teknologi pertanian
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan
Konsep	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan
Definisi/Deskripsi	dengan adanya data luas areal perkebunan dapat menjadi perencanaan pengembangan areal baru (menambah produksi dan pendapatan petani), pengelolaan efisien (mengatur pemanen, transportasi, dan pengawasan), penyusunan rencana kerja (seperti Rencana Kerja Bulanan/RKB), pemantauan kesehatan tanaman, serta untuk pengendalian biaya dan peramalan produksi di masa depan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	mengetahui luas areal perkebunan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas lahan beririgasi
Konsep	Luas lahan beririgasi
Definisi/Deskripsi	Lahan beririgasi adalah lahan pertanian yang pasokan airnya dikendalikan dan diatur secara teratur melalui sistem irigasi, seperti irigasi teknis, setengah teknis, atau tersier. Lahan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama beras, dan meningkatkan fungsi ekologis pertanian.
Klasifikasi	Luas Lahan, Lokasi Lahan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	ujian luas lahan beririgasi adalah untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, dan mendukung ketahanan pangan nasional
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Konsep	LP2B
Definisi/Deskripsi	bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
Klasifikasi	berdasarkan kecamatan
Ukuran	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Satuan	Luas
Rumus Perhitungan	Hektar
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Panen Komoditas Pertanian
Konsep	Luas Panen Komoditas Pertanian
Definisi/Deskripsi	Luas panen komoditas Pertanian merujuk pada jumlah total lahan atau area pertanian yang telah ditanami dengan tanaman pangan dan kemudian dipanen pada suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran penting dalam pertanian karena mencerminkan sejauh mana tanaman pangan telah berhasil ditanam dan dipanen di suatu wilayah atau negara.
Klasifikasi	Luas, Kecamatan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas Panen Komoditas Pertanian
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura
Konsep	Luas Panen Komoditas Holtikultura
Definisi/Deskripsi	Luas panen komoditas Holtikultura merujuk pada jumlah total lahan atau area Holtikultura yang telah ditanami dengan tanaman pangan dan kemudian dipanen pada suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun Holtikultura. Ini adalah ukuran penting dalam Holtikultura karena mencerminkan sejauh mana tanaman pangan telah berhasil ditanam dan dipanen di suatu wilayah atau negara.
Klasifikasi	Luas, Kecamatan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas Panen Komoditas Holtikultura
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tanam Komoditas Pertanian
Konsep	Luas Tanam Komoditas Pertanian
Definisi/Deskripsi	Luas tanam komoditas Pertanian merujuk pada jumlah total lahan atau area pertanian yang telah ditanami pada suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran penting dalam pertanian karena mencerminkan sejauh mana tanaman pangan telah berhasil ditanam di suatu wilayah.
Klasifikasi	Luas, Kecamatan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas Tanam Komoditas Pertanian
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Total Lahan Pertanian Pangan
Konsep	Lahan Pertanian Pangan
Definisi/Deskripsi	Luas lahan pertanian adalah ukuran dari total area lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian pangan, seperti penanaman tanaman, peternakan, perkebunan, dan aktivitas pertanian lainnya. Ini mencakup semua area yang dikelola oleh petani atau produsen pertanian untuk tujuan menghasilkan makanan, bahan baku pertanian, atau produk pertanian lainnya.
Klasifikasi	Wilayah, Jenis Penggunaan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Lahan Pertanian Pangan
Interpretasi	Luas lahan pertanian adalah ukuran dari total area lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Alokasi Pupuk Bersubsidi
Konsep	Pupuk
Definisi/Deskripsi	Banyaknya penyaluran pupuk dengan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Total
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Total Alokasi Pupuk Bersubsidi
Interpretasi	Pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Harga Komoditas Utama Hortikultura di Tingkat Produsen
Konsep	Komoditas Utama Hortikultura
Definisi/Deskripsi	nilai jual komoditas hortikultura utama, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias, yang diterima langsung oleh produsen atau petani pada saat transaksi penjualan di lokasi produksi atau tingkat pertama pemasaran
Klasifikasi	Jenis Komoditas Utama Hortikultura
Ukuran	Harga
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	harga yang stabil dan cenderung meningkat mencerminkan permintaan pasar yang baik, efisiensi rantai pemasaran, serta potensi peningkatan pendapatan petani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Harga Komoditas Utama Tanaman Pangan di Tingkat Produsen
Konsep	Komoditas Utama Tanaman Pangan
Definisi/Deskripsi	nilai jual komoditas tanaman pangan utama, seperti padi, jagung, kedelai, dan komoditas pangan strategis lainnya, yang diterima langsung oleh produsen atau petani pada saat penjualan hasil panen di tingkat pertama pemasaran
Klasifikasi	Jenis Komoditas Utama Tanaman Pangan
Ukuran	Harga
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	harga yang layak, stabil, dan kompetitif mencerminkan keberpihakan pasar terhadap petani, jaminan pendapatan yang lebih baik, serta keberlanjutan usaha tani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya
Konsep	Benih Bersertifikat Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Benih
Rumus Perhitungan	Total Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia
Konsep	Benih Bersertifikat Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang.
Klasifikasi	Jumlah Batang
Ukuran	Jumlah
Satuan	Batang
Rumus Perhitungan	Total Benih Bersertifikat Perkebunan
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi
Konsep	Benih perkebunan berbentuk batang
Definisi/Deskripsi	Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih
Klasifikasi	Jumlah benih
Ukuran	Jumlah benih
Satuan	Batang
Rumus Perhitungan	Total benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi
Konsep	Benih perkebunan berbentuk biji
Definisi/Deskripsi	Banyaknya benih biji perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih
Klasifikasi	Jumlah benih
Ukuran	Jumlah benih
Satuan	Anakan
Rumus Perhitungan	Total benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi
Konsep	Benih perkebunan berbentuk mata tumbuh
Definisi/Deskripsi	Banyaknya benih mata tumbuh perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih
Klasifikasi	Jumlah benih
Ukuran	Jumlah benih
Satuan	Mata tumbuh
Rumus Perhitungan	Total benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah benih perkebunan berbentuk setek yang diperbanyak/ diproduksi
Konsep	Benih perkebunan berbentuk setek
Definisi/Deskripsi	Banyaknya benih mata tumbuh perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih
Klasifikasi	Jumlah benih
Ukuran	Jumlah benih
Satuan	Setek
Rumus Perhitungan	Total benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Benih Ternak yang beredar
Konsep	Benih ternak
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih ternak yang telah diedarkan dimanfaatkan
Klasifikasi	Jenis Benih ternak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Rumus Perhitungan	Total benih ternak yang beredar
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah benih ternak yang bermutu
Konsep	Benih ternak bermutu
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih/bibit ternak bersertifikat yang telah memenuhi standar bermutu
Klasifikasi	Jenis Benih ternak
Ukuran	Jumlah
Satuan	ekor
Rumus Perhitungan	Total benih ternak yang bermutu
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan
Konsep	benih ternak
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu
Klasifikasi	Jenis Benih Ternak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Rumus Perhitungan	Total benih ternak yang dibutuhkan
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Benih Ternak yang tersedia
Konsep	benih ternak
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang tersedia dalam kurun waktu tertentu
Klasifikasi	Jenis Benih Ternak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Rumus Perhitungan	Total benih ternak yang tersedia
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Konsep	Balai Penyuluh
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik
Klasifikasi	Berdasarkan Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota
Konsep	lembaga penyuluhan
Definisi/Deskripsi	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota
Klasifikasi	Berdasarkan Kabupaten
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Eksisting Puskesmas
Konsep	Puskesmas
Definisi/Deskripsi	Banyaknya Puskesmas yang berfungsi baik
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total Eksisting Puskesmas
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan
Konsep	RPH
Definisi/Deskripsi	jumlah total unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah ada atau beroperasi pada suatu wilayah atau periode waktu tertentu, termasuk fasilitas yang masih dalam kondisi siap pakai maupun yang sudah tidak beroperasi.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total Eksisting Rumah Potong Hewan
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan
Konsep	Sarana pascapanen perkebunan
Definisi/Deskripsi	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan
Konsep	sarana pengolahan hasil Perkebunan
Definisi/Deskripsi	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan
Konsep	Gapoktan
Definisi/Deskripsi	total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu
Klasifikasi	Kelompok tani berdasarkan kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Poktan
Rumus Perhitungan	Total Kelompok Petani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik
Konsep	Sarana pascapanen perkebunan
Definisi/Deskripsi	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan yang berfungsi dengan baik
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik
Konsep	Sarana pengolahan hasil perkebunan
Definisi/Deskripsi	data Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan yang berfungsi dengan baik
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Total ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan
Konsep	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim
Definisi/Deskripsi	besaran wilayah perkebunan (dalam hektare) yang mengalami dampak perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Klasifikasi	Luas area / wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas Area Terdampak Perubahan Iklim Perkebunan
Interpretasi	semakin luas area terdampak adanya tekanan lingkungan dan iklim yang semakin besar terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan, sehingga memerlukan penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. dan sebaliknya, terkendalinya atau menurunnya luas area terdampak mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan sektor perkebunan, melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan, peningkatan sistem budidaya adaptif, serta penguatan manajemen risiko iklim.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani
Konsep	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI)
Definisi/Deskripsi	Jumlah luas area terdampak perubahan iklim menggambarkan besaran wilayah yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung akibat perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, tanah longsor, dan perubahan pola cuaca ekstrem yang di tangani
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas area terdampak dpi Perkebunan yang di tangani
Interpretasi	Semakin luas area perkebunan terdampak perubahan iklim yang berhasil ditangani Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi keberlanjutan sektor perkebunan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas Areal Tanaman Semusim Menurut Komoditi
Konsep	Luas Area Tanaman Semusim
Definisi/Deskripsi	Hasil dari setiap tanaman semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan
Klasifikasi	Komoditi, Luar Areal
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas Areal Tanaman Semusim Menurut Komoditi
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas Areal Tanaman Tahunan menurut Komoditi
Konsep	Luas Area Tanaman Tahunan
Definisi/Deskripsi	Hasil dari setiap tanaman tahunan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan
Klasifikasi	Komoditi, Luar Areal
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas Areal Tanaman Tanaman Menurut Komoditi
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan
Konsep	Luas Serangan OPT Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Luas Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan adalah ukuran area atau jumlah tanaman perkebunan yang terindikasi terganggu, rusak, atau bahkan mati akibat serangan hama, penyakit, atau gulma, yang dihitung untuk memantau tingkat kerusakan dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam program pengendalian OPT demi menjaga produktivitas dan kualitas hasil perkebunan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	$\text{Luas Serangan} = (\text{Luas Tanaman Rusak} / \text{Total Luas Tanaman}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak luas serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) perkebunan" mengindikasikan peningkatan risiko kerugian ekonomi, ancaman terhadap produktivitas dan kualitas hasil panen, yang memerlukan respons cepat dan terintegrasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani
Konsep	Luas Serangan OPT Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Luas Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan adalah ukuran area atau jumlah tanaman perkebunan yang terindikasi terganggu, rusak, atau bahkan mati akibat serangan hama, penyakit, atau gulma, yang dihitung untuk memantau tingkat kerusakan dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam program penanganan OPT demi menjaga produktivitas dan kualitas hasil perkebunan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	$(\text{Luas Areal Tertangani} / \text{Luas Serangan OPT yang Dilaporkan}) \times 100\%$
Interpretasi	menyebabkan menurunnya pendapatan petani yang berpotensi mengakibatkan kerugian petani yang besar. Selain menurunkan produksi, OPT juga menurunkan kualitas sehingga mempengaruhi harga produk menjadi rendah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas
Konsep	medik veteriner
Definisi/Deskripsi	Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas
Interpretasi	semakin banyak Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas menunjukkan adanya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan adaptasi terhadap isu-isu veteriner terkini, yang berdampak positif pada mutu pelayanan kesehatan hewan, ketahanan pangan (keamanan produk hewan), dan pengendalian penyakit hewan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Tanaman Semusim Menurut Komoditi
Konsep	Produksi Tanaman Semusim
Definisi/Deskripsi	Tanaman semusim merupakan istilah agrobotani bagi tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kg/Ton
Rumus Perhitungan	$\text{Total Produksi (kg/ton)} = \text{Hasil Panen per Hektar (kg/ha)} \times \text{Luas Panen (hektar)}$
Interpretasi	semakin banyak produksi tanaman semusim menurut komoditi berarti terjadi peningkatan volume hasil panen (kuantitas) untuk jenis tanaman tertentu (misal: jagung, sayuran, tebu) dalam satu musim tanam, yang mengindikasikan pertumbuhan sektor pertanian di komoditi tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Tanaman Tahunan Menurut Komoditi
Konsep	Tanaman Tahunan
Definisi/Deskripsi	Tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton/Kg
Rumus Perhitungan	Total Produksi = Produktivitas (Hasil per Hektar) x Luas Area Panen (Hektar)
Interpretasi	Semakin banyak produksi tanaman tahunan menurut komoditi dengan adanya peningkatan kuantitas hasil panen komoditas perkebunan (seperti kopi, kakao, karet) dari waktu ke waktu, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kawasan Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan
Konsep	Komoditas Pertanian
Definisi/Deskripsi	Jumlah Kawasan Produksi Komoditas Pertanian/Pangan adalah ukuran luas lahan atau area yang dikelola dan dioptimalkan untuk menghasilkan komoditas pertanian (hasil bumi) atau bahan makanan tertentu dalam periode waktu tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Produksi Total = Produktivitas (Ton/Ha atau Kg/Ha) x Luas Lahan Panen (Ha)
Interpretasi	Semakin banyak kawasan produksi pertanian/pangan menandakan potensi ketahanan pangan meningkat dan pertumbuhan ekonomi lokal/nasional, namun juga bisa mengindikasikan perluasan lahan (ekstensifikasi) yang mungkin menekan lahan lain, serta potensi ketergantungan pada sumber daya alam
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah SKKH/SKPH HPM
Konsep	SKKH atau SKPH adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan
Definisi/Deskripsi	SKKH atau SKPH adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan yang bisa dikeluarkan oleh dokter hewan pemerintah atau swasta yang memiliki Surat Registrasi Veteriner, namun tidak bisa menjadi syarat untuk HPM (Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa) keluar dari suatu wilayah administrasi
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah SKKH/SKPH (periode X) = Σ (SKKH/SKPH yang diterbitkan oleh Dokter Hewan pada periode X)
Interpretasi	Semakin banyak SKKH/SKPH HPM berarti peningkatan jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Keterangan Pelepasan Hewan (SKPH) yang diterbitkan untuk Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM), yang mengindikasikan aktivitas perdagangan dan pergerakan hewan atau produk hewan meningkat, sekaligus meningkatkan potensi risiko penyebaran penyakit
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Kelahiran Sapi Kerbau
Konsep	Kelahiran Sapi Kerbau
Definisi/Deskripsi	Definisi Kelahiran Sapi Kerbau adalah proses persalinan di mana anak sapi atau anak kerbau dilahirkan dari induknya, yang merupakan peristiwa reproduksi penting dalam peternakan untuk peningkatan populasi ternak
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Rumus Perhitungan	(Jumlah anak lahir dalam periode tertentu / Jumlah induk) x 100%
Interpretasi	Semakin banyak kelahiran sapi kerbau menginterpretasikan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan produktivitas peternakan, dan potensi peningkatan ketahanan pangan daerah tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Areal Panen Tanaman Semusim Menurut Komoditi
Konsep	Tanaman Semusim
Definisi/Deskripsi	Tanaman yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan sekali panen langsung dibongkar.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	LAP Komoditas X = \sum Luas Petak Lahan X yang Dipanen
Interpretasi	semakin banyak luas areal panen tanaman semusim menurut komoditi" menunjukkan adanya perluasan area tanam untuk jenis tanaman tertentu (seperti tembakau, tebu, dll.) dalam siklus pendek, mencerminkan pergeseran pola tanam petani karena faktor ekonomi (harga/permintaan), kondisi alam (iklim), atau dampak hama penyakit, yang berdampak pada peningkatan produksi potensial dan ketersediaan pangan/bahan baku dari tanaman semusim tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman
Konsep	Tanaman Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman adalah data statistik yang mengukur total area lahan yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan (seperti sawit, karet, kopi, kakao) dalam batas wilayah administratif suatu kabupaten/kota
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Luas Lahan (Ha) = Jumlah Tanaman / Kepadatan Tanaman (pohon/Ha)
Interpretasi	semakin luas areal tanaman perkebunan" berdasarkan kabupaten/kota dan jenis tanaman menunjukkan adanya pergeseran pola tanam, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim, hingga kebijakan pemerintah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman
Konsep	Tanaman Perkebunan Rakyat
Definisi/Deskripsi	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (LAPR) adalah total area lahan yang dikelola oleh rakyat (petani perseorangan atau kelompok kecil) untuk menanam komoditas perkebunan (seperti sawit, karet, kopi, kakao)
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	hektar
Rumus Perhitungan	Luas Areal (He) = Panjang (m) x Lebar (m) / 10.000
Interpretasi	semakin luas areal tanaman perkebunan rakyat umumnya menunjukkan pertumbuhan sektor perkebunan rakyat, peningkatan potensi ekonomi pedesaan, perluasan produksi komoditas, dan sering kali didominasi oleh komoditas strategis
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas kawasan perkebunan
Konsep	kawasan perkebunan
Definisi/Deskripsi	jumlah total lahan yang ditanami dengan tanaman perkebunan, dan luas ini bisa bervariasi tergantung pada jenis tanaman, metode budidaya, dan praktik manajemen tertentu yang diterapkan dalam konteks pertanian komersial
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	hektar
Rumus Perhitungan	Jumlah Luas kawasan perkebunan
Interpretasi	Ekspansi lahan, peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi (terutama di sektor agribisnis), namun juga potensi dampak lingkungan seperti deforestasi; ini mencerminkan peningkatan permintaan dan investasi di komoditas perkebunan menandakan kekuatan strategisnya dalam memenuhi kebutuhan domestik dan global
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Konsep	luas panen hortikultura
Definisi/Deskripsi	total luas lahan (dalam hektare) yang dipanen pada periode tertentu untuk komoditas hortikultura utama, meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias yang menjadi komoditas unggulan di suatu wilayah.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	luas
Satuan	hektare
Rumus Perhitungan	Luas Panen = \sum Luas Lahan yang Dipanen per Komoditas
Interpretasi	Nilai luas panen meningkat menunjukkan bertambahnya aktivitas panen dan potensi produksi hortikultura.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Pangan
Konsep	Luas Panen Komoditas Pertanian
Definisi/Deskripsi	Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Klasifikasi	kecamatan, jenis komoditas
Ukuran	Luas panen
Satuan	ha, kw/ha, ton, meter persegi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Bawang Merah
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Bawang Merah
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Cabai
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Cabai
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Jagung
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Jagung
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Kedelai
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Kedelai
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kentang
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Kentang
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Kentang
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi
Konsep	Luasan Lahan Puso
Definisi/Deskripsi	Luasnya tanah yang tidak dapat menghasilkan akibat serangan OPT Padi
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total luas puso akibat serangan OPT Padi
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Banjir menurut
Konsep	Puso
Definisi/Deskripsi	Luas lahan yang tidak mengeluarkan hasil panen, dapat disebabkan karena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak perubahan iklim, dan/atau sebab lainnya sehingga hasil panen tidak lebih dari 11% dari keadaan normal.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	$\text{Luas Puso} = \text{Luas Lahan Pertanian} \times \text{Persentase Gagal Panen}$
Interpretasi	kegagalan panen (puso) di wilayah pertanian semakin meluas karena dampak negatif perubahan iklim, terutama peningkatan frekuensi dan intensitas kekeringan yang disebabkan suhu lebih panas, penguapan tinggi, serta pergeseran pola curah hujan yang membuat musim kemarau lebih panjang dan kering, sangat merugikan petani padi dan sektor pangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Kekeringan
Konsep	Puso
Definisi/Deskripsi	Luas lahan yang tidak mengeluarkan hasil panen, dapat disebabkan karena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak perubahan iklim, dan/atau sebab lainnya sehingga hasil panen tidak lebih dari 11% dari keadaan normal.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	$\text{Luas Puso} = \text{Luas Lahan Pertanian} \times \text{Persentase Gagal Panen}$
Interpretasi	fenomena gagal panen (puso) di lahan pertanian (khususnya padi) meluas akibat kekeringan yang makin sering dan parah akibat perubahan iklim, menyebabkan kelangkaan air, perubahan pola hujan, suhu ekstrem, serta mengganggu siklus tanam, yang berdampak langsung pada penurunan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah
Konsep	Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
Definisi/Deskripsi	Luas Tambah Serangan OPT Bawang Merah adalah istilah untuk mengukur peningkatan area lahan bawang merah yang terkena dampak negatif dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama (ulat bawang) dan penyakit (bercak ungu, antraknosa, layu fusarium)
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Intensitas Serangan (IS) = (Jumlah tanaman rusak / Total tanaman diamati) x 100%
Interpretasi	Semakin Luas Tambah Serangan OPT Bawang Merah" berarti terjadi peningkatan area atau jumlah lahan bawang merah yang terserang hama/penyakit (OPT), yang mengindikasikan ancaman serius terhadap produksi, menyebabkan kerugian finansial bagi petani, bahkan gagal panen, dan perlu penanganan intensif secara terpadu dan ramah lingkungan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai
Konsep	Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
Definisi/Deskripsi	Luas Tambah Serangan OPT Cabai adalah indikator statistik yang mengukur bertambahnya area (dalam hektare) lahan cabai yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama (ulat, kutu daun) dan penyakit (virus, jamur) dalam periode tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	IS = (Jumlah tanaman/bagian tanaman rusak / Total tanaman/bagian tanaman diamati) x 100%
Interpretasi	Luas Tambah Serangan OPT Cabai berarti semakin meningkatnya area atau cakupan serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai, yang mengindikasikan masalah semakin parah dan meluas di lahan pertanian, berpotensi menurunkan hasil panen secara signifikan, mengancam ketahanan pangan, dan merugikan petani
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung
Konsep	Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
Definisi/Deskripsi	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung adalah indikator penting dalam pertanian yang mengukur penambahan luas lahan tanam jagung yang terserang hama, penyakit, atau gulma dalam periode tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	IS = (Jumlah tanaman/bagian tanaman rusak / Total tanaman/bagian tanaman diamati) x 100%
Interpretasi	Semakin Luas Tambah Serangan OPT Jagung" artinya terjadi peningkatan area atau jumlah lahan jagung yang terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama (ulat grayak, wereng), penyakit (bulai, busuk pelepah), atau gulma, yang berdampak langsung pada penurunan produksi, gagal panen, ancaman terhadap pendapatan petani, dan ketahanan pangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai
Konsep	Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
Definisi/Deskripsi	Luas Tambah Serangan OPT Kedelai adalah ukuran area (dalam hektare) lahan kedelai yang baru atau tambahan yang mengalami serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama, penyakit, atau gulma dalam periode tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	IS = (Jumlah tanaman/bagian tanaman rusak / Total tanaman/bagian tanaman diamati) x 100%
Interpretasi	Semakin luas tambah serangan OPT Kedelai" berarti terjadi peningkatan area lahan kedelai yang terdampak Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menunjukkan ancaman lebih besar terhadap produksi kedelai karena populasi hama dan penyakit meningkat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi
Konsep	Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)
Definisi/Deskripsi	Luas Tambah Serangan OPT Padi adalah metrik untuk mengukur peningkatan area sawah padi yang terdampak oleh hama (seperti wereng, penggerek batang), penyakit (seperti tungro), atau gulma, yang mengancam produktivitas, di mana penambahan ini menunjukkan eskalasi ancaman yang memerlukan respons cepat untuk mencegah
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	$IS = (\text{Jumlah tanaman/bagian tanaman rusak} / \text{Total tanaman/bagian tanaman diamati}) \times 100\%$
Interpretasi	Interpretasi semakin luas tambah serangan OPT padi" berarti terjadi peningkatan jumlah atau area tanaman padi yang terganggu oleh hama, penyakit, atau gulma, yang berpotensi menurunkan hasil panen secara signifikan, sering kali dipantau oleh dinas pertanian untuk peramalan dan penanganan dini
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Konsep	Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Definisi/Deskripsi	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura. Budi Daya Hortikultura yang selanjutnya disebut Budi Daya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.
Klasifikasi	Wilayah, Komoditas Tanaman Hortikultura
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Hortikultura
Interpretasi	Semakin luas luas tanam komoditas utama tanaman hortikultura menunjukkan meningkatnya intensitas budidaya hortikultura dan potensi peningkatan produksi serta pendapatan petani.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan
Konsep	Komoditas Utama Tanaman Pangan
Definisi/Deskripsi	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
Klasifikasi	Wilayah, Komoditas Tanaman Pangan
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan
Interpretasi	Semakin luas lahan tanam komoditas utama tanaman pangan menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan lahan pertanian serta potensi peningkatan produksi pangan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Banjir
Konsep	Perubahan Iklim Banjir
Definisi/Deskripsi	Luas wilayah daratan yang terdampak kejadian banjir sebagai akibat perubahan iklim dalam satu periode tertentu, yang diukur berdasarkan area genangan atau wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan, sosial, maupun ekonomi akibat banjir.
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas Lahan Terkena Dampak Perubahan Iklim Banjir
Interpretasi	- Nilai semakin besar menunjukkan tingginya dampak perubahan iklim berupa banjir dan rendahnya ketahanan wilayah. - Nilai semakin kecil menunjukkan meningkatnya ketahanan wilayah terhadap banjir akibat perubahan iklim.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Kekeringan
Konsep	Perubahan Iklim Kekeringan
Definisi/Deskripsi	yang mengalami kekurangan ketersediaan air akibat perubahan iklim, seperti penurunan curah hujan, pergeseran musim, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, sehingga berdampak pada aktivitas pertanian, perkebunan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Luas
Satuan	Hektare
Rumus Perhitungan	Total Luas Lahan Terkena Dampak Perubahan Iklim Kekeringan
Interpretasi	Semakin besar luas wilayah yang terkena dampak kekeringan, menunjukkan tingkat kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim semakin tinggi dan perlunya peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Konsep	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Definisi/Deskripsi	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah area lahan pertanian yang secara hukum ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah (melalui RTRW/Perda) agar tetap berfungsi sebagai sumber produksi pangan pokok untuk menjamin ketahanan dan kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang, tanpa boleh dialihfungsikan untuk keperluan non-pertanian, mencakup sawah, tegalan, dan lainnya yang produktif untuk pangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Total Luas LP2B = Luas Sawah Tetap + Luas Tegalan Pangan + Luas Lahan Pertanian Lainnya (yang ditetapkan) + Lahan Cadangan
Interpretasi	semakin luas LP2B" berarti peningkatan kawasan lahan yang dilindungi secara hukum untuk produksi pangan pokok, menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mencegah alih fungsi lahan dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang, yang mencerminkan kondisi positif terhadap kemandirian pangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Konsep	Pupuk
Definisi/Deskripsi	Banyaknya penyaluran pupuk dengan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Total
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah pupuk bersubsidi yang tersalurkan / Jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan $\times 100\%$
Interpretasi	Nilai mendekati atau mencapai 100% menunjukkan penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan efektif dan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Nilai di bawah 100% mengindikasikan adanya kendala dalam penyaluran, seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian data petani, atau masalah logistik. Nilai di atas 100% menunjukkan potensi ketidaktepatan alokasi atau kelebihan penyaluran yang perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak Level KabKota
Konsep	Ternak
Definisi/Deskripsi	Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hewan peliharaan untuk hobi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Rumus Perhitungan	Populasi Ternak (Jenis X) Kab/Kota = Σ (Jumlah Ternak X per Peternak) di seluruh wilayah
Interpretasi	semakin banyak populasi ternak berdasarkan jenis ternak level Kab/Kota berarti adanya peningkatan jumlah individu ternak (sapi, kambing, ayam, dll.) di suatu kabupaten atau kota, menunjukkan potensi ekonomi, ketahanan pangan, dan aktivitas peternakan yang berkembang
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi Daging berdasarkan Jenis Ternak Level KabKota
Konsep	Daging (Meatyield), Produksi
Definisi/Deskripsi	Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Ternak Dipotong \times Parameter Produktivitas Daging (Bobot Karkas/Bobot Hidup)
Interpretasi	produksi daging per kab/kota berdasarkan jenis ternak menunjukkan dominasi jenis ternak tertentu (misal ayam pedaging) di wilayah tersebut, mengindikasikan spesialisasi peternakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, namun juga bisa berarti potensi pengembangan ternak lain atau tantangan seperti harga
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi komoditas perkebunan semusim dan tahunan
Konsep	komoditas perkebunan semusim dan tahunan
Definisi/Deskripsi	- Banyaknya unit usaha yang melakukan/menguasai kegiatan budi daya tanaman perkebunan semusim, termasuk kegiatan pembenihan tanaman, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar. - Banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan budi daya tanaman perkebunan tahunan pada suatu wilayah.
Klasifikasi	perkebunan semusim dan tahunan
Ukuran	Berat
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Σ Produksi Perkebunan Semusim + Σ Produksi Perkebunan Tahunan
Interpretasi	- Nilai meningkat menunjukkan peningkatan produktivitas dan kinerja sektor perkebunan. - Nilai menurun menunjukkan adanya penurunan hasil produksi yang dapat disebabkan oleh faktor iklim, serangan hama, alih fungsi lahan, atau rendahnya produktivitas tanaman.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman
Konsep	Produksi Perkebunan
Definisi/Deskripsi	Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman adalah data statistik mengenai jumlah hasil panen (tonase) komoditas perkebunan (seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao) yang dihasilkan dari wilayah tertentu (kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	<p>Total Produksi (P) = Luas Areal Tanaman Ditanami (LAD) x (Hasil per Batang/Pohon atau per Hektar)</p> $\text{Total PPR} = P(\text{Tanaman 1}) + P(\text{Tanaman 2}) + P(\text{Tanaman 3}) + \dots + P(\text{Tanaman n})$ <ul style="list-style-type: none"> • P(Tanaman 1): Produksi (misal, dalam ton) dari jenis tanaman pertama (misal, Kelapa Sawit). • P(Tanaman 2): Produksi (misal, dalam ton) dari jenis tanaman kedua (misal, Karet). • dan seterusnya.
Interpretasi	produksi perkebunan yang semakin meningkat di suatu kabupaten/kota menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan hasil tanaman strategis (sawit, karet, kopi, kakao, dll.), yang dipengaruhi faktor seperti kesesuaian lahan, iklim, dukungan infrastruktur, teknologi, serta kebijakan lokal, mengindikasikan peningkatan peluang kerja
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman
Konsep	Produksi Perkebunan Rakyat
Definisi/Deskripsi	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman adalah total hasil panen dari berbagai komoditas perkebunan (seperti kelapa, karet, kopi, kelapa sawit, kakao, teh, dll.) yang dikelola oleh masyarakat petani atau rumah tangga petani
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	semakin banyak produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman menunjukkan pergeseran komoditas unggulan, peningkatan permintaan pasar, atau perubahan pola tanam
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi tanaman hortikultura
Konsep	Produksi tanaman hortikultura
Definisi/Deskripsi	Produksi tanaman hortikultura adalah kegiatan budidaya tanaman kebun (hortus) secara intensif untuk menghasilkan sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat (biofarmaka) yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi, kesehatan, estetika, atau industri, mencakup proses dari penanaman hingga panen serta pengolahan pascapanennya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Hektar
Rumus Perhitungan	Produksi (Total Hasil Panen) = Luas Panen (Hektar) x Produktivitas (Hasil per Hektar)
Interpretasi	Semakin banyak produksi hortikultura mengindikasikan peningkatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan petani, dan peluang pasar yang lebih besar
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi tanaman pangan
Konsep	Produksi tanaman pangan
Definisi/Deskripsi	Produksi tanaman pangan adalah kegiatan sistematis menanam, merawat, dan memanen tanaman sumber karbohidrat dan protein (seperti padi, jagung, kedelai) di lahan untuk menghasilkan bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan manusia.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton/Kg
Rumus Perhitungan	Produksi Total (Ton/Kg) = Produktivitas (Ton/Kg/ha) x Luas Panen (ha).
Interpretasi	Semakin banyak produksi tanaman pangan umumnya mengindikasikan peningkatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi lokal/nasional, peningkatan pendapatan petani, dan ketersediaan bahan pokok yang lebih baik, yang secara kolektif menunjukkan sektor pertanian yang lebih sehat dan produktif
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Produksi Telur berdasarkan Jenis Unggas Level KabKota
Konsep	Produksi
Definisi/Deskripsi	Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Klasifikasi	Unggas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ton/Kg
Rumus Perhitungan	Total Produksi (Ton): (Jumlah Total Telur (butir) x Rata-rata Bobot Telur (gram)) / 1.000.000
Interpretasi	Semakin banyak produksi telur berdasarkan jenis unggas di tingkat kabupaten/kota berarti adanya peningkatan signifikan produksi telur (misal: ayam, bebek, puyuh) di wilayah tersebut dari waktu ke waktu atau dibanding wilayah lain, menunjukkan sektor peternakan unggas berkembang, memenuhi kebutuhan lokal, dan berpotensi membuka lapangan kerja,
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan
Konsep	perkebunan rakyat komoditas pertanian
Definisi/Deskripsi	Jumlah petani perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan merujuk pada total individu atau keluarga yang mengusahakan tanaman perkebunan (seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi) secara mandiri dalam skala kecil, yang dikelola oleh masyarakat dalam lingkup usaha tani kecil atau rumah tangga di sektor perkebunan, sebagai bagian dari sektor pertanian yang lebih luas.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Petani
Rumus Perhitungan	Jumlah petani perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani
Konsep	kelompok tani
Definisi/Deskripsi	Petani yang tergabung dalam kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang bersatu secara informal karena kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), dan keakraban, dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani mereka, memperkuat posisi tawar, serta belajar dan mengatasi masalah bersama melalui kerja sama dan gotong royong.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Petani = (Total Anggota Kelompok Tani) / (Jumlah Kelompok Tani)
Interpretasi	Semakin banyak petani yang tergabung dalam kelompok tani menunjukkan partisipasi pertanian yang lebih baik, mempermudah akses ke sumber daya (pupuk, bibit, alat, teknologi), memperkuat kerja sama, meningkatkan efisiensi usaha, serta mempermudah pembinaan dan distribusi bantuan dari pemerintah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan
Konsep	Komoditas Pertanian atau Pangan
Definisi/Deskripsi	Komoditas pertanian merupakan berbagai produk hasil dari usaha tani yang dapat diperjualbelikan, disimpan, dan dipertukarkan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	kg/Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan
Interpretasi	Semakin banyak produksi komoditas pertanian/pangan, maka ketersediaan pangan tercukupi, mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, meningkatkan kontribusi terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berdampak pada harga komoditas (cenderung turun jika sangat melimpah)
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura
Konsep	pertanian sektor hortikultura
Definisi/Deskripsi	Komoditas hortikultura adalah hasil pertanian dari tanaman kebun yang dibudidayakan secara intensif, mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan estetika, seperti cabai, apel, jahe, mawar, dan anggrek, yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	kg/Ton
Rumus Perhitungan	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura
Interpretasi	Jika jumlah produksi hortikultura meningkat, maka ketersediaan pangan segar (sayuran, buah-buahan) akan lebih melimpah, mendukung perekonomian masyarakat (pendapatan petani), meningkatkan kesehatan masyarakat karena gizi lebih terjamin, mendorong hilirisasi produk, dan membuka peluang ekspor, tetapi perlu diimbangi dengan manajemen pascapanen dan pasar yang baik agar tidak terjadi surplus yang merugikan atau penurunan harga.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Konsep	Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Undernourishment
Definisi/Deskripsi	Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)= Jumlah penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar kecukupan / Total penduduk $\times 100\%$. Dikategorikan tidak cukup bila < 2.100 kkal/kapita/hari atau menggunakan ambang $< 70\%$ / $< 80\%$ AKE
Interpretasi	gambaran proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum dari konsumsi pangan sehari-hari.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Konsep	Pola Pangan Harapan (PPH)
Definisi/Deskripsi	Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Skor/Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melibatkan beberapa langkah utama: pertama, mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok dan menghitung konsumsi energi dari masing-masing kelompok; kedua, menghitung persentase kontribusi energi setiap kelompok terhadap total energi; ketiga, menghitung skor PPH untuk setiap kelompok dengan mengalikan persentase tersebut dengan bobot yang telah ditentukan; dan terakhir, menjumlahkan semua skor PPH kelompok untuk mendapatkan skor total
Interpretasi	Skor PPH maksimal bernilai 100 yang menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Adapun sesuai Perbadan 11 tahun 2023, Skor PPH dikelompokkan menjadi tiga kategori: yaitu (1) Baik, (2) Sedang, (3) Kurang.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Ketersediaan Pangan Utama
Konsep	Ketersediaan Pangan Utama
Definisi/Deskripsi	kondisi tersedianya pangan pokok utama yang cukup bagi penduduk suatu wilayah dalam jumlah dan waktu yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang bersumber dari produksi dalam negeri, cadangan, maupun pasokan dari luar wilayah.
Klasifikasi	-
Ukuran	jumlah
Satuan	kg/kapita/tahun
Rumus Perhitungan	roduksi bersih+Stok awal+Pemasukan–Pengeluaran–Kehilangan pascapanen
Interpretasi	Semakin banyak jumlah maka semakin banyak ketersediaan Pangan Utama untuk masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Ketersediaan Energi
Konsep	energi (kilokalori) yang tersedia
Definisi/Deskripsi	jumlah energi (kilokalori) yang tersedia dari bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang berasal dari produksi pangan, stok, serta pasokan masuk setelah dikurangi pengeluaran dan kehilangan
Klasifikasi	jenis energi
Ukuran	Jumlah
Satuan	kkal/kapita/hari
Rumus Perhitungan	$\sum(\text{Ketersediaan masing-masing bahan pangan} \times \text{Kandungan energi})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai ketersediaan energi makanan, semakin baik kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan energi penduduknya.
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Ketersediaan Protein
Konsep	Ketersediaan total sumber protein
Definisi/Deskripsi	jumlah protein (gram) yang tersedia dari seluruh bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang bersumber dari produksi, stok, dan pasokan masuk setelah dikurangi pengeluaran dan kehilangan
Klasifikasi	jenis protein
Ukuran	Jumlah
Satuan	gram/kapita/hari.
Rumus Perhitungan	Total protein = $\sum(\text{Ketersediaan masing-masing bahan pangan} \times \text{Kandungan protein})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai ketersediaan protein, semakin baik kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan protein penduduknya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produksi Ikan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)
Konsep	Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan budidaya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan non budidaya (tangkap) adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	jumlah
Satuan	Ton
Rumus Perhitungan	Grand Total Produksi Budidaya + Grand Total Non Budidaya
Interpretasi	Semakin Banyak Hasil perikanan budidaya dan hasil tangkapan ikan oleh nelayan, maka semakin banyak hasil yang di peroleh untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase Peningkatan Angka konsumsi Ikan (%)
Konsep	perubahan atau peningkatan konsumsi ikan per dalam suatu periode tertentu
Definisi/Deskripsi	Persentase peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita, yang dihitung dengan membandingkan konsumsi ikan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Konsumsi Ikan Per Kapita Tahun Ini} - \text{Konsumsi Ikan Per Kapita Tahun Sebelumnya}}{\text{Konsumsi Ikan Per Kapita Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase peningkatan menunjukkan seberapa besar konsumsi ikan meningkat dalam suatu periode. Semakin tinggi nilai persentase, semakin tinggi peningkatan konsumsi ikan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Konsep	Ketahanan pangan
Definisi/Deskripsi	indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa mampu suatu daerah atau negara memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan.
Klasifikasi	-
Ukuran	indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKP = (\text{indeks ketersediaan} + \text{indeks akses} + \text{indeks pemanfaatan}) / 3$
Interpretasi	semakin tinggi indeks ketahanan pangan menunjukkan wilayah memiliki ketersediaan pangan yang memadai, akses ekonomi dan fisik yang baik, serta pemanfaatan pangan yang didukung oleh kondisi kesehatan dan sanitasi yang layak. sedangkan indeks ketahanan pangan rendah mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem pangan, seperti produksi pangan yang terbatas, kemiskinan, akses infrastruktur yang rendah, atau masalah gizi dan kesehatan masyarakat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase daerah rentan rawan pangan
Konsep	Rawan Pangan
Definisi/Deskripsi	Persentase daerah rentan rawan pangan yang dihitung dari perbandingan jumlah daerah rentan rawan pangan terhadap jumlah total daerah yang dianalisis dikalikan 100%. Rawan pangan adalah kondisi ketika rumah tangga, kelompok, atau wilayah tidak memiliki akses yang cukup, aman, dan berkelanjutan terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang cukup, bergizi, dan layak guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Klasifikasi	-
Ukuran	persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan} = \frac{\text{Jumlah daerah rentan rawan pangan}}{\text{Total daerah yang dianalisis}} \times 100\%$
Interpretasi	semakin tinggi nilai presentase menunjukkan semakin banyak wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan, sehingga menandakan perlunya intervensi pemerintah yang lebih intensif dan terarah, semakin rendah presentase menunjukkan kondisi ketahanan pangan wilayah relatif lebih baik dan merata
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perikanan hasil budidaya
Konsep	produksi perikanan budidaya
Definisi/Deskripsi	Jumlah produksi perikanan budidaya adalah total hasil panen ikan dan biota air lainnya yang diperoleh dari kegiatan budidaya perairan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut, dalam periode tertentu. Produksi ini diukur dalam satuan berat (kilogram atau ton) dan nilai ekonomi (rupiah atau mata uang lainnya).
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	jumlah produksi perikanan budidaya
Interpretasi	peningkatan hasil budidaya mencerminkan tumbuhnya usaha perikanan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perikanan hasil tangkapan
Konsep	produksi perikanan tangkap
Definisi/Deskripsi	Jumlah produksi perikanan tangkap adalah total hasil tangkapan ikan dan biota perairan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut maupun perairan darat dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	jumlah produksi perikanan tangkap
Interpretasi	semakin meningkat nilai maka semakin meningkat produktivitas sektor perikanan budidaya, Keberhasilan program pembinaan, teknologi budidaya, dan akses sarana produksi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama
Konsep	Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Ikan Utama
Definisi/Deskripsi	total hasil produksi perikanan menurut jenis komoditas ikan utama tertentu yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu, baik yang berasal dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
Klasifikasi	komoditas ikan utama
Ukuran	Jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	jumlah produksi perikanan (budidaya dan tangkap) berdasarkan komoditas ikan utama
Interpretasi	Nilai produksi meningkat menunjukkan bertambahnya hasil perikanan dan kinerja sektor perikanan yang semakin baik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya
Konsep	Produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan budidaya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan non budidaya (tangkap) adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya
Interpretasi	Nilai produksi yang meningkat menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, penerapan teknologi budidaya, serta efektivitas kebijakan dan program pengembangan perikanan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi ikan
Konsep	produksi ikan
Definisi/Deskripsi	Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman ir yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	jumlah
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi ikan (budidaya dan tangkap)
Interpretasi	semakin meningkat nilai produksi ikan maka semakin meningkat ketersediaan pangan sumber protein hewani bagi masyarakat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir
Konsep	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), investasi
Definisi/Deskripsi	banyaknya unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan dukungan atau pendampingan dari pemerintah, lembaga, atau pihak swasta dalam bentuk fasilitasi untuk menjalin kemitraan usaha serta akses terhadap investasi, baik di sisi hulu (produksi) maupun hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran), dalam kurun waktu tertentu.
Klasifikasi	kecamatan
Ukuran	total
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir
Interpretasi	semakin banyak UMKM kelautan dan perikanan (KP) yang memperoleh fasilitasi kemitraan usaha dan investasi pada rantai hulu-hilir, sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas usaha, akses permodalan, pasar, dan nilai tambah produk
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)
Konsep	produksi perikanan tangkap
Definisi/Deskripsi	rata rata produksi Perikanan non budidaya (tangkap) adalah rata-rata Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan pada beberapa periode waktu tertentu
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	$(\text{hasil perikanan tangkap tahun } n + \text{tahun } n-1 + \text{tahun } n-2 + \text{tahun } n-3 + \text{tahun } n-4)/5$
Interpretasi	Rata-rata yang tinggi dan relatif stabil menunjukkan kinerja penangkapan ikan yang baik, ketersediaan sumber daya ikan yang memadai, serta efektivitas pengelolaan dan sarana penangkapan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan
Konsep	produksi perikanan tangkap
Definisi/Deskripsi	produksi Perikanan non budidaya (tangkap) adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	jumlah produksi perikanan tangkap
Interpretasi	semakin meningkat nilai maka semakin meningkat produktivitas sektor perikanan budidaya, Keberhasilan program pembinaan, teknologi budidaya, dan akses sarana produksi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah dan jenis alat tangkap di Wilayah Perairan Darat
Konsep	jenis alat tangkap perairan darat
Definisi/Deskripsi	Jumlah dan klasifikasi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pada kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan darat, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan badan air darat lainnya, dalam periode waktu tertentu.
Klasifikasi	jenis alat tangkap
Ukuran	jumlah
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	jumlah alat tangkap berdasarkan jenis alat tangkap
Interpretasi	Semakin besar jumlah alat tangkap menunjukkan semakin intensifnya aktivitas penangkapan ikan di perairan darat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pembudidaya ikan berdasarkan budidaya
Konsep	pembudidaya ikan
Definisi/Deskripsi	banyaknya individu atau rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan menurut jenis sistem budidaya yang diterapkan, seperti budidaya air tawar, air payau, air laut, kolam, keramba, bioflok, maupun sistem budidaya lainnya, pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
Klasifikasi	jenis budidaya
Ukuran	jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pembudidaya ikan berdasarkan budidaya
Interpretasi	Peningkatan jumlah pembudidaya pada jenis budidaya tertentu dapat mencerminkan berkembangnya teknologi, meningkatnya minat usaha, serta efektivitas dukungan pemerintah seperti bantuan sarana, pelatihan, dan akses pembiayaan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Benih Ikan Berdasarkan Jenis Ikan
Konsep	Produksi Benih Ikan
Definisi/Deskripsi	Total kuantitas benih ikan yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan spesies atau jenis ikan. Produksi benih ikan biasanya diukur untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan di tambak, kolam, atau keramba, dan merupakan salah satu indikator penting dalam sektor perikanan budidaya.
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ekor
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Benih Ikan Berdasarkan Jenis Ikan
Interpretasi	semakin meningkat jumlah produksi maka semakin meningkat produksi perikanan, serta ketahanan pangan berbasis sumber daya perikanan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Konsep	Produksi Perikanan Budidaya
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan budidaya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.
Klasifikasi	jenis budidaya,kecamatan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Interpretasi	Peningkatan jumlah produksi pada jenis budidaya tertentu menunjukkan keberhasilan penerapan teknologi, efisiensi pengelolaan, serta dukungan sarana dan prasarana budidaya.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan
Konsep	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan budidaya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.
Klasifikasi	kecamatan, jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan
Interpretasi	semakin meningkat jumlah produksi perikanan semakin meningkat kapasitas produksi, keberhasilan penerapan teknologi budidaya, ketersediaan sarana dan prasarana, serta efektivitas pembinaan kepada pembudidaya ikan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap
Konsep	Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan tangkap adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	kecamatan, jenis alat tangkap
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
Interpretasi	Nilai produksi yang lebih tinggi pada jenis alat tangkap tertentu menunjukkan tingkat efektivitas, intensitas penggunaan, atau dominasi alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan umum
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Ikan
Konsep	Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan tangkap adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	kecamatan, jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
Interpretasi	Peningkatan produksi dapat mengindikasikan pengelolaan perikanan yang efektif dan potensi sumber daya yang masih baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan
Konsep	Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	produksi perikanan tangkap adalah Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Perairan Umum Daratan
Klasifikasi	kecamatan, jenis perairan
Ukuran	total
Satuan	ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
Interpretasi	Nilai produksi yang lebih tinggi pada jenis perairan tertentu menunjukkan tingginya produktivitas atau intensitas pemanfaatan perairan tersebut, sedangkan nilai yang rendah dapat mencerminkan keterbatasan potensi sumber daya, kondisi lingkungan, atau rendahnya aktivitas penangkapan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Konsep	RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Budidaya
Definisi/Deskripsi	Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Budidaya adalah rumah tangga yang salah satu atau seluruh anggotanya melakukan kegiatan usaha perikanan budidaya, meliputi pembenihan, pendederan, dan/atau pembesaran ikan serta biota perairan lainnya, baik sebagai usaha utama maupun usaha sampingan. Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Budidaya adalah badan usaha atau unit usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang secara tetap dan terorganisasi melakukan kegiatan perikanan budidaya dalam skala usaha tertentu
Klasifikasi	jenis budidaya
Ukuran	jumlah
Satuan	RTP/PP
Rumus Perhitungan	Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) + Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Budidaya
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah RTP atau perusahaan pada suatu jenis budidaya, semakin besar tingkat pemanfaatan dan pengembangan jenis budidaya tersebut di wilayah yang bersangkutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pemasar
Konsep	Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan
Definisi/Deskripsi	Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan adalah jumlah orang yang bekerja pada kegiatan pemasaran dan distribusi hasil perikanan, baik segar maupun olahan, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan sederhana, hingga penjualan hasil perikanan kepada konsumen atau pelaku usaha lainnya
Klasifikasi	jenis pemasar
Ukuran	Total
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	jumlah Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan
Interpretasi	Jumlah meningkat menunjukkan berkembangnya aktivitas pemasaran hasil perikanan serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahan
Konsep	Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan
Definisi/Deskripsi	Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan adalah jumlah orang yang bekerja pada kegiatan pengolahan hasil perikanan, baik skala rumah tangga, UMKM, maupun industri, yang meliputi proses penanganan, pengawetan, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk perikanan
Klasifikasi	jenis pengolahan
Ukuran	Total
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan
Interpretasi	Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan adalah jumlah orang yang bekerja pada kegiatan pengolahan hasil perikanan, baik skala rumah tangga, UMKM, maupun industri, yang meliputi proses penanganan, pengawetan, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk perikanan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap
Konsep	Trip Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	total trip produksi perikanan tangkap yang dilakukan di perairan umum dengan berbagai jenis alat tangkap. Trip Produksi Perikanan Tangkap adalah satuan kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dalam satu kali keberangkatan melaut, sejak berangkat dari pangkalan/dermaga hingga kembali, yang menghasilkan tangkapan ikan dan biota perairan lainnya.
Klasifikasi	jenis alat tangkap
Ukuran	total
Satuan	trip
Rumus Perhitungan	Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap
Interpretasi	Peningkatan total trip dapat mengindikasikan membaiknya akses, ketersediaan sarana penangkapan, atau meningkatnya kebutuhan ekonomi nelayan.
Periodesasi	tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Unit Pemasaran Ikan Berdasarkan Jenis Pemasar
Konsep	Unit Pemasaran Ikan
Definisi/Deskripsi	banyaknya unit usaha atau sarana yang melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan serta hasil perikanan, baik dalam bentuk segar maupun olahan
Klasifikasi	jenis pemasar
Ukuran	Total
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Unit Pemasaran Ikan
Interpretasi	Jumlah meningkat menunjukkan bertambahnya sarana pemasaran ikan dan semakin luasnya akses pasar bagi pelaku perikanan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha
Konsep	Unit Pengolahan Hasil Perikanan
Definisi/Deskripsi	jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang dikelompokkan menurut skala usaha, seperti skala rumah tangga, kecil/UMKM, menengah, dan besar/industri,
Klasifikasi	skala usaha
Ukuran	total
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha
Interpretasi	Jumlah unit meningkat pada skala tertentu menunjukkan pertumbuhan dan penguatan usaha pengolahan hasil perikanan pada skala tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahan
Konsep	Unit Pengolahan Hasil Perikanan
Definisi/Deskripsi	jumlah unit usaha atau sarana pengolahan hasil perikanan yang dikelompokkan menurut jenis proses pengolahan tertentu, seperti pengasinan, pengeringan, pengasapan, pembekuan, fermentasi, atau pengolahan lainnya
Klasifikasi	jenis pengolahan
Ukuran	total
Satuan	unit
Rumus Perhitungan	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahan
Interpretasi	Sebaran jenis pengolahan yang beragam mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi bahan baku dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Konsep	Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya
Definisi/Deskripsi	total luas lahan yang secara fisik tersedia dan dimanfaatkan secara tetap untuk kegiatan perikanan budidaya, meliputi kolam, tambak, keramba, keramba jaring apung, dan/atau sarana budidaya perairan lainnya
Klasifikasi	jenis budidaya
Ukuran	hektar
Satuan	luas
Rumus Perhitungan	Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya
Interpretasi	Luas meningkat menunjukkan bertambahnya kapasitas lahan budidaya dan potensi peningkatan produksi perikanan budidaya
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Luas Bersih Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Konsep	Luas Bersih Lahan Perikanan Budidaya
Definisi/Deskripsi	luas lahan perikanan budidaya yang secara efektif digunakan untuk kegiatan budidaya ikan dan biota perairan lainnya, setelah dikurangi area yang tidak produktif, seperti pematang, saluran, jalan inspeksi, bangunan pendukung, dan bagian lahan yang tidak dimanfaatkan
Klasifikasi	jenis budidaya
Ukuran	hektar
Satuan	luas
Rumus Perhitungan	Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya-Luas Lahan Tidak Produktif
Interpretasi	Luas meningkat menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan lahan budidaya dan potensi peningkatan produksi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya
Konsep	Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Definisi/Deskripsi	nilai ekonomi dari seluruh hasil produksi perikanan budidaya yang dihasilkan dalam suatu wilayah dan periode tertentu
Klasifikasi	jenis budidaya
Ukuran	Total
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	Nilai Produksi Perikanan Budidaya= $\sum(\text{Volume Produksi budidaya} \times \text{Harga Rata-rata})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Produksi Perikanan Budidaya, maka semakin besar nilai ekonomi hasil perikanan budidaya yang dihasilkan, yang mencerminkan meningkatnya produksi, harga jual, serta pendapatan pelaku usaha perikanan budidaya dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Ikan
Konsep	Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	nilai ekonomi dari seluruh hasil produksi perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dan biota perairan lainnya di perairan umum maupun laut dalam suatu wilayah dan periode tertentu
Klasifikasi	jenis ikan
Ukuran	total
Satuan	rupiah
Rumus Perhitungan	$\sum(\text{Volume Produksi per Jenis Ikan} \times \text{Harga Rata-rata per Jenis Ikan})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Ikan, maka semakin besar nilai ekonomi hasil tangkapan ikan per jenis yang dihasilkan, yang mencerminkan meningkatnya produksi, harga jual, serta kontribusi masing-masing jenis ikan terhadap pendapatan nelayan dan perekonomian daerah.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan
Konsep	Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Definisi/Deskripsi	nilai ekonomi hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan dan biota perairan lainnya di perairan umum, yang dihitung menurut jenis perairan (misalnya sungai, danau, waduk, rawa, dan perairan umum lainnya)
Klasifikasi	jenis perairan
Ukuran	total
Satuan	rupiah
Rumus Perhitungan	$\sum(\text{Volume Produksi per Jenis Perairan} \times \text{Harga Rata-rata})$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum berdasarkan Jenis Perairan, maka semakin besar nilai ekonomi hasil tangkapan yang dihasilkan dari jenis perairan tersebut, yang mencerminkan meningkatnya produksi, harga jual, serta kontribusi masing-masing jenis perairan terhadap pendapatan nelayan dan perekonomian daerah.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Konsep	koleksi judul buku
Definisi/Deskripsi	jumlah koleksi judul buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Nganjuk untuk meningkatkan kegemaran membaca
Klasifikasi	Jenis Buku
Ukuran	Jumlah
Satuan	Judul Buku
Rumus Perhitungan	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
Interpretasi	Semakin banyak koleksi judul buku, diharapkan dapat menarik minat pemustaka untuk meningkatkan gemar membaca
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase jumlah OPD yang telah melaksanakan tata tertib kearsipan yang baku sesuai NSPK
Konsep	Pengelolaan arsip baku
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui OPD yang sudah mengelola arsip secara baku sesuai NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria)
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	jumlah OPD yang telah melaksanakan tata tertib kearsipan yang baku sesuai NSPK/Jumlah total Perangkat Daerah x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak PD yg mengelola arsip secara baku
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase peningkatan kunjungan perpustakaan
Konsep	Peningkatan kunjungan perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan dibandingkan tahun sebelumnya
Klasifikasi	-
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$((\text{jumlah kunjungan perpustakaan tahun } n - \text{jumlah kunjungan perpustakaan tahun } n-1) / \text{jumlah kunjungan perpustakaan tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar persentasenya, semakin banyak jumlah kunjungan perpustakaan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Konsep	Kompetensi SDM Pengelola Kearsipan
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk meningkatkan kualitas Pengelola/SDM Kearsipan
Klasifikasi	jenis Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan Bimtek/kegiatan Pengelolaan Kearsipan
Interpretasi	Semakin banyak jumlahnya, maka semakin meningkat kompetensi SDM Pengelola Kearsipan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Konsep	pengunjung perpustakaan
Definisi/Deskripsi	jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kab. Nganjuk
Klasifikasi	kategori pengunjung
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun
Interpretasi	Semakin banyak jumlah, semakin meningkat indeks Kegemaran Membaca
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Konsep	Koleksi buku
Definisi/Deskripsi	Indikator untuk mengetahui jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kab. Nganjuk
Klasifikasi	Jenis Buku
Ukuran	Jumlah
Satuan	Buku
Rumus Perhitungan	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
Interpretasi	Semakin banyak koleksi buku, semakin menarik minat pengunjung untuk meningkatkan kegemaran membaca
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semesteran
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
Konsep	pengelolaan arsip secara baku
Definisi/Deskripsi	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sudah menerapkan manajemen kearsipan sesuai standar (baku) yang ditetapkan
Klasifikasi	perangkat daerah
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	(Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku / Jumlah seluruh Perangkat Daerah) x 100%
Interpretasi	Semakin banyak perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku maka semakin baik administrasi yang terkelola
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling
Konsep	Kendaraan Perpustakaan Keliling
Definisi/Deskripsi	Kendaraan Perpustakaan Keliling adalah mobil atau kendaraan yang dimodifikasi menjadi perpustakaan berjalan, membawa koleksi buku dan media ke lokasi yang sulit dijangkau perpustakaan menetap (seperti desa terpencil, sekolah, panti asuhan) untuk memperluas akses literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat secara merata dan inklusif.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kendaraan
Rumus Perhitungan	Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling
Interpretasi	Semakin banyak kendaraan perpustakaan keliling (Pusling) menunjukkan upaya proaktif pemerintah daerah untuk mendekatkan akses literasi ke masyarakat, menjangkau area tanpa perpustakaan fisik, meningkatkan minat baca (terutama anak-anak), menumbuhkan budaya literasi, dan mengatasi stigma perpustakaan yang kaku dengan pelayanan yang lebih langsung dan interaktif, mengadopsi pendekatan mobile untuk mendorong partisipasi publik secara merata tanpa membedakan latar belakang.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pemustaka Anak ke Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
Konsep	Pemustaka Anak
Definisi/Deskripsi	Perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pemustaka
Rumus Perhitungan	Jumlah Pemustaka Anak ke Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
Interpretasi	daya tarik perpustakaan meningkat (karena koleksi, fasilitas, program), minat baca anak tumbuh, kemampuan literasi dan akademis mereka berkembang, serta perpustakaan berhasil memenuhi fungsi edukatif dengan menjadi pusat belajar yang relevan dan menyenangkan bagi anak-anak.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Desa/Kelurahan
Konsep	Pemustaka
Definisi/Deskripsi	Pemustaka ke Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah total frekuensi kunjungan atau peminjam yang datang ke perpustakaan desa/kelurahan dalam periode tertentu, dihitung untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan, yang termasuk dalam standar pelayanan pemustaka, seringkali diukur melalui indikator Frekuensi Peminjaman Koleksi
Klasifikasi	desa/kelurahan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pemustaka
Rumus Perhitungan	Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Desa/Kelurahan
Interpretasi	daya tarik perpustakaan meningkat (karena koleksi, fasilitas, program), minat baca anak tumbuh, kemampuan literasi dan akademis mereka berkembang, serta perpustakaan berhasil memenuhi fungsi edukatif dengan menjadi pusat belajar yang relevan dan menyenangkan bagi anak-anak.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pojok Baca atau Perpustakaan yang di Bina DINAS ARPUS
Konsep	Pojok Baca atau Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perpustakaan
Rumus Perhitungan	Jumlah Pojok Baca atau Perpustakaan yang di Bina DINAS ARPUS
Interpretasi	meningkatkan jumlah Pojok Baca dan Perpustakaan melalui program pembinaan, kerja sama, serta perluasan layanan untuk memasyarakatkan budaya literasi dan mendekatkan akses bacaan ke masyarakat, seperti di kelurahan, sekolah, desa, bahkan pengembangan perpustakaan modern dan keliling
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Konsep	Literasi
Definisi/Deskripsi	Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IPLM = (Total\ Skor\ UPLM / 7) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), artinya pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah semakin maju, menunjukkan peningkatan dalam akses informasi, minat baca, partisipasi kegiatan literasi, hingga ketersediaan sumber daya perpustakaan dan arsip, yang mengindikasikan kualitas SDM yang lebih baik dan potensi kesejahteraan yang meningkat, menjadi indikator penting untuk kebijakan daerah
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan
Konsep	Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	perpustakaan
Rumus Perhitungan	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan
Interpretasi	Semakin banyak perpustakaan bergabung di jejaring nasional berarti peningkatan kolaborasi, aksesibilitas sumber daya, standarisasi layanan, dan transformasi digital, yang pada akhirnya memperluas jangkauan dan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, memungkinkan peminjaman antar perpustakaan, dan integrasi data keanggotaan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
Konsep	kegemaran membaca dan literasi
Definisi/Deskripsi	Peserta pembudayaan kegemaran membaca dan literasi adalah individu atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang meningkatkan minat baca, kebiasaan membaca rutin (gemar baca), dan kemampuan memahami berbagai bentuk informasi (literasi), baik secara internal (adanya kesenangan pribadi) maupun eksternal (didukung program dan lingkungan), seperti siswa, masyarakat umum, atau lembaga, yang bertujuan mengembangkan kecerdasan, karakter, dan keterampilan hidup melalui aktivitas membaca dan literasi secara menyeluruh (visual, digital, auditori).
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
Interpretasi	Semakin banyak peserta dalam program pembudayaan kegemaran membaca dan literasi menunjukkan peningkatan kesadaran, minat, dan partisipasi publik dalam kegiatan literasi, yang merupakan sinyal positif bahwa upaya pemerintah dan lembaga terkait mulai membuahkan hasil, meskipun tantangan minat baca yang rendah di Indonesia masih ada.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah
Konsep	Pojok Baca Digital
Definisi/Deskripsi	Pojok Baca Digital (POCADI) di daerah adalah titik akses layanan perpustakaan modern yang menyediakan buku cetak dan e-book (buku digital) serta konten digital lainnya (audio, video) secara gratis, dilengkapi perangkat seperti komputer/tablet, di lokasi strategis (seperti Mall Pelayanan Publik, taman, atau pusat keramaian) untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui teknologi, bahkan secara offline, berfungsi sebagai perpanjangan tangan perpustakaan umum.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	titik
Rumus Perhitungan	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah
Interpretasi	Semakin banyak pojok baca digital (Pocadi) di daerah menunjukkan upaya peningkatan literasi masyarakat, khususnya literasi digital, melalui penyediaan akses mudah ke bahan bacaan digital, mendorong budaya baca, dan meningkatkan kecakapan berpikir kritis serta pemahaman informasi di era digital, meskipun tantangan seperti akses teknologi yang belum merata tetap ada
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks KEGEMARAN MEMBACA MENURUT KABUPATEN / KOTA
Konsep	Kegemaran Membaca
Definisi/Deskripsi	Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$TGM = (0,3 FM + 0,3 DM + 0,3 JB) + (0,05 FAI + 0,05 DAI)$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kegemaran Membaca (IKM) atau Tingkat Gemar Membaca (TGM), artinya masyarakat semakin memiliki ketertarikan dan kebiasaan baik dalam membaca, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia, menunjukkan adanya kemajuan dalam budaya literasi, meskipun terkadang dikategorikan sedang namun tetap ada peningkatan dari tahun ke tahun, didukung program pemerintah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
Konsep	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
Definisi/Deskripsi	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip di instansi pemerintah, dihitung dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) yang menggabungkan pengawasan internal dan eksternal, serta mempertimbangkan Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) dengan aplikasi SRIKANDI, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas arsip nasional sesuai UU Kearsipan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Total Jawaban Setuju / Total Responden) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Penyelenggaraan Kearsipan (IPK) berarti kualitas pengelolaan arsip suatu instansi semakin baik, efektif, dan efisien, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta pelayanan publik yang prima.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Anggota Perpustakaan di Kab/Kota
Konsep	Anggota Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memperoleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Anggota
Rumus Perhitungan	Jumlah Anggota Perpustakaan di Kab/Kota
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah anggota perpustakaan menunjukkan peningkatan minat baca, perluasan wawasan, dan efektivitas layanan, mencerminkan perpustakaan berhasil memenuhi fungsinya sebagai pusat informasi dan pendidikan, meningkatkan partisipasi publik, serta menjadi ruang nyaman untuk belajar, yang bisa mengindikasikan peningkatan kualitas fasilitas dan promosi yang efektif, serta potensi peningkatan kegiatan dan interaksi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Koleksi Perpustakaan di Kab/Kota
Konsep	Koleksi Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Koleksi
Rumus Perhitungan	Jumlah Koleksi Perpustakaan di Kab/Kota
Interpretasi	meningkatnya potensi akses informasi dan literasi masyarakat, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber belajar, memperkaya wawasan, mendukung pendidikan sepanjang hayat, dan memenuhi kebutuhan informasi warga yang beragam, meskipun perlu diiringi dengan peningkatan kualitas koleksi, layanan, dan promosi agar koleksi tersebut benar-benar dimanfaatkan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Kota
Konsep	Peminjam Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Peminjam Perpustakaan adalah seseorang yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan dan memanfaatkan layanan sirkulasi untuk meminjam koleksi (buku, e-book, dll.) untuk dibaca di luar perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban menjaga dan mengembalikannya tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Peminjam
Rumus Perhitungan	Jumlah Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Kota
Interpretasi	Tingginya jumlah peminjam perpustakaan di suatu kabupaten/kota mengindikasikan peningkatan minat baca, kesadaran literasi, dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengembangan diri masyarakat, meskipun perlu juga dianalisis penyebabnya (misalnya, program yang efektif, koleksi menarik) dan dampaknya terhadap kualitas hidup dan pendidikan setempat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan
Konsep	Pengunjung Layanan Kearsipan
Definisi/Deskripsi	Pengunjung Layanan Kearsipan adalah individu atau pihak (perorangan maupun institusi) yang datang atau mengakses layanan yang disediakan oleh lembaga kearsipan untuk memanfaatkan informasi dari arsip, baik untuk keperluan penelitian, pendidikan, pemerintahan, maupun kepentingan lainnya yang membutuhkan data historis dan informasi penting yang tersimpan dalam arsip.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pengunjung
Rumus Perhitungan	Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan
Interpretasi	Semakin banyak pengunjung layanan kearsipan mengindikasikan peningkatan kesadaran akan pentingnya arsip, kualitas layanan yang membaik, dan aksesibilitas informasi pemerintah/institusi, yang berarti arsip lebih dimanfaatkan untuk penelitian, pengambilan keputusan, akuntabilitas publik, dan memori kolektif, meski perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi harapan pengguna.
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kab/Kota
Konsep	Pengunjung Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Pengunjung perpustakaan adalah orang atau sekelompok orang yang datang berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan sarana, prasarana, koleksi, dan layanan yang disediakan, baik untuk tujuan pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi, maupun pengembangan diri.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pengunjung
Rumus Perhitungan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kab/Kota
Interpretasi	Semakin banyak pengunjung perpustakaan mengindikasikan peningkatan minat baca dan literasi, efektivitas program perpustakaan (seperti acara dan koleksi), serta perpustakaan menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan penting bagi masyarakat, menunjukkan bahwa perpustakaan relevan sebagai penyedia akses informasi, pendukung akademik, dan sarana pengembangan diri, yang juga memerlukan data statistik untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Perpustakaan di Kab/Kota
Konsep	Perpustakaan
Definisi/Deskripsi	Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka dari berbagai jenis perpustakaan.
Klasifikasi	Predikat Akreditasi Perpustakaan/Wilayah/Tingkat Pendidikan/Jenis Perpustakaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Perpustakaan
Rumus Perhitungan	Jumlah Perpustakaan di Kab/Kota
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah perpustakaan di Kabupaten/Kota menunjukkan semakin baik ketersediaan fasilitas literasi dan akses informasi bagi masyarakat. Sebaliknya, jumlah perpustakaan yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan sarana pendukung peningkatan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Satpol PP

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Konsep	Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Definisi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan serta Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah Kabupaten / Kota
Klasifikasi	Kecamatan, Jumlah RT
Ukuran	Persentase
Satuan	Jumlah
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang ditangani} / \text{jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu Daerah Kabupaten / Kotayang dilakukan}) \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin banyak penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat maka semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani
Konsep	Pelanggaran Perda
Definisi	Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) adalah setiap perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani X 100 % Jumlah seluruh Pelanggaran Perda
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Penanganan Pelanggaran Perda tercipta kondisi yang aman tertib di masyarakat
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Konsep	Cakupan Perlindungan Masyarakat
Definisi	Cakupan perlindungan masyarakat adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman, perlindungan, dan ketenteraman kepada masyarakat dari berbagai potensi gangguan, ancaman, dan risiko sosial.
Klasifikasi	Kecamatan, Jumlah RT
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Desa, kelurahan x 31 orang
Interpretasi	Terpenuhinya jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Nganjuk
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan berdasarkan jenis kelamin
Konsep	Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan
Definisi	Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah mengikuti pelatihan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan berdasarkan jenis kelamin
Interpretasi	Komposisi yang seimbang menunjukkan pemerataan akses pelatihan dan penguatan profesionalisme Satpol PP.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cakupan korban kebakaran dan non kebakaran yang diselamatkan
Konsep	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Definisi/Deskripsi	jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah. Layanan ini merupakan layanan SPM sub urusan kebakaran. Total kejadian kebakaran di kab/kota
Klasifikasi	detail kejadian kebakaran/non kebakaran
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah korban yang diselamatkan / Total korban kejadian kebakaran dan non kebakaran x 100%
Interpretasi	<p>Nilai indikator tinggi menunjukkan kemampuan dan respons cepat petugas dalam menyelamatkan korban pada kejadian kebakaran maupun non kebakaran berjalan dengan baik.</p> <p>Nilai indikator rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, kesiapsiagaan, serta koordinasi dalam layanan penyelamatan darurat.</p> <p>Indikator ini juga mencerminkan tingkat keselamatan masyarakat serta efektivitas sistem penanggulangan keadaan darurat di daerah.</p>
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate daerah layanan manajemen Kebakaran (WMK))
Konsep	Tingkat Waktu Tanggap
Definisi/Deskripsi	Ukuran kemampuan layanan manajemen kebakaran dalam merespons kejadian kebakaran sejak laporan diterima hingga unit pemadam tiba di lokasi kejadian, sesuai dengan standar waktu tanggap yang telah ditetapkan.
Klasifikasi	detail kejadian kebakaran (lokasi, waktu, korban, dll)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap sesuai standar / Total kejadian kebakaran yang ditangani x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Tingkat Waktu Tanggap WMK, menunjukkan semakin baik kemampuan pelayanan pemadam kebakaran dalam merespons kejadian secara cepat dan tepat. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, atau sistem manajemen respons kebakaran.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penanganan Darurat Kebakaran
Konsep	Penanganan Darurat Kebakaran
Definisi/Deskripsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam hal penanganan kejadian kebakaran yang ditangani oleh instansi pemadam kebakaran atau unit penanggulangan bencana daerah dalam periode tertentu, baik pada kawasan permukiman, perkantoran, industri, fasilitas umum, maupun area lainnya.
Klasifikasi	Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kejadian kebakaran yang mendapatkan penanganan darurat dalam satu periode pelaporan.
Interpretasi	Nilai tinggi dapat menunjukkan meningkatnya kejadian kebakaran atau meningkatnya kemampuan pelaporan dan respons pemadam kebakaran. Nilai rendah dapat mengindikasikan menurunnya kejadian kebakaran atau potensi kurang optimalnya pelaporan dan akses layanan penanganan darurat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penanganan Non Kebakaran
Konsep	Penanganan Non Kebakaran
Definisi/Deskripsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota dalam periode tertentu meliputi antara lain penyelamatan manusia, penyemprotan, pelepasan cincin, evakuasi jari terjepit, evakuasi hewan, penanganan bencana kecil, tumpahan bahan berbahaya, dan kejadian darurat lainnya di luar kebakaran, dll
Klasifikasi	Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kejadian non kebakaran yang ditangani dalam satu periode pelaporan.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingginya aktivitas dan peran layanan penanganan darurat non kebakaran. Nilai rendah dapat mengindikasikan rendahnya jumlah kejadian atau belum optimalnya pelaporan dan respons layanan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penanganan Hewan Liar
Konsep	Penanganan Hewan Liar
Definisi/Deskripsi	Jumlah kejadian penanganan hewan liar yang dapat laporan dari masyarakat, baik berupa evakuasi, penyelamatan, pengamanan, relokasi, maupun penanganan konflik antara manusia dan hewan liar dalam periode tertentu.
Klasifikasi	Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kejadian penanganan hewan liar yang tercatat dalam periode pelaporan.
Interpretasi	<p>Nilai tinggi menunjukkan banyaknya kejadian hewan liar yang memerlukan penanganan, yang dapat mencerminkan tingginya interaksi atau konflik antara manusia dan hewan liar.</p> <p>Nilai rendah menunjukkan lebih sedikit kejadian penanganan, yang dapat mengindikasikan kondisi lingkungan yang lebih terkendali atau minimnya laporan kejadian.</p>
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penanganan Sarang Tawon
Konsep	Penanganan Sarang Tawon
Definisi/Deskripsi	Jumlah kegiatan penanganan atau evakuasi sarang tawon yang dapat laporan dari masyarakat, baik berupa evakuasi, penyelamatan, pengamanan dalam periode tertentu.
Klasifikasi	Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh kasus penanganan sarang tawon yang berhasil ditangani dalam satu periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penanganan sarang tawon menunjukkan tingginya tingkat laporan masyarakat atau meningkatnya aktivitas tawon, serta mencerminkan respons pelayanan instansi terhadap potensi ancaman keselamatan. Penurunan jumlah penanganan dapat mengindikasikan berkurangnya kasus atau meningkatnya upaya pencegahan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: BAPPEDA

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsep	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Suatu ukuran atau indeks yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut. IPPD menilai sejauh mana rencana pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Klasifikasi	IPPD > 3.5 → Sangat Baik, 3.0 ≤ IPPD ≤ 3.5 → Baik, 2.5 ≤ IPPD < 3.0 → Cukup, IPPD < 2.5 → Kurang Baik
Ukuran	Dokumen
Satuan	Nilai Kualitas
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran, dengan proporsi tertimbang antara penilaian sinergi perencanaan pembangunan Daerah, kualitas perencanaan pembangunan Daerah, dan keterhubungan perencanaan pembangunan Daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPPD menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik, terarah, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebaliknya, nilai IPPD yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam penyusunan, integrasi, dan pengendalian dokumen perencanaan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Konsep	Inovasi Daerah
Definisi	Inovasi daerah adalah pembaruan atau terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik berupa ide, kebijakan, metode, maupun penerapan teknologi baru, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.
Klasifikasi	Skor >60: sangat inovatif, skor 41-60 : inovatif, skor 21-40: kurang inovatif, skor ≤20 : tidak inovatif
Ukuran	Dokumen
Satuan	Nilai Kualitas
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks inovasi daerah menunjukkan daerah itu memiliki kemampuan inovasi yang baik, inovasi berkelanjutan, serta berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kesalehan Sosial
Konsep	tingkat kesalehan sosial dalam masyarakat
Definisi	Indeks Kesalehan Sosial (IKS) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kesalehan seseorang. Kesalehan sosial merujuk pada perilaku individu yang tidak hanya berfokus pada hubungan dengan Tuhan melalui ibadah ritual, tetapi juga terkait kontribusi positif dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar
Klasifikasi	skor 81-100 : sangat baik, skor 61-80: baik, skor 41-60: cukup, skor 21-40: kurang, ≤20: sangat kurang
Ukuran	Kualitas
Satuan	Nilai
Rumus Perhitungan	IKS dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator. Setiap dimensi diukur dengan indikator tertentu menggunakan skala 1 - 100, yang mencerminkan tingkat kesalehan sosial dalam aspek tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai indeks menunjukkan masyarakat memiliki tingkat kesalehan sosial yang baik, tercermin dari kuatnya toleransi, kepedulian, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase sasaran strategis pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi
Konsep	sasaran strategis pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi
Definisi/Deskripsi	proporsi sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah yang mencapai tingkat kinerja minimal "Tinggi" berdasarkan Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk
Klasifikasi	Interval nilai $\geq 91\%$ mendapatkan predikat penilaian kinerja Sangat Tinggi; Interval nilai $76\% \leq 90\%$ mendapatkan predikat penilaian kinerja Tinggi; Interval nilai $66\% \leq 75\%$ mendapatkan predikat penilaian kinerja Sedang; Interval nilai $51\% \leq 65\%$ mendapatkan predikat penilaian kinerja Rendah; dan Interval nilai $\leq 50\%$ mendapatkan predikat penilaian kinerja Sangat Rendah.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah indikator sasaran strategis daerah dengan capaian minimal tinggi} / \text{jumlah indikator sasaran strategis daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Jika capaian masih rendah, perlu dilakukan strategi perbaikan seperti optimalisasi anggaran, peningkatan koordinasi antar-lembaga dan penguatan monitoring serta evaluasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase Policy Brief penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
Konsep	Policy Brief penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
Definisi	Indikator ini menunjukkan proporsi policy brief hasil penelitian dan pengembangan yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan dibandingkan dengan jumlah policy brief yang dihasilkan dalam periode tertentu. Tindak lanjut dapat berupa adopsi rekomendasi ke dalam kebijakan, penyusunan regulasi, program/kegiatan, atau keputusan strategis lainnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$-(\text{jumlah policy brief kelitbangan} / \text{jumlah seluruh kelitbangan}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar relevansi dan pemanfaatan hasil litbang dalam proses pengambilan kebijakan, yang mencerminkan keterkaitan kuat antara riset dan kebijakan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Konsep	inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Definisi/Deskripsi	Indikator ini menunjukkan jumlah inovasi yang dihasilkan dan/atau diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung reformasi birokrasi pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Inovasi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak inovasi yang dilaksanakan, menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan
Konsep	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan
Definisi/Deskripsi	Indikator ini menggambarkan jumlah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang telah memanfaatkan sistem terpadu perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi (monev) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pemanfaatan sistem terpadu tersebut menunjukkan adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi, dan berbasis data.
Klasifikasi	Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak daerah yang memanfaatkan sistem ini, semakin besar peluang tercapainya efektivitas dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	
Konsep	Peneliti
Definisi/Deskripsi	Peneliti adalah seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penelitian secara sistematis dan ilmiah guna menghasilkan pengetahuan, data, atau inovasi baru.
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Komposisi yang seimbang mencerminkan adanya kesempatan yang relatif setara bagi kedua jenis kelamin dalam bidang penelitian. Sebaliknya, ketimpangan jumlah peneliti berdasarkan jenis kelamin dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi penelitian yang lebih inklusif.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Peneliti di Kabupaten berdasarkan Jenjang Jabatan
Konsep	Peneliti
Definisi/Deskripsi	Peneliti adalah seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penelitian secara sistematis dan ilmiah guna menghasilkan pengetahuan, data, atau inovasi baru.
Klasifikasi	jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Komposisi jenjang jabatan yang proporsional mencerminkan keberlanjutan pembinaan karier peneliti serta kemampuan daerah dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Sebaliknya, dominasi pada jenjang tertentu atau kekurangan peneliti pada jenjang tinggi mengindikasikan perlunya penguatan pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan regenerasi peneliti di tingkat kabupaten.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standart
Konsep	Pengelolaan Keuangan
Definisi/Deskripsi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan, yang dibuktikan melalui hasil evaluasi, audit, atau penilaian kepatuhan.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar / Jumlah Seluruh OPD x100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase indikator, semakin baik tingkat kepatuhan OPD dalam menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa
Konsep	Dana Desa
Definisi/Deskripsi	Pagu Dana Desa adalah total alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran untuk seluruh desa dan, Realisasi Penyaluran Dana Desa adalah jumlah Dana Desa yang telah disalurkan kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu.
Klasifikasi	Desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa
Interpretasi	Nilai persentase mendekati atau mencapai 100% menunjukkan penyaluran Dana Desa berjalan optimal dan sesuai perencanaan. Nilai di bawah target mengindikasikan adanya keterlambatan atau kendala dalam proses penyaluran Dana Desa.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Opini BPK terhadap LKPD
Konsep	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Definisi/Deskripsi	pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Klasifikasi	Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Opini Tidak Wajar (TW)
Ukuran	Kategori
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Opini BPK terhadap LKPD menunjukkan tingkat kewajaran dan kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. WTP mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. WDP menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan wajar, namun masih terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki. TW menandakan adanya kesalahan material yang signifikan sehingga laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. TMP mengindikasikan bahwa BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan bukti audit atau permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Konsep	Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Definisi/Deskripsi	Dokumen laporan yang memuat hasil pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota yang diterima dari pemerintah pusat maupun provinsi, mencakup perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen / Laporan
Rumus Perhitungan	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten
Interpretasi	Tersusunnya laporan hasil pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota secara lengkap dan tepat waktu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Konsep	Pembinaan Implementasi SIPD
Definisi/Deskripsi	Jumlah individu (ASN atau non-ASN) dari pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis terkait implementasi SIPD pada bidang keuangan daerah yang diselenggarakan oleh instansi berwenang dalam periode tertentu.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi SIPD
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah orang yang mengikuti pembinaan implementasi SIPD bidang keuangan daerah, menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Konsep	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah
Definisi/Deskripsi	Jumlah individu yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, atau pelatihan terkait penganggaran daerah dalam periode tertentu.
Klasifikasi	Perangkat Daerah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah, menunjukkan semakin besar komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur di bidang penganggaran. Hal ini diharapkan berdampak pada kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jumlah peserta yang rendah dapat mengindikasikan masih terbatasnya upaya pengembangan kapasitas SDM pengelola anggaran daerah, yang berpotensi mempengaruhi kualitas penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Konsep	Rancangan Peraturan Daerah
Definisi/Deskripsi	Jumlah Ranperda dan Ranperkada yang disusun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD + Jumlah Ranperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Interpretasi	Semakin lengkap dan tepat waktu penyusunan serta penetapan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menunjukkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Presentase Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Konsep	Realisasi PAD
Definisi	Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi terhadap total pendapatan daerah dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persen.
Klasifikasi	jenis PAD
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Pendapatan Daerah} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Jika persentase rendah, menunjukkan ketergantungan tinggi pada sumber pendapatan lain (misalnya dana transfer dari pusat).
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Prosentase kenaikan PAD
Konsep	Kenaikan PAD
Definisi	Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peningkatan jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri dibandingkan periode sebelumnya.
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$(\text{PAD tahun } n - \text{PAD tahun } n-1) / (\text{PAD tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kenaikan PAD maka Optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah berjalan baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerimaan Daerah
Konsep	Penerimaan Daerah
Definisi	Penerimaan Daerah adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerimaan Daerah
Interpretasi	Semakin besar jumlah penerimaan daerah maka Kapasitas fiskal daerah semakin kuat Dukungan pendanaan terhadap program pembangunan dan pelayanan publik semakin memadai.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah
Konsep	Anggaran Domestik
Definisi	Anggaran Domestik adalah alokasi dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pendapatan dalam negeri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	-
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$\text{jumlah anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah} / \text{jumlah total anggaran domestik}$
Interpretasi	Semakin besar dan optimal anggaran domestik menunjukkan bahwa Kemandirian fiskal pemerintah, semakin kuat Ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal semakin berkurang
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah
Konsep	Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah
Definisi	Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	jenis pajak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah
Interpretasi	Penerimaan pajak yang meningkat menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang semakin baik serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sebaliknya, penerimaan yang rendah mengindikasikan perlunya optimalisasi basis pajak, perbaikan sistem pemungutan, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Konsep	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Definisi	Dokumen Ketetapan Pajak adalah surat atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam periode tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Interpretasi	Keberadaan dan kualitas dokumen ketetapan pajak menunjukkan bahwa Proses penetapan pajak daerah telah dilakukan secara sah dan terukur, Administrasi perpajakan daerah berjalan tertib dan transparan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Konsep	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Definisi	Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	laporan
Rumus Perhitungan	jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Interpretasi	semakin sering dilakukannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman aparatur dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah..
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Konsep	Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Definisi	Data pajak adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan pemungutan pajak, baik yang mencakup objek pajak, subjek pajak, besaran pajak terutang, pembayaran, serta realisasi penerimaan pajak dalam suatu periode tertentu.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Interpretasi	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah menunjukkan bahwa pengelolaan basis data pajak telah berjalan dengan baik dan mendukung ketersediaan data yang akurat serta mutakhir. Basis data yang terkelola secara berkelanjutan menjadi dasar penting dalam perencanaan, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, meskipun tetap diperlukan pemutakhiran data dan penguatan sistem secara berkesinambungan.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Konsep	Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Definisi	Kebijakan pajak daerah adalah seperangkat ketentuan, strategi, dan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengaturan, pemungutan, dan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Laporan
Rumus Perhitungan	jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Interpretasi	Semakin banyak dilaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Konsep	Layanan Konsultasi Pajak Daerah
Definisi	Layanan dan konsultasi pajak daerah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan informasi, bimbingan, dan pendampingan kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan daerah.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	layanan
Rumus Perhitungan	jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Interpretasi	Layanan dan konsultasi pajak daerah mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Konsep	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Definisi	Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas dan infrastruktur yang disediakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan atau pelayanan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	jumlah Sarana + jumlah Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Interpretasi	Ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana yang baik berkontribusi terhadap kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian kinerja yang optimal.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompilasi Produk Administrasi

Metadata Indikator Perangkat Daerah: BKPSDM

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai sistem merit
Konsep	sistem merit
Definisi/Deskripsi	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
Klasifikasi	Wilayah
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai Sistem Merit, semakin baik penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan ASN telah dilaksanakan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai kompetensi. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola manajemen ASN agar sesuai dengan prinsip sistem merit.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Nilai dimensi kompetensi
Konsep	Nilai kompetensi
Definisi/Deskripsi	Nilai Dimensi Kompetensi adalah skor yang menggambarkan tingkat kompetensi aparatur/SDM berdasarkan pemenuhan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Klasifikasi	-
Ukuran	Nilai
Satuan	-
Rumus Perhitungan	total skor kompetensi yang diperoleh / skor maksimal kompetensi x100
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan aparatur memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nilai sedang menunjukkan kompetensi cukup namun masih memerlukan penguatan melalui pelatihan atau pengembangan. Nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang perlu segera ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas SDM.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)
Konsep	Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar
Definisi/Deskripsi	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dan telah memiliki sertifikat kompetensi resmi dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional, dengan pengecualian guru dan tenaga kesehatan. Sertifikat kompetensi adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seorang pegawai memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang diakui secara profesional.
Klasifikasi	jenjang jabatan fungsional
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan/Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi Kualifikasi Pendidikan ASN maka semakin tinggi Nilai Dimensi Kinerja pada IP ASN dan mampu meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Konsep	Pegawai Fungsional yang ada pada Instansi Pemerintah
Definisi/Deskripsi	Rasio pegawai fungsional (%) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dibandingkan dengan total jumlah PNS, dengan pengecualian guru dan tenaga kesehatan. Jabatan fungsional adalah jabatan yang memerlukan keahlian khusus atau kompetensi tertentu dan biasanya terkait dengan tugas-tugas spesifik di luar administrasi umum.
Klasifikasi	jenjang jabatan fungsional
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%
Interpretasi	Rasio tinggi menunjukkan semakin banyak PNS yang menempati jabatan fungsional, menandakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kompetensi. Rasio rendah menunjukkan dominasi jabatan struktural atau pelaksana, yang dapat mengindikasikan perlunya penguatan dan pengembangan jabatan fungsional. Semakin terpenuhinya pengisian pada jabatan Fungsional tertentu maka akan meningkatkan kinerja organisasi
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah atau Dasar
Konsep	Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar
Definisi/Deskripsi	perbandingan proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar, terhadap total jumlah pegawai
Klasifikasi	jenjang pendidikan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Pegawai Berpendidikan Tinggi} / \text{total jumlah pegawai}) \times 100\%$ $(\text{Jumlah Pegawai Berpendidikan Menengah} / \text{total jumlah pegawai}) \times 100\%$ $(\text{Jumlah Pegawai Berpendidikan Dasar} / \text{total jumlah pegawai}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai rasio pendidikan tinggi yang lebih besar menunjukkan bahwa proporsi pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi semakin dominan, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
Konsep	Indeks Profesionalitas ASN
Definisi/Deskripsi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	IPASN = Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator IPASN = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi + Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi + Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja + Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan semakin baik kualitas dan profesionalisme ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin di Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Konsep	ASN menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan golongan/ruang kepangkatan serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Kepangkatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	- semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik - Semakin tinggi jumlah ASN pada golongan kepangkatan tertentu menunjukkan dominasi struktur jabatan pada jenjang tersebut. Perbandingan jumlah ASN laki-laki dan perempuan menggambarkan tingkat keseimbangan gender dalam struktur kepegawaian Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Konsep	ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Pendidikan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dihitung dengan menjumlahkan ASN pada masing-masing kategori pendidikan dan jenis kelamin.
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi ASN dengan tingkat pendidikan Sarjana ke atas menunjukkan kualitas sumber daya aparatur yang semakin baik. Distribusi ASN berdasarkan jenis kelamin mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN di Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Konsep	Pengembangan Kompetensi
Definisi/Deskripsi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi teknis dibandingkan dengan jumlah total ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dalam suatu periode tertentu
Klasifikasi	Jenis pengembangan kompetensi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi / Jumlah seluruh ASN x100%
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah atau persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, menunjukkan semakin baik komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan akses dan perencanaan pengembangan kompetensi ASN.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Konsep	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Definisi/Deskripsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan secara terstruktur dan diakui secara resmi, meliputi pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional, Pelatihan Kepemimpinan, dan Pelatihan Prajabatan dalam satu periode pelaporan.
Klasifikasi	Jenis / Kegiatan (pengembangan kompetensi)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan pada periode berjalan
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi menunjukkan semakin baik komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, yang berdampak positif pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
Konsep	ASN yang Tersertifikasi
Definisi/Deskripsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi berwenang sesuai dengan bidang tugas dan jabatan.
Klasifikasi	Jenis Sertifikasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh ASN yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ASN yang tersertifikasi, menunjukkan semakin baik tingkat kompetensi dan profesionalisme ASN di lingkup Kabupaten/Kota, yang berdampak positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator Perangkat Daerah: BAKESBANGPOL

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Penanganan Konflik Sosial dalam Kehidupan Beragama
Konsep	Konflik sosial dalam beragama
Definisi/Deskripsi	Konflik sosial dalam beragama adalah pertentangan atau ketegangan yang terjadi antarindividu atau kelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, tafsir ajaran, atau identitas keagamaan, yang berdampak pada terganggunya hubungan sosial dan ketertiban masyarakat.
Klasifikasi	Konflik yang tertangani
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah Kasus konflik sosial beragama yang Ditangani dibagi jumlah kasus konflik sosial beragama dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penanganan konflik sosial dalam kehidupan beragama, semakin baik kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola perbedaan keyakinan secara damai dan konstruktif.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Masyarakat/Lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaanya
Konsep	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Definisi/Deskripsi	Peningkatan wawasan kebangsaan adalah upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta persatuan, toleransi, dan ketahanan nasional.
Klasifikasi	Kegiatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi target jumlah masyarakat yang dibina dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase masyarakat/lembaga yang meningkatkan wawasan kebangsaan menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat atau lembaga yang Memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)/ susunan anggota FKUB
Konsep	Aktor Umat Beragama
Definisi/Deskripsi	Aktor umat beragama adalah pihak-pihak yang berasal dari atau mewakili komunitas keagamaan yang memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan, toleransi, serta stabilitas kehidupan beragama di masyarakat.
Klasifikasi	susunan anggota
Ukuran	Jumlah
Satuan	orang
Rumus Perhitungan	Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)/ susunan anggota FKUB
Interpretasi	Semakin banyak dan semakin proporsional jumlah aktor atau anggota FKUB menunjukkan bahwa Keterwakilan unsur umat beragama semakin inklusif dan seimbang, Koordinasi dan komunikasi lintas agama semakin kuat, Kapasitas kelembagaan FKUB dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik keagamaan semakin meningkat.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi/ kegiatan FKUB
Konsep	Event Keagamaan dan Budaya
Definisi/Deskripsi	Event keagamaan dan budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan, tradisi adat, dan ekspresi budaya lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat lintas agama dan budaya dalam rangka memperkuat persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial.
Klasifikasi	Jenis Kegiatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kegiatan
Rumus Perhitungan	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi/ kegiatan FKUB
Interpretasi	Semakin banyak event yang difasilitasi menunjukkan Upaya penanaman nilai toleransi dan moderasi beragama semakin intensif, Ruang interaksi dan dialog antarumat beragama semakin terbuka.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan
Konsep	Kasus Konflik Intra umat Beragama
Definisi/Deskripsi	Kasus Konflik Intra Umat Beragama yang Diselesaikan adalah konflik yang terjadi di dalam satu kelompok atau komunitas agama yang berhasil ditangani dan dituntaskan melalui mekanisme yang damai, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Klasifikasi	jenis kasus
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kasus
Rumus Perhitungan	(jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan/jumlah kasus konflik intra umat beragama yang terjadi)x100%
Interpretasi	Semakin banyak kasus yang dapat diselesaikan menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian konflik internal umat beragama berjalan efektif.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	ASN
Definisi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN aktif di Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan golongan/ruang kepangkatan serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
Klasifikasi	jabatan dan jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	semester
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	semester
Metode	kompromim

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: BPBD

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase desa tangguh bencana
Konsep	Desa Tangguh Bencana
Definisi/Deskripsi	Persentase Desa Tangguh Bencana merupakan perbandingan antara jumlah desa yang telah terbantu Desa Tangguh Bencana (Destana) dengan jumlah desa di daerah rawan bencana.
Klasifikasi	Desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$(\text{jumlah desa tangguh bencana} / \text{jumlah seluruh desa}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai persentase yang dihasilkan, semakin banyak destana terbentuk sehingga ketahanan desa terhadap potensi bencana semakin tinggi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani
Konsep	rata-rata waktu respon dan penanganan bencana
Definisi/Deskripsi	rata-rata waktu respons serta penanganan oleh pihak yang berwenang atau lembaga terkait pada suatu kejadian bencana. Kejadian bencana ini mencakup berbagai jenis bencana alam atau non-alam, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan lainnya..
Klasifikasi	-
Ukuran	rata-rata
Satuan	menit
Rumus Perhitungan	Rata-rata waktu kejadian bencana yang direspon dan ditangani
Interpretasi	Angka rata-rata yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas respons dan penanganan bencana di daerah tertentu. Jika rata-rata tinggi, ini dapat menunjukkan bahwa kejadian bencana terjadi lebih sering dan memerlukan penanganan yang lebih cepat serta lebih banyak sumber daya. Sebaliknya, rata-rata yang rendah mungkin menunjukkan bahwa kejadian bencana jarang terjadi, namun perlu pengamatan lebih lanjut untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang tepat.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA
Konsep	bantuan pasca bencana
Definisi/Deskripsi	Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan sarana dan prasarana pada rumah atau infrastruktur yang terdampak bencana
Klasifikasi	Kecamatan, desa, jenis bencana
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan atau direalisasikan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang harus diberikan berdasarkan JITUPASNA}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin maksimal dalam mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
Konsep	Logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Definisi/Deskripsi	Kegiatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan yang dapat dipergunakan untuk melakukan, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana vital.
Klasifikasi	Nama Peralatan, keadaan peralatan
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Jumlah peralatan yang layak atau memadai / Jumlah peralatan yang tersedia x 100%
Interpretasi	Semakin terpenuhinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai, maka pencapaian dan tujuan mitigasi, mengatasi dan menanggulangi bencana terlaksana dengan baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	Semester
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS)
Konsep	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini
Definisi/Deskripsi	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini (EWS) mengukur sejauh mana sistem tersebut dapat memberikan peringatan yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi dampak bencana.
Klasifikasi	Jenis EWS, titik pemasangan EWS
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Jumlah sistem peringatan dini yang masih berfungsi dengan baik / Jumlah sistem peringatan dini yang tersedia x 100%
Interpretasi	Semakin banyak sistem peringatan yang sudah terpasang berfungsi dengan baik maka pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko bencana, serta persiapan tindakan tanggap darurat terlaksana secara maksimal
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase korban selamat akibat bencana
Konsep	Korban bencana
Definisi/Deskripsi	Tingkat keberhasilan korban selamat pada saat terjadinya bencana .
Klasifikasi	Jenis Bencana
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Jumlah korban yang berhasil diselamatkan / Jumlah seluruh korban akibat terjadinya bencana x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak korban terdampak bencana yang terselamatkan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana
Konsep	pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana
Definisi/Deskripsi	Pemenuhan kebutuhan dasar terdampak korban bencana berupa logistik pangan, sandang, papan, air bersih dan logistik lainnya.
Klasifikasi	Jenis Bencana
Ukuran	Persentase
Satuan	persen
Rumus Perhitungan	Jumlah kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi / Jumlah kebutuhan dasar terdampak bencana x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka korban yang terdampak bencana tetap tercukupi dan terjamin.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Konsep	tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana
Definisi/Deskripsi	Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerentanannya suatu wilayah atau daerah terhadap potensi bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam.
Klasifikasi	Kelas risiko bencana Kelas risiko rendah: 0–0,333, Kelas risiko sedang: 0,334–0,666, Kelas risiko tinggi: 0,667–1
Ukuran	Indeks
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	Rumus indeks risiko bencana adalah $DR = H \times V$, yang berarti Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan (rumus definisi)
Interpretasi	Indeks Risiko Bencana yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki potensi risiko bencana yang besar, baik dari segi frekuensi kejadian bencana maupun dampaknya terhadap masyarakat dan infrastruktur. Hal ini menandakan perlunya langkah-langkah mitigasi bencana yang lebih intensif, serta peningkatan kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah dapat menunjukkan wilayah yang relatif lebih aman atau stabil terhadap bencana, meskipun tetap memerlukan pemantauan untuk menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi.
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Nganjuk
Konsep	Daerah rawan bencana longsor
Definisi/Deskripsi	wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tanah longsor
Klasifikasi	-
Ukuran	Jumlah
Satuan	Daerah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin sedikit daerah rawan bencana longsor yang ada di daerah maka penanganan resiko bencana longsor semakin kecil
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Kerugian nominal akibat bencana alam
Konsep	Nominal Kerugian
Definisi/Deskripsi	Penghitungan / tafsiran besar kerugian akibat bencana alam secara rupiah
Klasifikasi	Jumlah kerugian, Jenis Bencana Alam
Ukuran	Jumlah
Satuan	Daerah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Besarnya nominal kerugian akibat bencana dijadikan dasar pengajuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah
Konsep	Mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah
Definisi/Deskripsi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu daerah terhadap bencana berdasarkan tujuh parameter utama, yaitu : perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan rencana terpadu, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan temantik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan daryrat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana
Klasifikasi	
Ukuran	Indeks
Satuan	Skor
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian 7 parameter IKD dengan 7 priotitas dan 71 indikator dan 248 pertanyaan.
Interpretasi	Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka semakin baik kapasitas penanggulangan bencana di daerah tersebut
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana
Konsep	Dokumen
Definisi/Deskripsi	Dokumen yang disediakan oleh BPBD diantaranya: 1. Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. Rencana Kontijensi (untuk masing-masing potensi bencana)
Klasifikasi	Jenis dokumen, Jumlah dokumen
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan
Konsep	forum
Definisi/Deskripsi	forum pengurangan risiko bencana (FPRB) tingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan stakeholder
Klasifikasi	jumlah forum, jenis forum
Ukuran	Jumlah
Satuan	Forum
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Triwulan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah peralatan dan logistik kebencanaan yang memiliki standar minimal
Konsep	peralatan dan logistik kebencanaan yang memiliki standar minimal
Definisi/Deskripsi	merupakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana yang sesuai standar minimal
Klasifikasi	Nama peralatan, Jumlah, Kondisi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Peralatan dan logistik digunakan dalam penanganan kebencanaan harus berfungsi dengan baik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana
Konsep	kelompok masyarakat tangguh bencana
Definisi/Deskripsi	masyarakat yang dibentuk untuk mempersiapkan, menanggulangi, dan memulihkan diri dari bencana yang mungkin terjadi.
Klasifikasi	kecamatan, desa, jumlah anggota kelompok
Ukuran	Jumlah
Satuan	kelompok
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	masyarakat lebih paham dan siap dalam menanggulangi dan memulihkan diri dari bencana
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah korban hilang akibat bencana
Konsep	Korban bencana
Definisi/Deskripsi	Korban bencana alam yang tidak bisa ditemukan oleh tim SAR saat terjadinya bencana
Klasifikasi	Jenis bencana, Jumlah korban yang hilang
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah korban mengungsi akibat bencana
Konsep	Pengungsi bencana
Definisi/Deskripsi	Korban bencana yang berada di tempat pengungsian
Klasifikasi	Nama pengungsian, Jumlah pengungsi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Lebih mudah dalam pemberian bantuan logistik
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah korban meninggal akibat bencana
Konsep	Korban bencana alam yang meninggal
Definisi/Deskripsi	Jumlah korban akibat bencana yang ditemukan meninggal dunia
Klasifikasi	Jenis Bencana, Lokasi Bencana, Jumlah Korban Meninggal Dunia
Ukuran	Jumlah
Satuan	Nyawa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat
Konsep	Pelayanan Data
Definisi/Deskripsi	Layanan Informasi kebencanaan terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali
Klasifikasi	
Ukuran	Jumlah
Satuan	Layanan
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Layanan data yang akurat dapat membantu pemerintah dalam pemberian bantuan
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana
Konsep	kajian
Definisi/Deskripsi	mengukur kuantitas dokumen ilmiah atau naskah akademik yang dihasilkan sebagai dasar hukum atau arah kebijakan di daerah.
Klasifikasi	Judul kajian, kebijakan/regulasi yang dihasilkan
Ukuran	Jumlah
Satuan	dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana (MHEWS) terpadu
Konsep	Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana (MHEWS) terpadu
Definisi/Deskripsi	Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) atau disebut dengan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana. Suatu sistem peringatan dini yang mampu mengatasi beberapa bahaya dan/atau dampak dari jenis yang sama atau berbeda dalam konteks di mana peristiwa berbahaya dapat terjadi sendirian, secara bersamaan, secara berjenjang atau kumulatif dari waktu ke waktu, dan dengan mempertimbangkan potensi efek yang saling terkait. Sistem peringatan dini multi bahaya memiliki kemampuan untuk memperingatkan satu atau lebih bahaya, meningkatkan efisiensi dan konsistensi peringatan melalui mekanisme dan kapasitas yang terkoordinasi dan kompatibel, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk identifikasi bahaya dan pemantauan yang diperbarui dan akurat untuk berbagai bahaya
Klasifikasi	berdasarkan bencana
Ukuran	Jumlah
Satuan	sistem
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamam Bencana (MHEWS) terpadu
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana
Konsep	Sosialisasi
Definisi/Deskripsi	kegiatan penyebaran informasi, edukasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di suatu wilayah
Klasifikasi	berdasarkan sasaran sosialisasi
Ukuran	jumlah
Satuan	sosialisasi
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin masif sosialisasi dilakukan, diharapkan tingkat fatalitas dan kerugian ekonomi saat terjadi bencana dapat ditekan
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan
Konsep	pelayanan publik
Definisi/Deskripsi	Merupakan Indikator Target Statistik terkait persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan
Klasifikasi	pelayanan publik
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	Jumlah pelayanan publik yang berhasil dipulihkan / jumlah pelayanan publik yang lumpuh dikarenakan bencana x 100%
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang baru dibentuk di daerah rawan bencana
Konsep	Destana
Definisi/Deskripsi	desa atau kelurahan di area berisiko tinggi yang secara resmi mulai mengembangkan kapasitas mandiri untuk mengenali, memitigasi, dan merespons bencana melalui program pemberdayaan masyarakat
Klasifikasi	berdasarkan kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Desa
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun
Konsep	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Definisi/Deskripsi	dokumen rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah
Klasifikasi	Dokumen RPB
Ukuran	Jumlah
Satuan	Dokumen
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kejadian bencana berdasarkan jenisnya
Konsep	Bencana
Definisi/Deskripsi	jumlah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan
Klasifikasi	berdasarkan jenis bencana
Ukuran	Jumlah
Satuan	Bencana
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	-
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah kejadian bencana yang ditangani
Konsep	Bencana alam
Definisi/Deskripsi	Jumlah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang berhasil ditangani
Klasifikasi	berdasarkan bencana
Ukuran	Jumlah
Satuan	bencana
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak bencana yang dapat ditangani menunjukkan kesiapan tim dalam penanggulangan kebencanaan
Periodesasi	Tahunan

Metode	Kompromin
--------	-----------

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah korban terdampak bencana yang ditangani
Konsep	Pengulangan Bencana
Definisi/Deskripsi	Jumlah korban adalah banyaknya orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Klasifikasi	Jenis kejadian bencana, kondisi korban
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah rambu kebencanaan dan papan informasi bencana
Konsep	Rambu Kebencanaan
Definisi/Deskripsi	keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan Bencana, berupa lambang, huruf, angka, dan/atau frasa, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan Bencana.
Klasifikasi	Jenis Rambu, Lokasi , Jumlah Rambu
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rambu
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	semakin banyak rambu yang dipasang di daerah rawan bencana akan meningkatkan kewaspadaan warga sekitar
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
Konsep	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
Definisi/Deskripsi	upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan
Klasifikasi	Nama Satuan Pendidikan Aman Bencana
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sekolah
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Satuan Pendidikan yang sudah mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan dan cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Sistem Peringatan Dini / Early Warning System (EWS) yang terpasang
Konsep	Sistem Peringatan Dini
Definisi/Deskripsi	Sistem yang dipasang untuk dapat memberikan peringatan yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi dampak bencana.
Klasifikasi	Lokasi pemasangan EWS, Jumlah alat
Ukuran	Jumlah
Satuan	Alat
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin banyak EWS terpasang, maka petugas BPBD akan lebih cepat mengetahui sinyal akan terjadi bencana
Periodesasi	Tahunan
Metode	Kompromin

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: RSD Nganjuk

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan RSD Nganjuk
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSD Nganjuk. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pada pelayanan RSD Nganjuk
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$IKM = ((\text{Jumlah } xi) \times 100) / y$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke-i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke-i=rata-rata skor kepentingan unsur ke-i/jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke-i, y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	Semakin mendekati angka 100, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kecamatan. IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Akreditasi Rumah Sakit
Konsep	Akreditasi Rumah Sakit
Definisi/Deskripsi	Akreditasi Rumah Sakit adalah proses penilaian eksternal yang sistematis dan independen untuk menilai tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien oleh rumah sakit.
Klasifikasi	-
Ukuran	Status
Satuan	Nilai
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat akreditasi rumah sakit, semakin baik kualitas sistem pelayanan dan keselamatan pasien yang diterapkan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	CRR (Cost Recovery Rate)
Konsep	Efisiensi Kinerja Keuangan Rumah Sakit
Definisi	Nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar pendapatan rumah sakit dapat menutup belanja operasional yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Klasifikasi	Pendapatan dan Belanja Operasional Rumah Sakit
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$CRR = \frac{\text{Pendapatan (rupiah)}}{\text{belanja operasional (rupiah)}}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase CRR, maka menunjukkan semakin baik kemampuan Rumah Sakit dalam menutup belanja operasional Rumah Sakit
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pasien Penerima Layanan RSD Nganjuk Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pasien penerima layanan RSD Nganjuk
Definisi	Pasien penerima layanan RSD Nganjuk adalah seluruh individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk, baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, maupun layanan penunjang medis.
Klasifikasi	Pasien
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Perbedaan jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin dapat mencerminkan karakteristik kebutuhan kesehatan, tingkat kesadaran berobat, serta jenis layanan yang dominan digunakan. Informasi ini bermanfaat sebagai dasar perencanaan peningkatan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan laki-laki dan perempuan secara proporsional dan berkeadilan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

Metadata Indikator

Perangkat Daerah: RSD Kertosono

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks kepuasan layanan RSD
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSD Kertosono. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pada pelayanan RSD Kertosono
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$IKM = ((\text{Jumlah } xi) \times 100) / y$, dimana $i=1,2,\dots,9$, xi =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke-i dengan $xi=wi \times zi$, wi = penimbang unsur ke-i=rata-rata skor kepentingan unsur ke-i/jumlah rata-rata skor kepentingan, zi = rata-rata skor kepuasan unsur ke-i, y =skala maksimum penilaian
Interpretasi	Semakin mendekati angka 100, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kecamatan. IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Bed Occupancy Rate (BOR)
Konsep	Angka pemakaian tempat tidur
Definisi	Bed Occupancy Rate (BOR) adalah suatu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.
Klasifikasi	RSD Kertosono
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$BOR = \frac{\sum \text{Jumlah Perawatan}}{\sum \text{Jumlah Tempat tidur} + \sum \text{Hari dalam satu periode}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat pemanfaatan tempat tidur.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Turn Over Interval (TOI)
Konsep	Tenggang perputaran tempat tidur
Definisi	Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.
Klasifikasi	RSD Kertosono
Ukuran	Waktu
Satuan	Hari
Rumus Perhitungan	$TOI = \frac{(\sum \text{Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \sum \text{Hari Perawatan}}{\sum \text{Pasien Keluar (Hidup+ Mati)}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, maka semakin rendah efisiensi penggunaan tempat tidur.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Net Death Rate (NDR)
Konsep	Angka kematian 48 jam setelah dirawat
Definisi	Nett Dead Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
Klasifikasi	RSD Kertosono
Ukuran	Presentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$NDR = \frac{\sum \text{Pasien mati } \geq 48 \text{ jam}}{\sum \text{Pasien keluar (hiduo + mati)}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, maka semakin rendah mutu pelayanan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Cost Recovery Rate (CRR)
Konsep	Efisiensi Kinerja Keuangan Rumah Sakit
Definisi	Nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar pendapatan rumah sakit dapat menutup belanja operasional yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
Klasifikasi	Pendapatan dan Belanja Operasional Rumah Sakit
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$CRR : \frac{\text{Pendapatan (rupiah)}}{\text{belanja operasional (rupiah)}}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase CRR, maka menunjukkan semakin baik kemampuan Rumah Sakit dalam menutup belanja operasional Rumah Sakit
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Pasien Penerima Layanan RSD Kertosono Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pasien penerima layanan RSD Kertosono
Definisi	Pasien penerima layanan RSD Kertosono adalah seluruh individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kertosono, baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, maupun layanan penunjang medis.
Klasifikasi	Pasien
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Perbedaan jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin dapat mencerminkan karakteristik kebutuhan kesehatan, tingkat kesadaran berobat, serta jenis layanan yang dominan digunakan. Informasi ini bermanfaat sebagai dasar perencanaan peningkatan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan laki-laki dan perempuan secara proporsional dan berkeadilan.
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periodesasi	tahunan
Metode	kompromim

Metadata Indikator Perangkat Daerah: KECAMATAN

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
Konsep	Kinerja Kecamatan
Definisi/Deskripsi	Indeks Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah indeks untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis melalui sistem pengukuran kinerja
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	Penghitungan indeks melalui aplikasi SINCAN
Interpretasi	Semakin besar nilai indeksnya, semakin baik kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
Konsep	Kepuasan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pada pelayanan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Nilai IKM diambil dari Aplikasi E Sukma Jatim.
Klasifikasi	-
Ukuran	Indeks
Satuan	-
Rumus Perhitungan	$IKM = ((\text{Jumlah } x_i) \times 100) / y$, dimana $i=1,2,\dots,9$, x_i =rata-rata kepuasan tertimbang unsur pelayanan ke-i dengan $x_i = w_i \times z_i$, w_i = penimbang unsur ke-i=rata-rata skor kepentingan unsur ke-i/jumlah rata-rata skor kepentingan, z_i = rata-rata skor kepuasan unsur ke-i, y =skala maksimum penilaian (Perhitungan melalui aplikasi E-Sukma Jatim)
Interpretasi	Semakin mendekati angka 100, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kecamatan. IKM terbagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Nilai 25-64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik). 2) Nilai 65-76,6 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik). 3) Nilai 76,61-88,3 dengan mutu pelayanan B (Baik). 4) Nilai 88,31-100 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Konsep	Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Definisi/Deskripsi	Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, penertiban pkl, perkelahian, dll
Klasifikasi	-
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$((\text{Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun } n-1 - \text{Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun } n) / \text{Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun } n-1) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif: semakin besar angkanya, semakin sedikit jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya Nilai minus: menandakan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi semakin bertambah dari tahun sebelumnya.
Periode	Tahunan
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Konsep	Aparatur Sipil Negara (ASN)
Definisi/Deskripsi	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
Klasifikasi	Jenis Kelamin, Jabatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah PNS + PPPK
Interpretasi	semakin banyak ASN dengan jabatan yang sesuai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi

ASPEK	KETERANGAN
Nama Indikator	Jumlah Tenaga Non ASN Menurut Jenis Kelamin
Konsep	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Definisi/Deskripsi	Pegawai non ASN adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Klasifikasi	Jenis Kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Rumus Perhitungan	Jumlah Pegawai Non ASN
Interpretasi	pemetaan tenaga non asn yang tepat dapat mendukung kegiatan operasional hingga tugas teknis yang spesifik sesuai kebutuhan instansi
Periode	Semester
Metodologi	Kompilasi Produk Administrasi



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK**